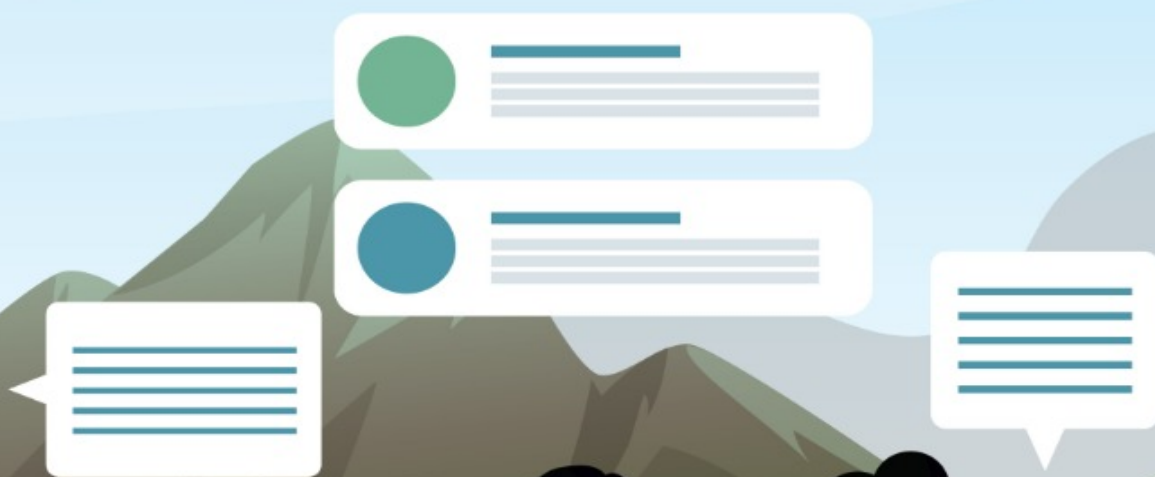


BUKU 4

PANDUAN PRBBK

Pembelajaran PRBBK di Indonesia



SIAP SIAGA
Australia - Indonesia Partnership
for Disaster Risk Management



PADUAN

PENGELOLAAN RISIKO BENCANA BERBASIS KOMUNITAS (PRBBK)

BUKU

4

PEMBELAJARAN PRBBK DI INDONESIA

Editor Ahli :

Eko Teguh Paripurno, dan Petrasa Wacana

Penulis/Kontributor : Eko Teguh Paripurno, Petrasa Wacana, Fredy Chandra, Wahyu Sugeng Triadi, Sofa Qudus, Ahmad Arif, Melky Koli Baran, Felmi Yetti, Rizwan Rizkiandi, Sigit "Ipung" Purwanto, Tatang Elmi Wibowo, Gandar Mahojwala, Sadiq, Sari Mutia, Marjoko

Kontributor Organisasi : PSMB UPN, Oxfam di Indonesia, Yakkum Emergency Unit, Yayasan Pusaka Indonesia, Perkumpulan Imunitas, Save the Children, Perdu Papua Barat, KIPRA Papua, Konsepsi, LP2DER, Rumah Zakat, Field Bumi Ceria, ASB

Panduan ini diupdate dan disusun ulang oleh MPBI dalam versi Bahasa Indonesia dengan dukungan BNPB, Siap Siaga, PSMB UPN, LPTP Solo.



SIAP SIAGA
Australia – Indonesia Partnership
for Disaster Risk Management



DAFTAR ISI

	Daftar Isi	i
1	Ketangguhan Komunitas Dalam Menghadapi Bencana Banjir 2016 di Kota Bima <i>Oxfam di Indonesia dan YPPS Flores Timur</i>	1 - 23
2	Kemampuan Adaptasi Petani di Flores Timur Menghadapi Ketidakpastian Iklim Yang Berubah <i>Oxfam di Indonesia dan YPPS Flores Timur</i>	24 - 38
3	UMKM Tangguh di Kota Mataram <i>Oxfam di Indonesia dan Konsepsi Mataram</i>	39 - 50
4	Integrasi Manajemen Risiko, Inklusi Sosial dan Pembangunan Sosial Ekonomi di Kabupaten Mentawai <i>FELMI YETTI (Program Manager Yayasan FIELD Indonesia kerjasama dengan Arbeiter Samariter Bund)</i>	50 - 61
5	Cerita Lapangan Membangun Ketangguhan Berbasis Komunitas <i>Melky Koli Baran/Direktur YPPS Flores Timur</i>	62 - 74
6	Riset Aksi Petani : Belajar dan Melakukan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim <i>Field Bumi Ceria</i>	75 - 79
7	Mitigasi Bencana Tsunami Oleh Komunitas Desa Kambang <i>Rumah Zakat</i>	80 - 83
8	Tim Siaga Bencana Desa : Katalisator Ketangguhan Desa Dalam Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas di Kawasan Sembalun <i>Rizwan Rizkiandi : Konsorsium Untuk Studi dan Pengembangan Partisipasi (Konsepsi) NTB</i>	84 - 91
9	Ketangguhan Komunitas di Tahan Manokwari	92 - 100
10	Ketangguhan Komunitas di Tanah Papua <i>OXFAM di Indonesia dan KIPRA Papua</i>	101 - 113
11	Kami Mengungsi Bukan di Ungsikan	114 - 119

	<i>Cerita dari Gunung Merapi (Sumiman ditulis ulang oleh Sigit "Ipung" Purwanto)</i>	
12	Dusun Tembi Mandiri : Pandemi Sebagai Batu Loncatan Menuju Ekonomi Kreatif <i>Tatang Elmi Wibowo dan Gandar Mahojwala</i>	120 - 124
13	Ngaruat Desa Sirnajaya <i>Narasi Bumi Save the Children Indonesia</i>	125 - 132
14	Pampa Sebuah Konsep Ketahanan Pangan Lokal dalam Situasi Bencana <i>Sadiq. Perkumpulan Imunitas Sulawesi Tengah</i>	132- 137
15	Erupsi 2020 dan 2021 Mematik Api Ketangguhan Komunitas di Sisi Tenggara Gunung Semeru <i>Wahyu Sugeng Triadi dan Sofa Qudus</i>	138 - 152
16	Perjalanan Ketangguhan KWT Melati <i>Yakkum Emergency Unit (YEU)</i>	153 - 155
17	Ide Inovasi Aksi Inklusi (IDEAKSI) sebagai Upaya Mewujudkan Pengelolaan Risiko Bencana Berbasis Komunitas di Yogyakarta <i>Yakkum Emergency Unit</i>	156 - 169
18	Menggali Tradisi Sebagai Pembelajaran Pengurangan Risiko Bencana <i>Marjoko, Yayasan Pusaka Indonesia</i>	170 - 185
19	Analisis Penghidupan Berkelanjutan	186 - 190
20	Semangat Disabilitas Demi Menembus Batas Keterbatasan	191 - 195
21	Omo Hada Nias, Pilar-pilar Siaga Bencana	196 - 198
22	Mitigasi Melindungi Bentang Alam Karst Kendeng Utara "IBU BUMI"	199 - 202
23	Bersatu Padu Merangkul Gunung Merapi	204 - 207

1

KETANGGUHAN KOMUNITAS DALAM MENGHADAPI BENCANA BANJIR 2016 DI KOTA BIMA

OXFAM DI INDONESIA DAN LP2DER BIMA

Kota Bima yang Bertambah Tangguh Setelah Banjir 2016

Bencana alam tak bisa diprediksi secara pasti kapan akan terjadi, namun dampaknya bisa diminimalkan dengan membangun kesiapsiagaan. Melalui mitigasi yang melibatkan masyarakat dari hulu hingga hilir, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat terbukti bisa menghadapi banjir besar pada 2016 tanpa korban jiwa. Setelah banjir itu, kini mereka menjadi lebih tangguh lagi dengan berbagai strategi mitigasi dan adaptasi.

A. Kesuksesan Mengatasi Banjir 2016

Rohana (55 tahun), tidak pernah menyangka akan mengalami banjir yang sedemikian besar sepanjang hidupnya. Tempat tinggalnya di Lingkungan Pelita, Kelurahan Jatiwangi, Kota Bima, tenggelam hingga lebih dari dua meter. "Seperti tsunami saja," kata perempuan yang telah tinggal di Lingkungan Pelita sejak 1993. "Memang tahun 1996 dan 2006, lingkungan kami juga kebanjiran, tapi tidak sebesar tahun 2016. Airnya pun datang cepat."¹

Banjir yang terjadi pada tanggal 21 dan 23 Desember 2016 itu melanda nyaris seluruh Kota Bima. Data dari Pemerintah Kota Bima, sebanyak 34 dari 38 kelurahan di 5 kecamatan terendam banjir. Jumlah penduduk yang terdampak mencapai

¹ Berdasarkan wawancara di Bima, 21 Juli 2018

105.797 jiwa atau 26.256 KK. Banjir ini juga menyebabkan listrik padam selama empat hari karena 21 gardu terendam air. Selain itu fasilitas air bersih PDAM rusak di 7 titik, dan jalur komunikasi terputus total.

Banjir ini dipicu oleh tingginya curah hujan, selain degradasi hutan terutama di kawasan hulu. Apalagi, Kota Bima ibarat mangkuk raksasa yang dikelilingi oleh perbukitan dengan sungai-sungai yang bermuara di kota pesisir ini. Catatan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), curah hujan di Kota Bima pada 21 Desember 2016 mencapai 208 milimeter (mm) per hari, merupakan yang tertinggi dalam sejarah kota ini. Badai tropis Yvette yang terbentuk di Samudera Hindia di sebelah selatan Kota Bima berkontribusi memperkuat curah hujan ini.²

No	Tahun Program	Lk	Pr	Jlh
1	2012 - 2014	593	535	1128
2	2015 - 2016	179	256	435
3	2017 - 2018	434	98	532

*Selama berproses LP2DER berupaya melibatkan teman-teman penyandang disabilitas, tetapi dalam praktiknya masih tidak mudah dilakukan

Di Lingkungan Pelita, air deras datang dari ujung lorong dengan cepat. Jalan keluar satu-satunya hanya melalui tembok Kantor Bulog Kota Bima. Beruntung, anak lelaki Rohana, Nanang Suryanto (27 tahun), bersama anak-anak muda lain sigap membantu orang tua dan anak-anak mengungsi dengan menaiki tangga melewati tembok Kantor Bulog itu.

"Anak-anak dan orang tua digendong melalui tembok dengan berpegangan tali. Kami kemudian diungsikan ke markas Kompi yang lebih tinggi. Kalau mengingat kondisi banjir saat itu, masih tidak percaya semua bisa selamat," ujar Rohana.

Kesigapan anak-anak muda yang tergabung dalam Tim Siaga Bencana Kelurahan (TSBK) menjadi tulang punggung evakuasi banjir yang melanda Kota Bima.

² Lihat koran *Kompas*, 23 Desember 2016, halaman 1



Anggota TSBK Jatiwangi menunjukkan ketinggian air di Lingkungan Pelita saat banjir besar melanda pada Desember 2016 lalu. (Foto: Ahmad Arif untuk Oxfam di Indonesia)

Nanang Suryanto merupakan Koordinator TSBK Kelurahan Jatiwangi, salah satu dari enam TSBK awal yang dibentuk Oxfam Indonesia bersama mitra lokalnya, Lembaga Pengembangan Partisipasi Demokrasi dan Ekonomi Rakyat (LP2DER). "Relawan di TSBK telah dibekali kemampuan teknik penyelamatan sehingga saat banjir bisa melakukan evakuasi mandiri," kata Nanang.³

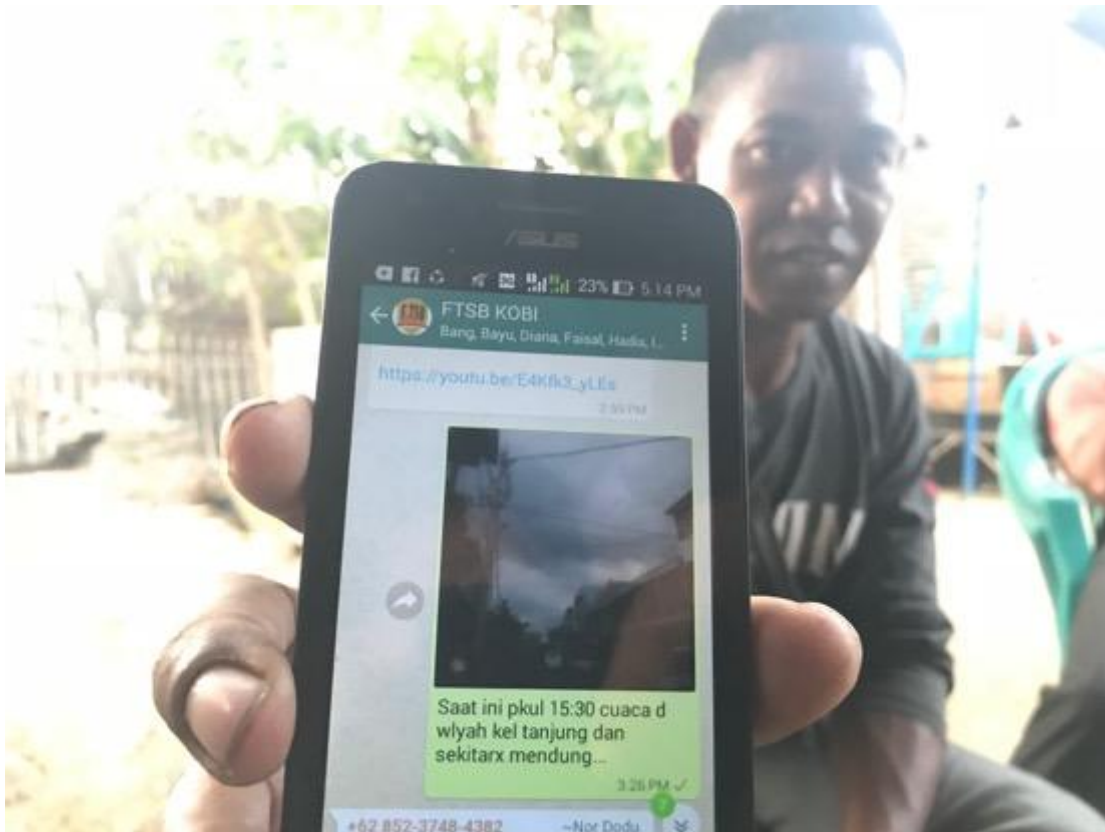
Selain teknik penyelamatan, menurut Nanang, para anggota TSBK juga saling terhubung dengan TSBK di desa lain melalui pesawat Handy Talky (HT). Melalui HT inilah TSBK di kawasan hilir seperti Kelurahan Jatiwangi mendapatkan peringatan banjir dari TSBK di kawasan hulu. "Awalnya dulu bertanya-tanya saat diberi HT oleh Oxfam. Di zaman sekarang ketika semua orang sudah memakai HP (telepon genggam), apa HT masih berguna. Ternyata saat banjir, hanya HT yang masih bisa jalan sedangkan sinyal HP mati karena listrik juga padam," kata Nanang.

³ Ibid



Ketua FTSBK Bobby Hermansyah (kiri) dan Sekretaris TSBK Nungga, Julkifli (kanan) di depan peta kontijensi banjir di Kelurahan Nungga. TSBK Nungga berada di hulu sungai dan berperan penting memberi informasi dini tentang banjir ke Kota Bima. (Foto: Ahmad Arif untuk Oxfam di Indonesia)

Informasi awal tentang banjir pertama pada tanggal 21 Desember 2016 itu, diterima Nanang dari teman-teman TSBK di hulu sekitar pukul 11.00 WITA. Anggota TSBK Jati Baru, melalui HT mengabarkan bahwa air sungai mengeruh dan mulai naik, sementara hujan lebat masih terus terjadi. Mereka juga terus mendapatkan informasi dari para anggota TSBK lain di daerah hulu melalui grup diskusi *whatsapp* (WA). Koordinasi juga dilakukan dengan para anggota dan pimpinan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang terhubung langsung dengan grup WA dengan para TSBK.



Ketua TSBK Tanjung Mahyudin menunjukkan pesan di grup whatsapp yang memperingatkan ketinggian air dari relawan TSBK lain. Relasi TSBK di hulu dan hilir menjadi kunci ketangguhan Kota Bima menghadapi banjir 2016 lalu. (Foto: Ahmad Arif untuk Oxfam di Indonesia)

Nanang dan para anggota TSBK Jatiwangi kemudian keliling ke kampung-kampung dengan pengeras suara dan mengumumkan agar warga bersiap mengungsi dan diarahkan ke Kompi Senapan A Yonif 742 Bima. Benar saja, sekitar dua jam sejak peringatan dikeluarkan, banjir mulai melanda. Ketika air mulai meninggi, anggota TSBK Jatiwangi membimbing warga ke lokasi pengungsian. "Ada juga warga yang bertahan, mungkin tidak mengira banjir akan sedemikian tinggi. Kami kemudian bekerja sama dengan TNI menjemput mereka. Hampir 30 orang berhasil kami amankan dari Lingkungan Pelita. Kami bawa mereka naik ke tembok Bulog lalu ke Kompi," kata dia.

Nanang mengatakan, saat banjir terjadi pada tahun 2006, satu orang warga Kelurahan Jatiwangi meninggal dunia. "Kejadian itu menjadi salah satu motivasi untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Kami tidak ingin terulang jatuh korban," kata

Nanang, yang juga berprofesi sebagai tenaga honorer Tata Usaha di Sekolah Menengah Umum Negeri (SMUN) 2 Kota Bima.⁴



Mobil-mobil rusak di tepi jalan di Kelurahan Tanjung, yang menjadi saksi dahsyatnya banjir yang melanda Kota Bima pada 2016 lalu. (Foto: Ahmad Arif untuk Oxfam di Indonesia)

Menurut dia, Kelurahan Jatiwangi sudah memiliki jalur evakuasi yang disosialisasikan ke masyarakat jauh hari sebelumnya. Disepakati zona aman jika terjadi banjir, yaitu di Kompi Militer, yang lokasinya lebih tinggi. "Kemaren juga kami bawa pengungsi ke sana. Di sana sudah ada fasilitas umum. Mereka juga siap," kata dia.

Saat banjir kedua terjadi pada 23 Desember 2016, proses evakuasi berlangsung lebih cepat. Begitu warga mendapatkan informasi bahwa banjir akan datang lagi, mereka bergegas mengungsi. "Sejam sebelum banjir kedua itu datang, kampung-kampung sudah kosong. Kami evakuasi lagi ke Kompi sekitar 1.000 orang pengungsi, namun ternyata banjir lebih tinggi dari sebelumnya. Di lokasi pengungsian di Kompi tinggi air sampai lutut dan lajunya deras. Itu belum pernah

⁴ Berdasarkan wawancara di Bima, 21 Juli 2018

terjadi. Untungnya ada teman-teman TSBK dari kelurahan lain yang bawa mobil, akhirnya lansia diangkut ke titik kumpul beberapa kelurahan lain," kata dia.

Menurut Nanang, jika mereka tidak bersiap sejak jauh hari, banjir pada 2016 lalu kemungkinan akan menelan banyak korban. "Anggota TSBK Jatiwangi memang hanya 20 orang dan tidak semuanya aktif. Namun, saat banjir semua terpanggil karena semuanya sudah pernah dilatih, tanpa dihubungi langsung bergerak. Di tiap RT juga sudah ada perwakilan," kata dia.

Kesigapan dan peran aktif para relawan TSBK saat banjir 2016 ini bisa ditemui di setiap wilayah Kota Bima. Koordinator Penggalangan Dana dan Distribusi Bantuan TSBK Serai, Khadafi mengatakan, begitu mendapat informasi hujan deras dan air sungai meninggi di daerah hulu, para relawan TSBK Serai langsung mengumumkan di masjid-masjid melalui pengeras suara bahwa banjir akan datang dengan ketinggian lebih dari satu meter.

"Begitu diumumkan, masyarakat menuju ke jalur pengungsian yang sudah disiapkan. Ada dua cara evakuasi. Ada yang evakuasi mandiri. Ada juga yang kita jemput. Kebetulan saat itu masa libur sekolah sehingga anak-anak tidak kemana-mana. Tidak ribet mengungsikannya," kata Khadafi.⁵

Peran Penting TSBK

Banjir pada penghujung 2016 itu merupakan ujian pertama dari pembentukan TSBK yang merupakan bagian dari pembangunan dan penguatan ketangguhan Kota Bima dalam menghadapi bencana yang dirintis Oxfam di Indonesia bersama LP2DER sejak penghujung 2012. Program yang didanai Australia-Indonesia Facility for Disaster Reduction (AIFDR) dan Uni Eropa ini awalnya dilakukan di enam kelurahan terpilih, yang merepresentasikan daerah di hulu dan hilir, dari 38 kelurahan di Kota Bima. Keenam kelurahan itu yaitu Nungga, Kendo, Ntobo, Kolo, Tanjung, dan Jatiwangi. Kelurahan Nungga, Kendo, Ntobo berada di daerah hulu, sedangkan Kolo, Tanjung, dan Jatiwangi di daerah hilir.

⁵ Ibid

Di tiap kelurahan ini kemudian dibentuk TSBK yang beranggotakan 20 - 30 orang. Mereka dilatih sebagai relawan saat menghadapi bencana. "Setiap relawan TSBK digembleng secara fisik maupun mental. Mereka dilatih keterampilan dasar untuk memberikan pertolongan dan membantu evakuasi jika terjadi bencana, tetapi yang paling penting mereka juga ditempa komitmen dan jiwa relawannya. Kami melibatkan anggota SAR dalam pelatihan," kata Direktur LP2DER Bambang Yusuf.⁶

Tak hanya dibekali keterampilan penyelamatan dan evakuasi saat darurat, para relawan ini juga dikenalkan dengan kegiatan mitigasi bencana. Mereka dibekali kemampuan untuk memetakan kerentanan kelurahan mereka, menyusun rencana tanggap darurat, hingga mengajak masyarakat luas untuk memahami pentingnya membangun ketangguhan menghadapi bencana. Beberapa kegiatan mereka di antaranya membersihkan sungai dan lingkungan. "Sebagian besar relawan ini adalah anak-anak muda, lelaki dan perempuan yang punya profesi seperti guru hingga bidan. Mereka disiapkan menjadi pelopor ketangguhan masyarakat Kota Bima menghadapi bencana, baik saat kejadian, sebelum, maupun sesudahnya," kata Bambang.

Kegiatan yang semula dilakukan di level kelurahan ini kemudian menarik perhatian Pemerintah Kota Bima, bahkan kemudian menjadi pemantik bagi penguatan kesiapsiagaan dalam skala kota. "Saat pertama jadi walikota, kami belum paham mengenai ketangguhan bencana. Hingga suatu hari, awal 2013, datang orang Oxfam ke kantor, menyampaikan sedang mendampingi warga untuk antisipasi banjir. Saat itu warga sedang membersihkan sungai dan butuh dukungan alat berat dari pemerintah. Sebagai kepala daerah, saya merasa terpukul. Kenapa orang luar yang peduli dengan daerah yang saya pimpin," kata Walikota Bima, Qurais H. Abidin.⁷

Walikota Qurais kemudian datang sendiri ke Kelurahan Jatiwangi, yang saat itu sedang mengeruk sungai yang mendangkal dengan membawa alat-alat berat. "Saya

⁶ Berdasarkan wawancara di Bima, 22 Juli 2018

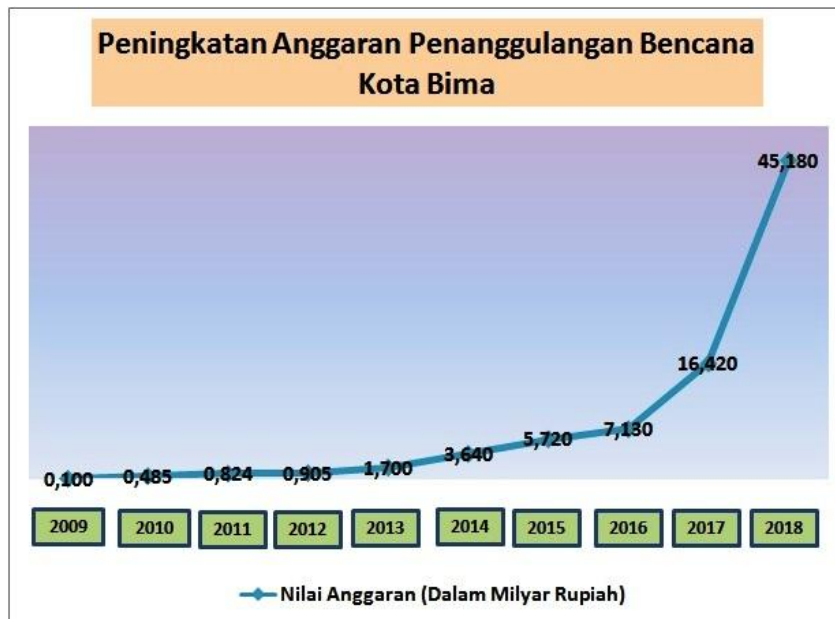
⁷ Berdasarkan wawancara di Bima, 21 Juli 2018

melihat sendiri semangat masyarakat menyiapkan diri menghadapi bencana, di sana sudah dibuat titik kumpul dan jalur evakuasi jika terjadi banjir. Saya langsung terpikir untuk mengadopsi ide dan program ini di seluruh Kota Bima. Sejak itu pula saya banyak belajar tentang bencana," kata dia.

Maka, ketika Oxfam Indonesia dan LP2DER melalui Forum Pengurangan Risiko Bencana Kota Bima mengusulkan penyusunan peraturan daerah tentang penanggulangan bencana, Qurais segera menyambutnya. Dia semakin menyadari pentingnya penguatan kapasitas menghadapi bencana. Untuk itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) perlu diperkuat, termasuk juga dukungan anggaran kebencanaan. Akhirnya, Pemerintah Kota Bima kemudian menerbitkan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Salah satu terobosan penting dari Perda ini terdapat dalam Pasal 63 yang menyebutkan, "Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran Penanggulangan Bencana minimal 1 % dari belanja langsung APBD."

Dengan kepastian anggaran ini, BPBD Kota Bima terus memperkuat kapasitas kesiapsiagaan masyarakat. "Tahun lalu kami mendapatkan anggaran bencana dari APBD Rp 6 miliar. Sebanyak 60 persen kita gunakan untuk prabencana, misalnya fasilitasi pembentukan kelurahan tangguh, pelatihan relawan, penguatan koordinasi dengan BPBD, termasuk juga penguatan sekolah aman," kata Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Bima, Ikhsan.

Data dari Walikota Bima, Qurais, porsi anggaran pada APBD Kota Bima untuk BPBD meningkat signifikan. Jika pada tahun 2009 sebesar Rp 100 juta, pada tahun 2018 menjadi Rp 45,18 miliar. Sedangkan dana tak terduga yang disiapkan dalam APBD Kota Bima setiap tahun rata-rata sebesar Rp 12 miliar. Dana ini terutama dapat digunakan untuk kebutuhan Penanggulangan Bencana.



Sumber: Presentasi Walikota Bima M Qurais H. Abidin, 2018

Dengan dukungan kuat dari Pemerintah Daerah, program TSBK pun diadopsi dan direplika di kelurahan-kelurahan lain. Kepala BPBD Kota Bima Syarafudin mengatakan, dari awalnya enam TSBK yang dirintis Oxfam, kemudian dikembangkan hingga menjadi 32 kelurahan. Tahun ini, seluruh kelurahan di Kota Bima yang mencapai 38 kelurahan ditargetkan sudah memiliki TSBK.

"Kami terus mengawal dan dilibatkan dalam pembentukan TSBK di Kota Bima. Selain memastikan agar semangat pembentukan TSBK masih sama, juga agar mudah terintegrasi dengan enam TSBK yang kami rintis di awal," kata Manajer Program LP2DER M Yamin.⁸

Walikota Qurais mengakui, para relawan dari TSBK telah berperan sangat penting selama penanggulangan banjir 2016. "Ketika terjadi banjir, masyarakat telah siap karena sudah diperingatkan oleh relawan-relawan TSBK. Bahkan, sebagian sudah diungsikan. Artinya pendidikan kesiapsiagaan berjalan. Kalau itu tidak berjalan, sudah pasti banyak yang meninggal," kata dia.

⁸ Ibid

Selain berperan penting dalam penanggulangan banjir 2016, relawan-relawan TSBK Kota Bima juga berperan dalam berbagai kejadian bencana di daerah lain. "Relawan TSBK Kota Bima pernah membantu hingga Dompu dan Sumbawa, saat banjir bahkan Lombok saat banjir tahun 2017. Mereka mengumpulkan bantuan sendiri dan kemudian mengirimkannya. Kami di BPBD biasanya memfasilitasi untuk transportasinya," kata Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Bima Ikhsan.⁹

infografik

Dampak Program

- Pemerintah melalui BPBD melakukan replikasi program kelurahan tangguh sisa program sejumlah 32 kelurahan
- Tren peningkatan anggaran BPBD
- Program Penanggulangan Bencana masuk dalam RPJMD Kota Bima tahun 2013 - 2018
- Kota Bima melalui studi kasus banjir tanggal 21 dan 23 Desember tahun 2016 tidak ada korban jiwa
- Untuk konteks konflik di daerah dengan terbentuknya Federasi Tim Siaga Bencana (FTSB) Kota Bima sebagai pemersatu Tim Siaga Bencana (TSBK) di masing-masing kelurahan mulai terbentuk tahun 2014
- Konflik horisontal antar warga berkurang secara signifikan.

Ketua TSBK Tanjung Mahyudin dan anggotanya, Faisal, mengatakan, hampir di setiap kejadian bencana mereka selalu dilibatkan oleh Tim SAR Kota Bima untuk turut membantu evakuasi dan pencarian korban." Tahun lalu ada 50 relawan TSBK yang mendapat penghargaan dari SAR Jakarta karena dianggap berjasa turut membantu dalam setiap kejadian bencana. Kami berdua termasuk yang dapat penghargaan itu," kata Faisal.¹⁰

⁹ Berdasarkan wawancara di Bima, 21 Juli 2018

¹⁰ Berdasarkan wawancara di Bima, 22 Juli 2018

"Bagi kami, evakuasi korban dan penanggulangan bencana sudah menjadi panggilan, sekalipun kami tidak dibayar. Dari 20 orang anggota TSBK Tanjung, 15 di antaranya masih aktif. Lima lainnya, walaupun sudah punya kesibukan masing-masing, tetapi saya yakin jika terjadi bencana siap di depan juga," kata Mahyudin.

Sebagai wujud dari jiwa kerelawanan mereka, menurut Mahyudin, para relawan TSBK di Tanjung ini bahkan merogoh kocek sendiri untuk membeli tiga pesawat HT tambahan, selain satu HT bantuan dari program Oxfam-Indonesia. Tak hanya di Tanjung, pengadaan HT dan peralatan kebencanaan lainnya secara swadaya juga banyak dilakukan para TSBK di kelurahan lain.

Relasi Hulu-Hilir

Untuk membangun jejaring relawan antar kelurahan kemudian dibentuk Federasi TSBK (FTSBK) Kota Bima. Ketua FTSBK Bobby Hermansyah mengatakan, Federasi telah menjadi wadah komunikasi yang menjamin berjalannya sistem ketangguhan bencana berbasis komunitas dari hulu hingga hilir. "Hubungan antar desa terbangun baik karena ada wadah Federasi ini sehingga para relawan di Kota Bima menjadi satu keluarga besar. Tidak hanya menjadi forum diskusi soal kebencanaan, Federasi juga sudah menjadi wadah untuk menjembatani persoalan dan konflik sosial yang dulu sering terjadi antar desa. Bahkan, Federasi juga menjadi ajang jodoh bagi relawan dan keluarganya," kata dia.¹¹

Manfaat FTSBK ini dirasakan oleh Koordinator Penggalangan Dana dan Distribusi Bantuan TSBK Serai, Khadafi. "Kalau ada konflik antar kelurahan menyelesaikannya lebih mudah karena adanya FTSBK. Bisa dibilang, konflik sosial di Kota Bima sekarang sudah berkurang 70 persen. Dulu tiap tahun biasa terjadi tawuran, sering ada korban, tapi sekarang jarang. Dulu bencana di Bima hanya dua, kalau nggak konflik ya banjir, dan keduanya Alhamdulillah bisa diredam dengan FTSBK ini," kata Koordinator Penggalangan Dana dan Distribusi Bantuan TSBK Serai, Khadafi.

Koordinator TSBK Kelurahan Melayu, Andika mengatakan, jalinan relasi dan

¹¹ Ibid

komunikasi yang baik antar TSBK Kota Bima, terutama antara TSBK di kawasan hulu dan hilir, menjadi kunci penting kesuksesan penanggulangan bencana banjir pada tahun 2016. "Tanpa ada informasi awal dari teman-teman TSBK di hulu, wilayah kami yang di muara dekat pantai ini pasti akan terlambat mengungsi. Waktu dan informasi menjadi sangat penting dalam evakuasi banjir," kata dia.

Bendahara TSBK Kelurahan Melayu, Dara menambahkan, informasi tentang ketinggian air terus diinformasikan oleh relawan-relawan TSBK di kelurahan lain di bagian hulu sekitar tiga jam sebelum kejadian, termasuk juga di wilayah yang lebih dulu kebanjiran seperti Jatiwangi. "Kami gunakan corong mesjid agar warga segera evakuasi secara pribadi dan kelompok. Sehingga saat banjir datang, hampir semua penduduk di Kelurahan Kampung Melayu sudah dievakuasi ke tempat aman," kata perempuan yang berprofesi sebagai bidan ini.

Tanggung jawab untuk berbagi informasi tentang ketinggian air dan risiko banjir ini telah tertanam kuat di kalangan TSBK, terutama mereka yang tinggal di kawasan hulu. Sekalipun mereka relatif aman dari bencana banjir, namun para relawan di bagian hulu menyadari bahwa informasi dari mereka sangat dibutuhkan oleh rekan-rekan mereka di bagian hilir.

Anggota TSBK Kelurahan Ntopo, Astuti mengatakan, begitu langit mendung biasanya sudah mulai waspada. Dan ketika hujan deras terjadi, dia akan selalu memantau sungai yang jaraknya sekitar 50 meter dari rumahnya. Astuti sadar bahwa informasi kondisi hujan dan ketinggian air sungai dari daerahnya yang berada di hulu sungai sangat dibutuhkan rekan-rekannya di hilir.

"Saya memegang HT bantuan Oxfam sejak 2014, jadi harus bertanggungjawab menginformasikan ke hilir. Selain itu, untuk warga Ntopo sendiri, kalau ada hujan deras dan potensi banjir kami umumkan lewat pengeras suara di masjid. Ada juga yang keliling memberikan informasi untuk siap evakuasi. Di kelurahan kami sudah ada rencana kontijensinya," ujar Astuti.¹²

¹² Ibid



Anggota TSBK Kelurahan Ntopo, Astuti selalu bersiaga dengan pesawat HT untuk menginformasikan kondisi sungadi di daerah hulu. (Foto: Ahmad Arif untuk Oxfam di Indonesia)

B. Belajar dari Banjir 2016

Mengurangi Risiko

Telah disadari bahwa bentang alam Kota Bima memang sangat rentan terdampak banjir. Dari aspek geografis, 60 persen wilayah kota ini terdiri dari perbukitan yang mengelilingi wilayah pemukiman. Dua sungai besar, yaitu Sungai Padolo dan Sungai Melayu, melintasi permukiman ini. Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Kota Bima memiliki risiko tinggi untuk bencana banjir. Disebutkan, jumlah penduduk Kota Bima yang rentan terdampak banjir dengan skala rendah sebesar 46.750 jiwa, skala sedang 67.171 jiwa, dan tinggi 965 jiwa.

Menurut Qurais, kerentanan banjir di Kota Bima bertambah tinggi karena belum semua pihak memahami paradigma penanggulangan bencana. Selain itu, budaya sebagian masyarakat masih begitu kental dengan kebiasaan *ngoho* atau memabat hutan dan membuang sampah di sungai dan saluran air lain. Di sisi lain, banyak warga bermukim di bantaran sungai yang membuat mereka sangat rentan terdampak banjir lagi di masa depan. Dari aspek klimatis, kerentanan banjir di

Kota Bima juga meningkat seiring terjadinya perubahan iklim yang menambah peluang intensitas terjadinya cuaca ekstrem di Indonesia.

Sebelum kejadian banjir pada Desember 2016 itu, sebenarnya OXFAM Indonesia, dengan didukung PIAREA telah dilakukan kajian proyeksi iklim Kota Bima untuk melihat potensi risiko banjir. Kesimpulan yang dapat di tarik bahwa berdasarkan hasil modeling proyeksi iklim 2050 adalah terdapat potensi kenaikan curah hujan dan potensi kejadian iklim ekstrem di masa mendatang sehingga bisa meningkatkan risiko banjir. Selain itu juga disimpulkan, adanya perubahan puncak hujan yaitu pada periode Desember - Januari.

Dari aspek meteorologis, banjir yang melanda Kota Bima 2016 lalu j tidak lepas dari menguatnya siklon tropis Yvette di Samudra Hindia. Walaupun Indonesia relatif aman dari dampak langsung siklon tropis karena rute edarnya menjauhi khatulistiwa, namun dampak tak langsung berupa cuaca buruk kian serius. Beberapa peneliti, seperti Emanuel (2005), mendokumentasikan bukti data observasi bahwa daya kuat badai tropis meningkat. Itu ditunjukkan oleh integral kolom kecepatan angin terhadap waktu saat melintasi daerah Samudra Pasifik Barat dan Atlantik terentang 50 tahun terakhir. Sementara itu, kajian peneliti BMKG, Siswanto (2015) menemukan, perubahan iklim itu yang diduga memengaruhi berkurangnya jumlah hari hujan di Indonesia pada periode 1866-2010. Namun, proporsi curah hujan ekstrem melebihi 50 mm per hari terhadap total hujan tahunan naik signifikan.¹³

Melihat tingginya risiko banjir ke depan, pemerintah Kota Bima telah memprioritaskan pengurangan risiko bencana banjir. Oleh karena itu, mereka antusias mendukung Program Pengurangan Risiko Banjir Bandang Kota Bima 2026, melalui Proyek Pengelolaan DAS Sari Berbasis Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim yang digagas Oxfam Indonesia bersama mitra lokalnya, LP2DER. Oxfam dan LP2DER kemudian mempertemukan Pemerintah Kota Bima dengan Pemerintah Kabupaten Bima melalui dinas terkait untuk mendiskusikan tentang pengelolaan

¹³ Lihat harian Kompas, Sabtu, 24 Dec 2016, hal 6.

bersama DAS Sari.

LP2DER sebagai pelaksana di lapangan mengawalinya melalui lokakarya dan workshop tentang pengelolaan DAS untuk mencari model bersama dengan mengundang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait seperti Kesatuan Pengelolaan Hutan, BPBD, Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Tanaman Pangan dan Badan Meterologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Workshop kemudian ditindaklanjuti OPD terkait dengan menyusun dokumen rencana aksi bersama pengelolaan DAS Sari. Harapan berbagai program di tiap OPD dapat diintegrasikan dalam dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Daerah.

Melalui serangkaian pertemuan, kemudian dihasilkan draft dokumen rencana aksi bersama yang segera ditindaklanjuti dengan draft MoU bersama Pemerintah Kota Bima dan Pemerintah Kabupaten Bima tentang Pengelolaan DAS. Oleh Badan Pengelola DAS Provinsi, kemudian dibentuk tim kecil yang melibatkan LP2DER dan OPD terkait untuk memonitor dan mengevaluasi pengelolaan DAS. Sementara itu, di tingkat komunitas program ini berhasil membentuk dua kelompok pengelola DAS yang dilegalkan melalui Surat Keputusan Kelurahan

Menurut M Yamin, MoU antara Pemerintah Kota Bima dan Pemerintah Kabupaten Bima sebenarnya sudah jadi dan tinggal menunggu ditandatangani. Namun demikian, Qurais keburu mengakhiri masa jabatannya, sehingga sekarang harus menunggu Walikota Bima yang baru. "Tapi kami optimis Walikota yang baru juga akan mendukung hal ini karena dari dulu, sejak masih di DPRD, dia ikut mendukung penanggulangan banjir di Kota Bima," kata dia.

Selain draft MoU yang diinisiasi ini, sejumlah kegiatan telah dilakukan untuk mengantisipasi banjir ke depan. Selain penguatan koordinasi ini, pemerintah juga membangun sejumlah infrastruktur. "Setelah banjir 2016 lalu, telah muncul kesadaran tentang pentingnya pencegahan. Beberapa upaya telah dilakukan," kata Qurais.

Menurut Qurais, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah mengalokasikan anggaran Rp 167 miliar untuk merelokasi rumah dan jembatan

yang rentan bencana banjir. Selain itu, sejumlah aliran sungai yang berliku direncanakan untuk diluruskan. Pemerintah Kota Bima juga sudah menandatangani kerjasama dengan pihak Jepang untuk pelebaran sungai dengan nilai proyek sekitar R 350 miliar. "Untuk relokasi, saat ini sedang jalan. Secara administratif sudah selesai. Saya ingin relokasi itu berhasil, agar Bima ke depannya tidak kena bencana lagi. Pemerintah Daerah sudah membebaskan lahan seluas 12 ha untuk 1.200 rumah. Selain itu, penghijauan di kawasan hulu juga sudah dianggarkan dan sudah mulai dilaksanakan oleh pemerintah provinsi," kata dia.

Qurais yang habis masa jabatannya tahun 2018 ini berharap, segenap upaya yang telah dilakukan untuk menjadikan Kota Bima tangguh bencana bisa diteruskan oleh penggantinya. "Kota Bima telah menjadi percontohan daerah lain dengan mengalokasikan 1 % anggaran daerah untuk bencana. Tetapi, ke depan akan lebih baik lagi kalau anggaran bencana bisa ditambah lagi, minimal menjadi 1,5 %, bahkan idealnya 3 % dengan fokus lebih pada pencegahan," kata dia.

Dengan sejumlah pencapaian ini, BNPB telah menjadikan Kota Bima sebagai Model Kota Tangguh Bencana untuk Kota Kecil pada tahun 2015. Sementara itu, pada tahun 2016 nilai Indeks Kapasitas Daerah untuk Ketangguhan Kota, Kota Bima masuk kategori **SEDANG** dan Tahun 2017 kategori **TINGGI**. Penilaian Kapasitas Daerah untuk Ketangguhan Kota berdasarkan 7 Prioritas dan 71 indikator.

Selain pencapaian di tingkat kota itu, menurut Qurais, kerjasama dengan daerah lain, terutama dengan Kabupaten Bima, untuk penghijauan kawasan hulu harus diintensifkan. Sebagian kawasan hulu sungai yang airnya mengalir ke Kota Bima berada di wilayah kabupaten. Oleh karena itu, dia sangat berharap, Program Pengurangan Risiko Banjir Bandang Kota Bima 2026 dengan mengelola DAS Sari yang diinisiasi Oxfam Indonesia dan LP2DER setelah banjir 2016 bisa dilanjutkan. "Untuk di tingkat Kota Bima, saya kira sudah banyak kemajuan terkait penanggulangan bencana. Tetapi, kita butuh kerjasama dengan daerah lain. Pemerintah Provinsi diharapkan berperan untuk mengkoordinir kerjasama ini," kata dia.

Kepala BPBD Kota Bima Syarafudin optimis, berbagai program penanggulangan bencana yang dirintis oleh Pemerintah Kota Bima yang lama akan diteruskan oleh Walikota Bima yang baru terpilih. "Walikota yang baru terpilih dulu dari Komisi 8 DPRD Kota Bima yang mengurus bencana. Saya yakin dia sudah memiliki pemahaman tentang pentingnya soal penanggulangan bencana sehingga akan meneruskan yang sudah dirintis Walikota sebelumnya," kata dia.

Selain itu, sejumlah peraturan yang sudah dikeluarkan sebelumnya, akan mengikat pemerintahan yang baru untuk memprioritaskan penanggulangan bencana. "Program-program penanggulangan bencana yang saat ini sedang berjalan, seperti pengelolaan DAS tentu akan dilanjutkan," kata Syarafudin.

No.	Peraturan terkait Kebencanaan di Kota Bima
1.	Perwali Nomor 05 Tahun 2009 dan Rekomendasi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2355/SJ tanggal 1 Juli 2009 tentang Pembentukan BPBD Kota Bima
2.	Perda Kota Bima Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pembentukan BPBD Kota Bima
3.	RPJMD 2013-2018 Kota Bima, yang mengamanatkan pembentukan 38 Kelurahan Tangguh Bencana yang terinspirasi dari Pembentukan Kelurahan tangguh Oxfam di Kota Bima
4.	Perda Kota Bima Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, yang mengamanatkan Pengalokasian Anggaran Penanggulangan Bencana minimal 1 % dari belanja langsung APBD
5.	Perwali Kota Bima Nomor 47 Tahun 2015 tentang Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)
6.	Peraturan Walikota Bima Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pemanfaatan Dana Tak Terduga, yang mengamanatkan pemanfaatan dana tak terduga dengan perlakuan khusus
7.	Peraturan Walikota Bima Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengalokasian Anggaran Penanggulangan Bencana minimal 1 % dari belanja langsung APBD
8.	SK Walikota Bima Nomor 238 Tahun 2015 tentang pembentukan Forum PRB "Mbojo Matenggo" Kota Bima
9.	Perwali Kota Bima Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Peran Dunia Usaha dalam Penanggulangan Bencana.

Sumber: Materi presentasi Walikota Bima, M. Qurais H. Abidin, 2018

Mitigasi dan Adaptasi Warga

Tak hanya pemerintah yang terus meningkatkan kapasitasnya dalam menghadapi bencana, masyarakat Kota Bima juga terus menunjukkan perkembangan signifikan dalam hal ketangguhan menghadapi bencana. Sejumlah TSBK, terutama di daerah hulu, semakin aktif dalam berbagai kegiatan mitigasi. Selain penguatan kapasitas dalam penyebaran informasi peringatan dini banjir, mereka juga mulai menyadari pentingnya menjaga lingkungan di sepanjang DAS. Misalnya, TSBK Ntopo yang berupaya menggerakkan warganya untuk menghijaukan kawasan-kawasan perbukitan dengan tanaman keras. Anggota TSBK Ntopo, Astuti mengatakan, dia selalu mengajak warga agar tidak menebang pohon sembarangan. Bahkan, tahun 2017 lalu TSBK Ntopo melakukan program penanaman pohon bekerjasama dengan mahasiswa berbagai kampus dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima, serta sejumlah kelompok tani. "Kami sudah tanam bibit mahoni, jati, dan mangga sekitar 1.000 pohon," kata Astuti.

Namun upaya penghijauan perbukitan di kawasan hulu dengan tanaman keras ini, menurut Astuti, berhadapan dengan tren pembukaan lahan untuk tanaman jagung. Telah disadari bahwa, pembukaan lahan di kawasan hulu ini telah merusak daya resap DAS Sari sehingga patut diduga sebagai penyebab utama meningkatkannya kerentanan banjir di Kota Bima. "Banyak tanaman jati yang ditebangi dan diganti jagung. Ini tantangan ke depan, karena bagaimanapun masyarakat di sini membutuhkan pendapatan dan jagung dianggap menguntungkan," kata dia.

Oleh karena itu, menurut Astuti, mencari alternatif tanaman yang bisa memberi tambahan pemasukan masyarakat, tetapi yang tidak merusak daerah resapan di hulu menjadi penting. "Kami mengusulkan penanaman buah-buahan seperti mangga atau durian, sehingga selain baik untuk menyimpan tanah di daerah perbukitan juga bisa memberi pemasukan pada warga," kata dia.

Sementara itu, penduduk Kota Bima yang tinggal di kawasan hilir juga mulai menyadari pentingnya beradaptasi dengan banjir sewaktu-waktu yang bisa terjadi saat musim hujan. Sri Hartati, bendahara TSBK Kelurahan Melayu mengatakan, belajar dari banjir 2016, sebagian warga sudah meninggikan rumahnya. Hal ini

juga dilakukan Hartati, yang membangun rumah panggung. Untuk lantai pertama hanya untuk parkir, sedangkan seluruh aktivitas dilakukan di lantai dua. Berbagai barang rumah tangga, termasuk juga surat-surat penting juga telah disimpan dengan baik dan sewaktu-waktu bisa dibawa jika terjadi banjir.

"Sekarang rata-rata warga sudah menyiapkan tas kecil khusus yang berisi barang-barang berharga, ijazah, dan surat-surat penting. Kami sudah banyak belajar dari banjir 2016 lalu," kata Hartati.

Dengan mitigasi dan adaptasi terhadap banjir, ketangguhan masyarakat Kota Bima terus menguat. Mereka pun kini lebih bersiaga menghadapi bencana banjir ke depan, yang kembali datang seiring dengan perubahan iklim yang terus menguat.

2

KEMAMPUAN ADAPTASI PETANI DI FLORES TIMUR DALAM MENGHADAPI KETIDAKPASTIAN IKLIM YANG BERUBAH

OXFAM DI INDONESIA DAN YPPS FLORES TIMUR

Adaptasi Petani Flores Timur terhadap Iklim yang Berubah: Studi Kasus di Kimakamak

Sorgum, sumber pangan masyarakat Flores Timur di masa lalu ditinggalkan karena kebijakan pangan nasional yang memprioritaskan beras. Kini, ketika padi dan jagung kian sering gagal panen karena perubahan iklim, sorgum yang tahan kering bisa menjadi jawabannya.

Tantangan Iklim

Pulau Adonara di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, sejak lama dikenal sebagai salah satu daerah kering dengan musim hujan yang pendek. Namun belakangan, para petani di pulau kecil seluas 509 kilometer persegi ini merasa cuaca kian tidak bersahabat. Musim kemarau semakin panjang dan kering. Bencana angin kencang juga semakin sering terjadi.

Perubahan cuaca ini juga dikeluhkan Hendrikus Eko (51 tahun), petani sekaligus Kepala Desa Kimakamak, Kecamatan Adonara Barat. "Sudah tiga tahun terakhir kami sering gagal panen jagung dan padi karena kurang hujan. Begitu kami tanam, hujan tidak lagi turun sehingga banyak yang mati. Kalaupun bisa panen, hasilnya sangat kurang," kata dia.¹⁴

¹⁴ Berdasarkan wawancara di Kimakamak, 11 Juni 2018

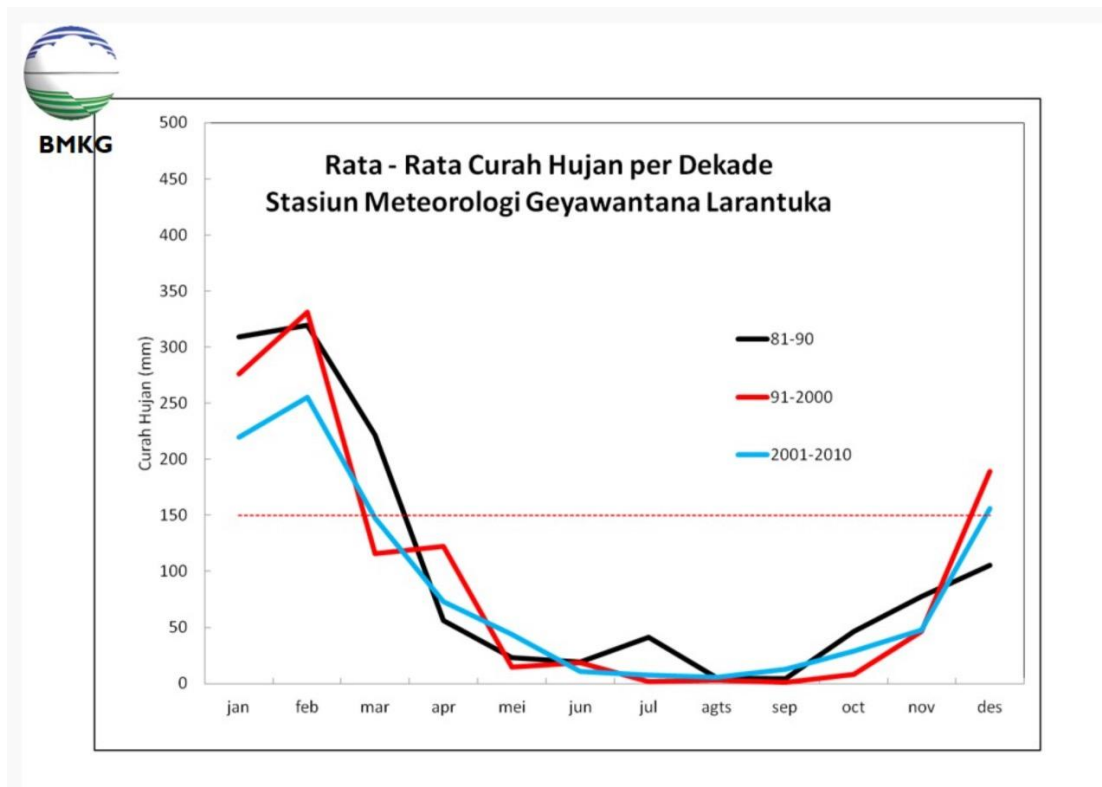
Mama Yustina Jari (42), petani perempuan dari Desa Kimakamak mengatakan, selain kurangnya hujan, ancaman lain yang kerap menggagalkan panen adalah angin kencang. "Tahun lalu, ketika sudah mau panen jagung tiba-tiba ada angin kencang yang membuat roboh tanaman," kata dia.¹⁵

Seperti perubahan pola hujan, angin kencang yang semakin sering dan semakin ekstrem merupakan salah satu penanda perubahan iklim. Kondisi ini tak hanya dirasakan petani Kimakamak, namun juga oleh mayoritas penduduk di Flores Timur. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), pola hujan di Flores Timur memang telah berubah. Menurut Kepala Subbidang Produksi Informasi Iklim dan Kualitas Udara BMKG Siswanto, "Data dari Stasiun Meteorologi di Larantuka (Flores Timur) menunjukkan, curah hujan sejak 1981 di Flores Timur memang semakin kecil. Perubahan pola hujan telah terjadi di seluruh Indonesia, dengan respon yang berbeda-beda di daerah. Ada yang semakin kering, namun ada juga yang lebih basah."¹⁶

Riset oleh peneliti Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Supari, menemukan bahwa curah hujan wilayah Indonesia di bagian utara garis khatulistiwa mengalami kenaikan, terutama Sumatera tengah dan utara, serta Kalimantan bagian timur. Sebaliknya, di wilayah Indonesia bagian selatan garis khatulistiwa, misalnya Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, curah hujan berkurang. Riset yang diterbitkan di jurnal *Climatology* 2016 ini memakai data iklim dari 88 stasiun BMKG di Indonesia. Dari kajian ini terlihat bahwa, daerah NTT, termasuk di dalamnya Flores Timur, berpotensi semakin kering.

¹⁵ Ibid

¹⁶ Berdasarkan wawancara di Jakarta, 18 Juni 2018



Gambar 1: Tren penurunan curah hujan di Larantuka
sumber: BMKG, 2018

Kajian terbaru dari NASA dan University of Maryland's Earth System Science Interdisciplinary Center (ESSIC) yang dipublikasikan di jurnal *Nature* pada 17 Mei 2018 menunjukkan bahwa perubahan pola cuaca ini dipicu oleh pemanasan global yang telah mengubah mekanisme dapur cuaca. Secara global terbukti bahwa kawasan yang sebelumnya banyak hujan menjadi semakin basah, sebaliknya daerah yang sebelumnya kering menjadi semakin kering. Kondisi ini membuat Lembaga Pangan Dunia (FAO) menyatakan, perubahan iklim telah menjadi tantangan pemenuhan pangan ke depan.

Kajian Yayasan Pengkajian dan Pengembangan Sosial (YPPS) tahun 2017 mengungkapkan, sebanyak 156 desa dari 250 desa di Kabupaten Flores Timur terpapar kekeringan setiap tahun dan berpotensi gagal panen. Merespons kondisi tersebut, OXFAM Indonesia bekerjasama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Flores Timur dan YPPS melakukan pemetaan risiko berbasis Sistem Informasi Geospasial (SIG) dengan pendekatan partisipatif. Kegiatan tersebut dilakukan dengan melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat untuk

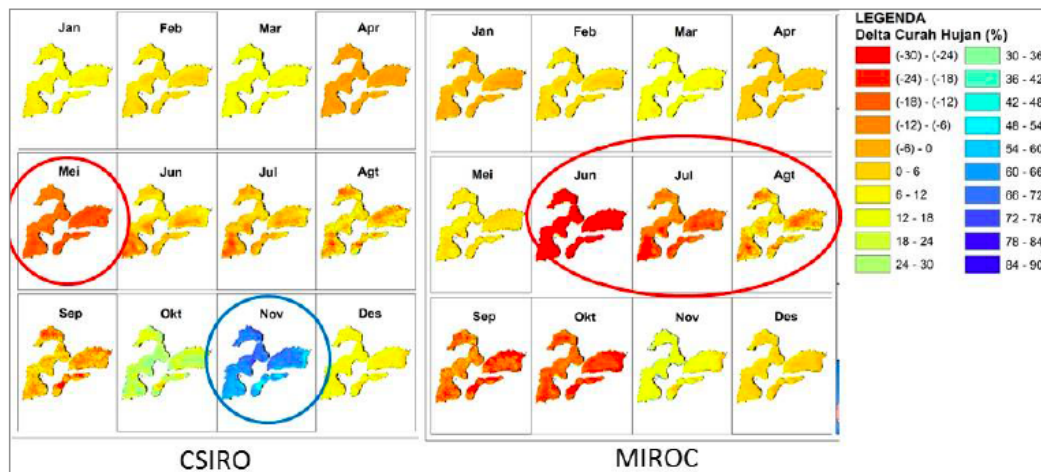
memetakan risiko bencana, khususnya potensi kekeringan di Kabupaten Flores Timur.¹⁷

Berdasarkan kajian ini, proyeksi penurunan curah hujan wilayah menurut model CSIRO¹⁸, pada musim kemarau dengan rata-rata nilai sejumlah 6% menunjukkan, adanya penurunan signifikan hingga 30% pada bulan Mei yang terjadi merata di seluruh wilayah. Untuk bulan lainnya sebarannya bervariasi tiap wilayah, namun pada umumnya penurunan curah hujan terjadi di wilayah dataran tinggi. Total curah hujan wilayah untuk bulan November, Desember, Januari, Februari hingga April diproyeksikan mengalami kenaikan, dengan perubahan curah hujan sebesar 6 - 18% untuk bulan Desember - April, sementara peningkatan curah hujan bulan November dapat mencapai 80%. Luaran model ini menunjukkan potensi pada bulan-bulan kering akan memiliki potensi lebih kering di masa mendatang dan pada musim hujan akan memiliki potensi lebih basah di masa mendatang, dengan potensi pergeseran awal musim hujan. Sedangkan analisis menggunakan data luaran model MIROC¹⁹ menunjukkan hasil yang berbeda dengan model CSIRO. Penurunan curah hujan terjadi pada bulan basah (Januari, Februari) dan bulan kering (Juni, Juli, Agustus), dengan penurunan curah hujan terjadi 30% di bulan Juni dan Juli sementara peningkatan curah hujan terjadi di bulan Maret, Mei dan November.

¹⁷ Perdinan, Adi R.F, Arini E.Y, Basit R.A, 2017. Penyusunan dan Pelatihan Informasi Proyeksi Perubahan Iklim, Studi Kasus: Kabupaten Flores Timur. OXFAM Project. Yayasan Pengkajian dan Pengembangan Sosial. Flores Timur

¹⁸ CSIRO, *Commonwealth Scientific and Industrial research Organisation*

¹⁹ MIROC-ESM, *Model for Interdisciplinary Research on Climate Earth System Model*



Gambar 8. Perubahan curah hujan bulanan diolah dari luaran model CSIRO (kiri) dan model MIROC (kanan) dengan periode 2021-2050 pada skenario emisi RCP4.5

sumber: Yayasan Pengkajian dan Pengembangan Sosial, 2017

Menuntut Adaptasi Baru

Perubahan iklim yang dipicu oleh pemanasan global ini telah menuntut perubahan dalam bertani. Riset terbaru yang dilakukan tim dari Universitas Aalto, Finlandia dan dipublikasikan di jurnal *Nature Communications* pada 28 Maret 2018 menunjukkan, siklus iklim berskala regional seperti El Nino memengaruhi dua pertiga hasil panen global. Disebutkan, dinamika iklim ini memiliki siklus dengan dampak beragam pada cuaca, sesuai fasenya. Menguatnya El Nino dan kebalikannya, La Nina, berdampak pada produksi jagung, kedelai, dan padi, yang ditanam di Asia Selatan, Asia Tenggara, Amerika Latin, dan bagian selatan Afrika. Sedangkan kajian Chuang Zhao dari Universitas Peking, China, dan tim yang dipublikasikan di jurnal *PNAS* (2017) menyebutkan, kenaikan suhu global 1 derajat celsius menurunkan produksi gandum 6 persen, padi 3,2 persen, jagung 7,4 persen, dan kedelai 3,1 persen.

Tanaman padi di Indonesia, tergolong paling rentan terdampak perubahan iklim ini. Berdasarkan kajian Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) bersama Kementerian Pertanian serta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang dirilis Januari 2018, dalam kurun waktu 20-50 tahun mendatang, diperkirakan akan terjadi penurunan produksi padi hingga 1,5 ton per hektar di

delapan provinsi penghasil utama di Indonesia.²⁰

Adaptasi dalam bercocok tanam karena perubahan iklim ini, termasuk di antaranya dalam memilih komoditas tanaman yang sesuai dengan kondisi lokal. Upaya untuk beradaptasi dengan perubahan iklim di Flores Timur ini sebenarnya mulai dirintis YPPS bersama Oxfam di Indonesia sejak tahun 2015 melalui program "Pengembangan Ketangguhan Mata Penghidupan". Menurut Direktur YPPS Melky Koli Baran, upaya ini dibagi dalam beberapa jenis, yaitu pertama bertani di musim kemarau dan mengembangkan pertanian adaptif.²¹

Sayur Organik di Pekarangan

Dari tahun 2015 dan 2016 YPPS dan Oxfam telah mendampingi para petani di desa-desa di Flores Timur untuk mengembangkan Permenan Agrikultur atau disingkat Permakultur. Implementasi Permakultur adalah dengan bertani sayur organik di pekarangan rumah dengan memanfaatkan lahan dan air yang terbatas. Hampir semua petani sayur yang didampingi adalah perempuan. Usaha budidaya mereka menjadi penopang ekonomi keluarga karena sering gagalnya hasil panen padi atau jagung ladang.

Monica Kelen (54 tahun), petani sayur dari Desa Lewolere, Kecamatan Larantuka, Flores Timur mengatakan, sebelum pendampingan dari YPPS mereka sebenarnya sudah menanam sayur. "Dulu kami hanya nanam bayam dan biasa pakai pupuk atau pestisida, namun setelah ada pendampingan sekarang jadi organik. Hasilnya lebih bagus dan tidak lagi perlu beli pupuk atau pestisida," kata dia.²²

Selain berubah menjadi organik, jenis sayur yang dibudidayakan para petani Desa Lewolere juga lebih variatif, mulai dari kacang panjang, tomat, hingga terung. Para petani ini juga mengembangkan bibit sendiri.

Maria Kerans (48), petani lain dari Desa Lewolere menambahkan, setelah tidak menggunakan pupuk kimia, kualitas tanah menjadi lebih baik. "Kalau dulu pakai

²⁰ Kompas, 26 Februari 2018

²¹ Berdasarkan wawancara dengan di Kimakamak, 12 Juni 2018

²² Berdasarkan wawancara dengan di Larantuka, 13 Juni 2018

pupuk kimia, tanah jadi keras dan sulit dicangkul. Sekarang lebih gembur sehingga gampang diolah," kata dia.

Selain dijual, sebagian sayur mayur itu dikonsumsi sendiri. Menurut dia, sayur yang ditanam secara organik kualitasnya lebih baik, tidak gampang busuk, dan lebih enak. "Kendalanya, kalau dijual di pasar, pembeli belum peduli apakah organik atau tidak. Harganya tetap sama, padahal sayur organik kualitasnya jauh lebih baik," kata dia.

Dari segi ekonomi, menurut Monica maupun Maria, budi daya sayur yang dikembangkan para perempuan ini bisa menambah penghasilan keluarga. Apalagi jagung dan padi ladang yang ditanam suami mereka semakin sering gagal panen karena cuaca yang semakin kering. Menurut Monica, sebanyak 13 perempuan petani sayur organik di Lewolere sekarang telah membentuk usaha simpan pinjam. "Simpanan anggota rata-rata sudah Rp 1 juta per orang. Rata-rata para anggota meminjam uang untuk membuat bak penampung air dan nanti membayarnya dicicil," kata dia.

Pertanian Adaptif Kekeringan

Bersama Forum Pengurangan Risiko Bencana Flores Timur, YPPS telah melakukan kajian terhadap kekeringan, untuk memahami karakter kekeringan serta durasi hujan dan hari-hari dengan hujan di kabupaten Flores Timur. Dari proses inilah, diketahui bahwa 156 desa dari 250 desa di kabupaten Flores Timur terpapar kekeringan setiap tahun.

Ketua Forum PRB Flores Timur, Bernard Tukan (59 tahun) mengatakan, kekeringan menjadi ancaman bencana terbesar di Flores Timur karena semakin sering terjadi, terutama pada tahun 2015 ketika El Nino melanda. "Kebutuhan untuk merespon kekeringan dirasa semakin besar dan bagaimana mengintegrasikannya dalam PRB (Pengurangan Risiko Bencana) di Flores Timur," kata dia.²³

Desa-desanya ini berpotensi gagal panen karena kekeringan, namun para petani rata-

²³ Berdasarkan wawancara dengan di Larantuka, 13 Juni 2018

rata belum memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan kondisi yang berubah ini. Mereka masih terpaku pada budidaya padi dan jagung. Menurut Bernard, selama ini upaya penanggulangan kekeringan oleh Pemerintah lebih banyak melalui pemberian bantuan bibit, khususnya padi dan jagung agar bisa menanam kembali. "Belum ada perubahan pola pikir pemerintah tentang pentingnya mencari jenis tanaman yang cocok dengan lahan kering di Flores Timur ini. Nah, upaya YPPS untuk mengembangkan pertanian adaptif ini menjadi sangat penting," kata dia.

Pemerintah Pusat sejauh ini memang masih berorientasi pada pengembangan budi daya padi dan jagung, dengan program pajale (padi, jagung, dan kedelai), termasuk di Flores Timur yang sesungguhnya defisit air. Misalnya, pada tahun 2018 ini, Kabupaten Flores Timur mendapatkan jatah proyek nasional pembukaan sawah baru sekitar 39,5 ha.

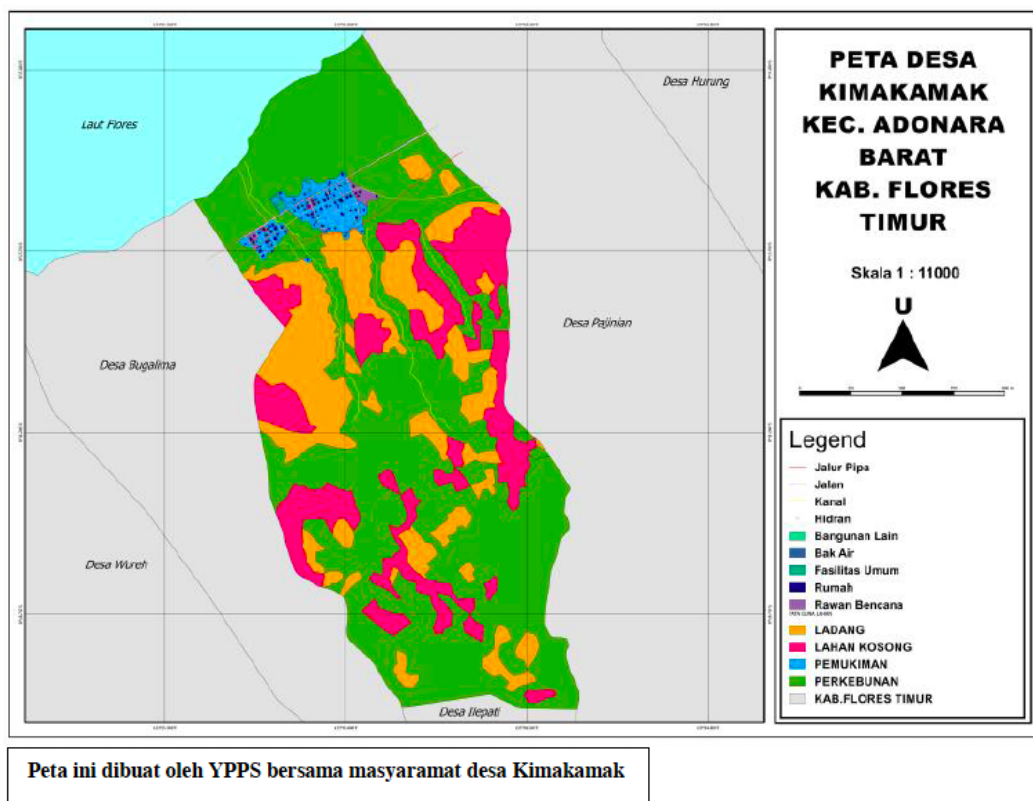
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Flores Timur Yosef Molan Tukan mengakui, pembukaan sawah baru bukanlah jawaban untuk pemenuhan kebutuhan pangan di daerah ini. Menurut dia, jika tidak ada terobosan budi daya tanaman lokal yang adaptif dengan kondisi iklim setempat, ketergantungan masyarakat terhadap beras yang harus didatangkan dari luar daerah akan terus meningkat. "Apalagi sekarang memang ada tren menurunnya debit air, baik karena kerusakan daerah tangkapan air ataupun karena faktor cuaca," kata dia.²⁴

YPPS berupaya mengembangkan model pertanian adaptif terhadap kekeringan ini dengan menerapkannya pada desa terpilih. Melalui serangkaian survei akhirnya dipilih Desa Kimakamak, Kecamatan Adonara Barat, Flores Timur. Desa ini dipilih dan disiapkan sebagai contoh pengembangan pertanian yang adaptif terhadap kekeringan sehingga bisa dipelajari atau ditiru desa-desa lain.

²⁴ Berdasarkan wawancara dengan di Kimakamak, 12 Juni 2018

Studi Kasus di Desa Kimakamak

Kimakamak merupakan salah satu desa yang menghadapi persoalan kekeringan setiap tahun. Seperti desa pesisir lainnya di Flores Timur, 466 jiwa (236 laki-laki dan 230 perempuan) atau 86 KK penduduk di Kimakamak bertani tadah hujan yang selalu kurang curah hujannya setiap tahun. Tanaman pangan utama di desa ini adalah jagung yang ditanam cuma sekali dalam setahun.



Dalam proses belajar pada alam, petani Kimakamak diajak menghitung intensitas hujan dengan usia tanaman pangan yang biasa ditanam. Mereka mulai menyadari bahwa dengan curah hujan yang kecil, ternyata jumlah hari-hari dengan hujan tidak mencukupi kebutuhan tanaman jagung dan padi ladang. Mereka sadar perlunya mengembangkan jenis tanaman pertanian atau tanaman pangan yang bisa beradaptasi dengan keterbatasan hujan ini. Dengan kata lain, perlu menanam jenis tanaman yang umurnya sesuai dengan curah hujan yang tersedia.²⁵

²⁵ Berdasarkan wawancara dengan di Kimakamak, 12 Juni 2018

Setelah melalui diskusi mendalam, ternyata para petani memiliki daftar berbagai jenis tanaman pangan yang mampu beradaptasi dengan kekeringan, namun tanaman tersebut umumnya telah lama ditinggalkan. Beberapa jenis tanaman itu di antaranya jagung kuning umur pendek, beberapa jenis padi ladang yang tahan terhadap kekeringan, jewawut, sorgum, kacang merah, kacang bengo, dan berbagai jenis kacang dan ubi-ubian.²⁶

Sorgum kemudian dipilih sebagai tanaman yang coba dikembangkan lebih dulu di laboratorium belajar Desa Kimakamak. Alasannya, tanaman ini di masa lalu pernah ditanam oleh orang tua mereka. Bahkan, sampai saat ini masih bisa ditemui sekalipun dianggap sebagai tanaman liar.

"Waktu kecil saya masih mengalami makan sorgum, selain juga jagung. Namun, sejak tahun tahun 1970-an mulai berkurang dan tahun 1980-an tidak ada lagi yang tanam sorgum. Masih ada sorgum liar, tetapi orang tidak makan lagi," kata Kepala Desa Kimakamak, Hendrikus Eko.²⁷

Menurut Hendrikus, hilangnya sorgum karena Orde Baru saat itu yang menggalakkan penanaman padi dan konsumsi beras. Masyarakat kemudian menanam padi ladang karena kondisi lahan yang kering. "Untuk mencukupi kebutuhan pangan, masyarakat harus beli beras dari luar," kata dia.

Alasan lain memilih sorgum, tanaman ini terbukti sukses dikembangkan di Desa Kawalelo, tepatnya di Dusun Likotuden, juga di Flores Timur, sehingga warga Kimakamak bisa belajar langsung pada petani di sana. "Petani Kimakamak diharapkan bisa lebih mudah menerima perubahan jika bisa melihat langsung contoh sukses dari tempat lain," kata Direktur YPPS Melky Koli Baran.²⁸

Maka, proses belajar warga Desa Kimakamak untuk mencari tanaman yang adaptif kekeringan pun dimulai dengan kunjungan lapangan ke Desa Kawalelo, Kecamatan Demon Pagong, Flores Timur. Sebelum mengenal sorgum, sebagaimana umumnya

²⁶ Perdinan, Adi R.F, Arini E.Y, Basit R.A, 2017. Penyusunan dan Pelatihan Informasi Proyeksi Perubahan Iklim, Studi Kasus: Kabupaten Flores Timur. OXFAM Project. Yayasan Pengkajian dan Pengembangan Sosial. Flores Timur

²⁷ Berdasarkan wawancara di Kimakamak, 11 Juni 2018

²⁸ Berdasarkan wawancara dengan di Larantuka, 12 Juni 2018

desa di Flores Timur, sebagian masyarakat Kawalelo tidak bisa memenuhi kebutuhan pangan mereka dari hasil budidaya sendiri. Sebanyak 63 dari 158 keluarga di desa ini tergantung pada bantuan beras subsidi dari pemerintah.

Pada tahun 2014, petani dan pemulia sorgum, Maria Loretha, mengenalkan sorgum ke Dusun Likotuden. Ketika itu terjadi pro dan kontra, kata Kepala Desa Kawalelo, Paulus Iki Kola (52). Namun, beberapa orang mencoba menanamnya, termasuk Paulus, ternyata hasilnya sangat bagus sementara tanaman lain gagal panen. Saat ini luasan lahan sorgum di Kawalelo sudah mencapai 70 hektar (ha) dan terus bertambah tiap tahunnya. Hanya 11 KK yang belum menanam sorgum, mereka pegawai negeri sehingga tidak punya waktu. Selain tahan kering dan tahan hama penyakit, sorgum juga dapat dipanen dua hingga tiga kali. Rata-rata satu hektar lahan bisa menghasilkan 5 - 6 ton sorgum kering panen. Selain untuk memenuhi kebutuhan pangan, warga Kawalelo kini bisa meningkatkan ekonomi warga karena sorgum bisa dijual dengan harga pasaran saat ini Rp 5.000 per kilogram.²⁹

Dari Desa Kawalelo ini pula, warga Kimakamak mendapat tiga jenis benih sorgum, yaitu kuali, numbu, dan pulut. Selain belajar langsung ke Kawalelo, masyarakat Kimakamak juga belajar langsung dari Maria Loreta yang diundang YPPS untuk membagi pengalamannya mendampingi petani Likotuden. Selain itu, dilakukan demonstrasi pengolahan dan makan sorgum.

Proses ini ternyata menumbuhkan minat para petani Kimakamak untuk mulai menanam sorgum di kebunnya. Pada musim tanam 2016/2017, sebanyak 15 orang petani Kimakamak tertarik mencoba menanam sorgum di kebunnya. Selain benih sorgum, YPPS juga mendapatkan benih jewawut sehingga pada praktek pertanian adaptif kekeringan di tahun pertama ada dua jenis tanaman pangan yang ditanam petani Kimakamak. Kedua tanaman ini dianggap punya prospek untuk dikembangkan dan mampu memperkuat ketangguhan mata penghidupan para petani. "Jenis tanaman pangan lainnya yang juga adaptif terhadap kekeringan akan coba juga dikembangkan setelah sukses dengan sorgum dan jewawut.

²⁹ Berdasarkan wawancara di Likotuden, 12 Juni 2018

Semakin beragam jenisnya, semakin baik," kata Melky.³⁰

Percobaan pertama menanam sorgum di Kawalelo ternyata memberikan hasil panen yang lumayan, sekalipun pada tahun pertama ini rata-rata petani masih menanam jagung dan sorgum. Menurut Hendrikus Eko, untuk sorgum hanya butuh air di masa awal tumbuh. "Setelah tumbuh hujan sekali saja bisa berbuah. Dia tahan panas. Perawatan tidak rumit. Lahannya tidak harus dibersihkan. Hasilnya menjanjikan," kata dia. Hendrikus menambahkan, jika dibandingkan padi atau jagung, tanaman sorgum hasilnya bisa dua atau tiga kali lipat karena tanaman ini bisa dipanen hingga tiga kali sampai musim tanam berikutnya.

Penyuluh Pertanian Lapangan Kecamatan Adonara Barat Paulus Basa menambahkan, evaluasi musim tanam pertama bisa disimpulkan bahwa tanaman sorgum cocok dikembangkan di Kimakamak. Selain tahan kering, tanaman sorgum juga lebih tahan diterpa angin kencang yang kerap melanda daerah ini. "Tahun lalu jagung habis pas pecah bunga karena angin badai datang. Tetapi, tanaman sorgum lebih tahan karena akarnya kuat sehingga tidak mudah roboh. Akar tanaman ini lebih dalam mencengkeram tanah," kata dia. "Sebagai PPL, saya merekomendasikan penanaman sorgum bisa diperluas di Kimakamak."³¹

Mama Yustina Jari (42), perempuan petani dari Kimakamak mengatakan, dari percobaan pertama menanam sorgum dia mendapatkan hasil panen 20 kilogram sorgum kering. Kecilnya hasil ini karena dia belum fokus untuk menanam sorgum. "Tahun depan akan tanam sorgum semua, apalagi kami sekarang sudah merasakan ternyata sorgum enak dimakan dan bisa dibuat kue, minuman sereal dan beberapa macam lagi," kata dia.

Menurut Yustina, dia telah berhasil mengolah sorgum untuk menjadi sereal dan cocok diberikan kepada anak-anak. Selain itu, sorgum juga bisa dimasak campur nasi, dibuat kolak manis, kue tar, hingga kue mangkok dengan dicampur tepung terigu. "Anak anak kalau minum susu sorgum berat badan cepat naik. Saya sudah berikan pada cucu, memang terbukti. Saya giling manual, baru tumbuk, saring dan

³⁰ Berdasarkan wawancara di Larantuka, 12 Juni 2018

³¹ Berdasarkan wawancara di Kimakamak, 11 Juni 2018

ayak baru disangrai," kata dia.

Optimisme tentang masa depan budidaya sorgum juga disampaikan pasangan suami istri petani di Kimakamak, Sipeianus Ratu (45) dan Teodasia Peni (44). Musim tanam pertama dia mendapatkan hasil 150 kilogram dari dua kali panen. "Perbandingannya, tanam jagung tidak ada hasil, tetapi sorgum bisa panen dua kali. Setelah merasakan dan hasil bagus, tahun depan akan tanam lebih banyak," kata dia.

Setelah sukses menanam sorgum pada periode tanam 2016/2017, pada musim tanam 2017/2018, petani di Kimakamak yang bergabung untuk menanam sorgum bertambah menjadi 30 orang, di mana 26 di antaranya menanam sorgum dan 4 lainnya menanam sorgum dan jewawut.

Mendorong Perubahan Kebijakan

Sekalipun baru memasuki musim tanam kedua, namun upaya yang dilakukan petani Desa Kimakamak dalam bertani adaptif dengan kekeringan dengan membudidayakan sorgum menunjukkan hasil yang menjanjikan. Tanaman sorgum memang dikenal memiliki potensi untuk bisa beradaptasi dengan lahan kering. Misalnya, kajian dari David B. Lobell dari Universitas Stanford, Amerika Serikat dan tim yang dipublikasikan di jurnal *Science* (2008) menyebutkan sorgum merupakan salah satu tanaman yang memiliki kemampuan adaptasi tinggi terhadap perubahan iklim. Kemampuan adaptasi sorgum terhadap perubahan iklim karena efisien dalam menyerap air. Ketika level CO₂ meningkat seiring perubahan iklim, beberapa tanaman menjadi lebih efisien dalam menggunakan air, termasuk di antaranya sorgum. Tanaman ini bisa memberi hasil yang sama, sekalipun menyerap air lebih sedikit. Sorgum juga bisa tumbuh di berbagai variasi lingkungan, kondisi tanah dan iklim, mulai dari lahan tropis di Afrika hingga subtropis di Amerika. Sorgum juga bisa tumbuh di lahan marginal dan tidak butuh banyak pupuk dengan hama penyakit sangat terbatas. Dengan kemampuan ini, sorgum menjadi salah satu harapan untuk memenuhi kebutuhan pangan masa depan yang menghadapi tantangan tingginya pertumbuhan populasi dan

perubahan iklim.

Keunggulan sorgum sebagai sumber pangan masa depan bukan hanya pada kemampuan adaptasinya, namun juga pada kandungan nutrisinya. Data USDA (2011), kandungan karbohidrat sorgum per 100 gram (gr) mencapai 74,63 gr, lebih tinggi daripada gandum 71,97 gr. Kandungan karbohidrat ini peringkat ketiga setelah padi (79,15 gr) dan jagung (76,85 gr). Sedangkan untuk protein, tiap 100 gr sorgum memiliki kandungan protein 11 gr, lebih tinggi dari beras sebesar 9 gr. Sorgum juga kaya serat dan antioksidan, sedangkan indeks glikemiknya lebih rendah daripada beras sehingga cocok dikonsumsi oleh penderita diabetes.

Dengan keunggulan ini, tanaman sorgum seharusnya bisa menjadi sumber pangan alternatif, tidak hanya di Kimakamak, namun juga di seluruh Flores Timur yang juga mengalami persoalan kekurangan air. Menurut Melky Nahar, sorgum harusnya bisa menjadi salah satu solusi kekurangan pangan di kabupaten ini, apalagi tanaman lain seperti jagung dan padi semakin sering mengalami gagal panen. Namun demikian, pengembangan lebih luas tanaman sorgum membutuhkan dukungan dari pemerintah.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Flores Timur Yosef Molan Tukan mengatakan, sorgum memang memiliki potensi besar untuk dikembangkan di wilayahnya. "Apalagi sekarang memang ada tren menurunnya debit air, baik karena kerusakan daerah tangkapan air ataupun karena faktor cuaca," kata dia.³²

Namun demikian, menurut Yosef, hingga saat ini dukungan pemerintah untuk pengembangan sorgum masih sangat kurang. "Inisiatif penanaman sorgum masih dari kalangan LSM (lembaga swadaya masyarakat)," kata dia. Apalagi, pemerintah pusat lebih memprioritaskan komoditas padi, jagung, dan kedelai. "Sekalipun kondisi kering, di Flores Timur juga ada pembukaan sawah baru. Menurut saya, harusnya lebih didorong pertanian lahan kering seperti sorgum, tidak harus membuka sawah baru di sini," kata Yosef.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Flores Timur Antonius Wukak Sogen

³² Berdasarkan wawancara di Larantuka, 11 Juni 2018

mengakui, secara nasional pemerintah memang lebih memprioritaskan pencetakan sawah baru. Tahun 2018 ini membuka cetak sawah baru di Flores Timur mencapai sekitar 39,5 ha. Namun demikian, di tingkat lokal, pihaknya berhasil mengusulkan program penanaman sorgum seluas 250 ha di Flores Timur.³³ Sekalipun belum ada dukungan kebijakan tentang pertanian adaptif kekeringan di Flores Timur, namun inisiatif pemerintah untuk membuka lahan sorgum di Flores Timur merupakan perkembangan yang baik.

³³ Berdasarkan wawancara di Larantuka, 11 Juni 2018

3

UMKM TANGGUH DI KOTA MATARAM

OXFAM DI INDONESIA DAN KONSEPSI MATARAM

Memperkuat Kapasitas UMKM, Menjadikan Tangguh Bencana

Hampir setiap tahun para perajin tempe dan tahu di Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekar Bela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat mengalami banjir. Peningkatan kapasitas usaha kecil dan menengah mereka, diharapkan akan meningkatkan juga ketangguhan mereka terhadap bencana.

Sambil memasukkan kedelai ke mesin penggiling, Khusniah (35 tahun), perajin tahu dari Kelurahan Kekalik Jaya, menceritakan dampak banjir yang dialaminya di musim hujan tahun lalu. "Selama 2017 lalu kami kebanjiran sampai tiga kali," kata dia.³⁴

Banjir akibat meluapnya Sungai Ancar telah terjadi sejak lama, nyaris setiap tahun. Namun belakangan banjir yang melanda semakin sering terjadi dengan intensitas semakin tinggi. Pada 14 Desember 2016, banjir merendam 500 rumah warga di Kekalik Jaya. Banjir yang terjadi sejak pukul 17.00 WITA baru surut pada dini hari. Sebelumnya, pada 10 Desember 2016 juga terjadi banjir yang merendam 240 rumah warga. Banjir benar-benar melumpuhkan ekonomi masyarakat di Kekalik Jaya, yang 70 persen di antaranya merupakan perajin tempe dan tahu.

³⁴ Berdasarkan wawancara di Kekalik Jaya pada 23 Juli 2018



Kondisi Sungai Ancar di Kelurahan Kekalik Jaya, Kota Mataram pada akhir Juli 2018. Pendangkalan sungai akibat pembuatan sampah dan limbah industri tempe dan tahu berkontribusi terhadap banjir yang melanda kawasan ini setiap tahunnya. (Foto: Ahmad Arif untuk Oxfam di Indonesia)

Banjir tertinggi terjadi pada Senin, 12 dan 13 Juni 2017. Sekitar 362 rumah di empat lingkungan di Kelurahan Kekalik Jaya terendam banjir akibat meluapnya Sungai Ancar yang tidak sanggup menampung debit air kiriman maupun hujan yang mengguyur Kota Mataram.³⁵

Menurut penuturan Khusniah, air yang masuk ke dalam rumah tinggal sekaligus rumah produksi tahunya berketinggian hingga satu meter. "Mesin penggiling kedelai rusak, kedelai lima kuintal hanyut, juga air garam. Kayu bakar yang baru dibeli juga hanyut. Total kerugian sampai Rp 45 juta," kata perempuan yang tinggal sekitar 20 meter dari tepi Sungai Ancar.

³⁵ sumber: <https://kicknews.today/2017/06/13/sungai-ancar-meluap-rumah-362-kk-di-kelurahan-kekalik-terendam-banjir/>

Syamsuddin (43 tahun), perajin tempe yang juga Ketua Koperasi Serba Usaha Syariah (KSU-S) Kekalik Lestari Bersatu mengatakan, banjir memang telah menjadi langganan di Kekalik Jaya. Namun belakangan baik frekuensi maupun intensitasnya meninggi.³⁶

Risiko banjir akibat hujan ekstrem di Indonesia saat ini memang meningkat seiring dengan terjadinya perubahan iklim. Berdasarkan data dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Klimatologi Kelas I Lombok Barat, hujan lebat yang terjadi pada pertengahan bulan Juni 2017 di wilayah NTB, khususnya di wilayah Kota Mataram dan sebagian Lombok Barat, merupakan anomali. Bulan Juni merupakan bulan musim kemarau di wilayah NTB, tetapi adanya gangguan dinamika atmosfer memungkinkan terjadinya kondisi ekstrem. Menurut pantauan mereka, curah hujan tertinggi pada tanggal 12 Juni 2017 tercatat di Ampenan, Kota Mataram sebesar 159 milimeter (mm) per hari. Sedangkan di Lombok Barat, curah hujan tertinggi tercatat di Labuapi. Narmada dan Sigerongan, yaitu 116 mm per hari, 208 mm per hari, dan 120 mm per hari. Hujan di atas 100 mm per hari ini dalam kategori BMKG tergolong ekstrem.³⁷

Rekaman data BMKG selama 25 tahun terakhir menunjukkan, dari 17 pos pemantauan curah hujan di Kota Mataram, hanya terdapat satu kali kejadian hujan ekstrem di bulan Juni yaitu pada tanggal 17 Juni 2010 di Pos Hujan Gunungsari sebesar 110 mm. Oleh karena itu, kejadian Hujan Ekstrem yang terjadi tanggal 12 Juni 2017 di 4 lokasi yaitu Ampenan (159 mm), Labuapi (116 mm), Narmada (208 mm), dan Sigerongan (120) merupakan kejadian yang baru pertama kali ini terjadi dan tercatat sebagai curah hujan tertinggi yang pernah tercatat.

Anomali cuaca ini menunjukkan penguatan fenomena perubahan iklim yang semakin terasa dampaknya dari tahun ke tahun. BMKG telah memantau adanya tren peningkatan intensitas hujan lebat hingga ekstrem di luar musimnya pada beberapa lokasi. Misalnya, data pemantauan curah hujan di stasiun meteorologi

³⁶ Berdasarkan wawancara di Kekalik Jaya pada 23 Juli 2018

³⁷http://eoffice.bmkg.go.id/Dokumen/Artikel/Artikel_20170703110719_b5mcun_Laporan-Kejadian-Banjir-dan-Curah-Hujan-Ekstrem-di-Kota-Mataram-dan-Kab--Lombok-Barat--12-13-Juni-2017-.pdf

Kemayoran, Jakarta dalam kurun 1981-2015 menunjukkan tren peningkatan hujan dengan intensitas 20 milimeter (mm) per hari, 50 mm per hari, dan 100 mm per hari. Studi tentang perubahan pola banjir dalam 50 tahun terakhir yang dilakukan di Jakarta oleh peneliti cuaca dan iklim ekstrem BMKG, Siswanto, juga menunjukkan adanya beberapa perubahan pola. Saat ini, curah hujan tinggi bisa semakin sering terjadi di musim kemarau atau pada Juni-Agustus.³⁸

Selain faktor perubahan cuaca ini, risiko banjir di banyak tempat di Indonesia, termasuk di Kekalik Jaya, juga dipicu ulah manusia. Sekretaris Kelurahan Kekalik Jaya Mustaal mengatakan, kini Sungai Ancar semakin dangkal dibandingkan dulu. Hal ini terutama akibat pembuangan limbah industri pengolahan tahu dan tempe yang telah berlangsung puluhan tahun. Selain limbah cair dari ampas kedelai yang disalurkan melalui pipa ke sungai, para perajin tempe dan tahu di Kekalik Jaya juga biasa membuang abu sisa pembakaran kayu untuk memasak kedelai ke sungai.

Penyuluh Pertanian Lapangan Kota Mataram, Fera Ulfaturrohmah menyebutkan, satu rumah produksi tahu di Kekalik Jaya rata-rata membuang 4-5 karung sisa abu hasil pembakaran. Padahal, berdasarkan data dari Keputusan Walikota Mataram nomor 526/X/2009 tentang penetapan klaster industri kecil Unggulan Kota Mataram, jumlah perajin tahu tempe di Kelurahan Kekalik Jaya mencapai 227 unit. Data terakhir, jumlah perajin tahu dan tempe di Kekalik Jaya diperkirakan mendekati 500-an.

³⁸Harian Kompas, 15 Agustus 2017, halaman 14



Mukminah, perajin tahu yang juga anggota Koperasi Serba Usaha Syariah (KSU-S) Kekalik Lestari Bersatu. Banjir menyebabkan perajin tahu di Kekalik Jaya terlilit hutang. (Foto: Ahmad Arif untuk Oxfam di Indonesia)

Bisa disimpulkan bahwa, para perajin tempe dan tahu di Kekalik Jaya, merupakan korban sekaligus sumber penyebab terjadinya banjir yang mereka alami nyaris setiap tahun. Oleh karena itu, upaya mengatasi banjir ini mau tidak mau harus melibatkan mereka.

Berdasarkan fenomena ini, Oxfam di Indonesia bersama mitra lokal Konsorsium untuk Studi dan Pengembangan Partisipasi (KONSEPSI) dengan dukungan Pemerintah Australia melalui Australian NGO Cooperation Program (ANCP) mencoba membantu mengatasi masalah ini dengan program Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Tangguh. Program ini mencoba mengintegrasikan upaya pengurangan risiko bencana dengan peningkatan kapasitas ekonomi UMKM. Dengan meningkatkan ketangguhan dan kapasitas ekonomi UMKM, diharapkan mereka juga menjadi lebih tangguh menghadapi bencana, bahkan bisa turut serta dalam pengurangan risiko bencana di wilayahnya.

"UMKM Tangguh artinya pelaku usaha kecil ini tangguh menghadapi bencana,

artinya juga tangguh ekonominya," kata Wakil Direktur Bidang Program KONSEPSI, Abidin Tuarita.³⁹



Tahu produksi perajin di Kelurahan Kekalik Jaya, merupakan pemasok utama kebutuhan tahu di Kota Mataram. (Foto: Ahmad Arif untuk Oxfam di Indonesia)

Penguatan Kapasitas

Selama ini bencana banjir yang berulang kali melanda Kekalik Jaya telah menghancurkan ekonomi perajin tahu dan tempe di wilayah ini. Khusniah mengatakan, setiap terjadi banjir rata-rata setelahnya ia harus menghentikan usahanya selama lebih dari seminggu. Selain harus bersih-bersih, dia juga harus mengumpulkan modal lagi dengan meminjam dari bank untuk memperbaiki dan membeli peralatan yang rusak. Dia mencontohkan, setelah banjir terakhir pada Juni 2017, dia terpaksa meminjam uang di bank Rp 20 juta dan kemudian ditambah lagi Rp 40 juta dengan agunan sertifikat rumahnya. Selain untuk membeli

³⁹ Berdasarkan wawancara di Kota Mataram pada 24 Juli 2018

peralatan, dia kini merenovasi dan meninggikan rumahnya.

"Saya kapok kebanjiran. Nanti mesin-mesin ini dan kedelai serta barang-barang penting lain akan saya letakkan di atas," kata Khusniah, masih sambil terus bekerja.

Pengalaman yang sama dituturkan Mukminah (38 tahun). Banjir yang melanda telah merusak mesin-mesin dan alat-alat produksinya. Dia pun meminjam uang di bank hingga Rp 25 juta sebagai modal awal. "Kalau tidak pinjam uang di bank, kita tidak bisa usaha lagi. Jadinya, usaha tiap tahun selalu habis dan bahkan harus terus pinjam bank. Banjir membuat kami ke nol lagi," kata dia.

Seperti dikisahkan dua perajin tahu, Khusniah dan Mukminah, banjir yang rutin terjadi membuat mereka terlilit hutang bank. Bahkan, sebagian pengusaha tempe dan tahu yang tidak lagi punya agunan untuk meminjam ke bank terpaksa harus meminjam ke rentenir. Banyak pula yang kemudian bangkrut dengan hutang yang menumpuk.

"Hutang di bank saja sudah berat, apalagi kalau di rentenir," kata Khusniah, yang harus terus gali lubang dan tutup lubang untuk menjalankan usaha pembuatan tahunya. "Karena simpanan uang habis, terpaksa saat ini kami harus terus berhutang untuk membeli bahan baku."

Untuk mengataasi persoalan ini, KONSEPSI menggandeng Perhimpunan Koperasi Syariah NTB untuk memberikan penguatan kapasitas UMKM perajin tempe dan tahu di Kekalik Jaya. "UMKM di Kekalik Jaya sebenarnya potensinya bagus karena ada basis usahanya, yaitu membuat tahu dan tempe. Mereka sudah punya jejaring pemasaran. Namun, potensinya bisa lebih besar, jika bisa kirim (hasil) produksinya ke luar daerah. Nah, tantangan mereka pada modal, selain juga ada faktor bencana yang terus mengancam mereka," kata Ketua Perhimpunan Koperasi Syariah NTB, Muh. Nasir Jailani (37).⁴⁰

⁴⁰ Berdasarkan wawancara di Kota Mataram pada 23 Juli 2018



Syamsuddin (43 tahun), perajin tempe yang juga Ketua Koperasi Serba Usaha Syariah (KSU-S) Kekalik Lestari Bersatu. Koperasi diharapkan bisa meningkatkan kapasitas ekonomi serta ketangguhan perajin tempe dan tahu terhadap bencana. (Foto: Ahmad Arif untuk Oxfam di Indonesia)

Membentuk Koperasi Syariah

Melalui serangkaian diskusi dengan para perajin, akhirnya dibentuk Koperasi Serba Usaha Syariah (KSU-S) Kekalik Lestari Bersatu. Hingga saat ini, jumlah anggota KSU-S Kekalik Lestari Bersatu sebanyak 30 orang. "Sebenarnya peminatnya banyak, tetapi kami memang sengaja selektif untuk memilih anggota yang benar-benar punya komitmen yang sama," kata Syamsudin.

Menurut Syamsudin, koperasi yang pernah dibentuk di Kekalik Jaya dulu hancur karena buruknya pengelolaan. "Anggotanya banyak sekali, tetapi saat dapat pinjaman pada *nggak* bayar. Pengelolannya juga *nggak* jelas, termasuk pembukuannya tidak ada. Kami tidak ingin mengulangi kesalahan itu dengan koperasi yang baru dibentuk ini," ujar dia.

Marni (42), perajin tahu yang juga Wakil Ketua Koperasi Kekalik Lestari Bersatu,

berharap koperasi ini bisa menjadikan anggotanya lebih mandiri, terutama dalam permodalan. Menurut dia, selama ini banyak pengusaha yang terjerat hutang, termasuk ke rentenir. "Kalau ke rentenir pinjam Rp 1 juta harus kembali Rp 1,2 juta dalam dua bulan. Kalau tidak bisa bayar bunganya berlipat-lipat. Ada yang sampai bangkrut karena rentenir ini," kata dia.

Sejauh ini koperasi yang baru dibentuk ini hanya memiliki usaha simpan pinjam. Walaupun baru dibentuk kurang dari setahun, menurut Marni, simpanan di koperasi sudah mencapai Rp 23.243.000 per 3 Juli 2018. "Alhamdulillah, sampai saat ini tidak ada kredit macet. Semua anggota berkomitmen tinggi untuk sama-sama memajukan koperasi," kata dia.

Kusniah berharap banyak dengan keikutsertaannya dalam koperasi ini. "Saya ikut biar bisa pinjam uang, dan juga bisa menabung agar modal koperasinya terus bertambah. Kalau pinjam ke bank kan bunganya ke mereka, kalau koperasi akan kembali ke kita lagi. Nanti kalau koperasi sudah besar modalnya, kita tidak akan perlu pinjam di bank lagi, apalagi ke rentenir," kata dia.

Sekalipun penambahan anggota menjadi prioritas koperasi, namun Syamsudin lebih memilih berhati-hati. Dia ingin membangun dulu soliditas anggota koperasi. Tiap bulan para anggota bertemu untuk membahas berbagai soal, bukan hanya tentang kemajuan usaha, namun juga tentang kondisi lingkungan. Dalam pertemuan-pertemuan itulah, wacana tentang pengurangan risiko bencana dibicarakan hingga akhirnya disepakati pembentukan Tim Siaga Bencana Kelurahan (TSBK) Kekalik Jaya yang beranggotakan 20 orang.

Kebanyakan anggota koperasi juga anggota TSBK. Menurut Satriawan (30), Ketua TSBK yang juga penggerak koperasi. "Para anggota TSBK sudah mendapat pelatihan tentang bencana dari BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah). Tetapi, sejauh ini masih teori, belum ada praktik evakuasi," kata dia.⁴¹

Satriawan mengatakan, sebelum terlibat dalam koperasi dan TSBK ini, ia sangat awam dengan persoalan kebencanaan. Namun, kini dia menyadari bahwa

⁴¹ Berdasarkan wawancara di Kekalik Jaya pada 23 Juli 2018

kebiasaan mereka membuang sampah dan limbah industri tahu dan tempe ke sungai turut serta memicu terjadinya banjir. "Untuk limbah padat tahu saat ini sudah tidak dibuang ke sungai. Tetapi limbah cair dan abu bekas pembakaran memang masih dibuang ke sungai. Jika ada yang bisa membantu menangani soal limbah ini kami siap karena sekarang kami sudah sadar mengenai dampak pendangkalan sungai," kata dia.

Fera Ulfaturrohmah mengatakan, untuk mengatasi soal pembuangan limbah dan abu pembakaran ke sungai ini, mereka sudah mencoba mengajak Universitas Mataram (Unram) untuk memikirkan solusinya dari aspek rekayasa keteknikan. "Saat ini sudah ada pembicaraan dengan salah satu dosen di Unram untuk memanfaatkan limbah cair kedelai ini menjadi biogas. Jika ini berhasil, bisa menjadi solusi dua masalah sekaligus, yaitu mengurangi pembuangan limbah cair ke sungai dan mengurangi penggunaan kayu untuk pembakaran," kata dia.

Tantangan ke Depan

Sekalipun ada sejumlah kemajuan, namun upaya untuk menjadikan UMKM tahu dan tempe di Kekalik Jaya tangguh bencana masih jauh dari selesai. "Program dari Oxfam di Kekalik Jaya sudah selesai untuk tahap sekarang. Tetapi, KONSEPSI berkomitmen untuk melanjutkannya," kata Abidin.

Menurut Manajer UMKM Tangguh KONSEPSI Nasri, ketangguhan terhadap bencana para perajin tahu dan tempe di Kekalik Jaya memang belum teruji. TSBK yang dibentuk juga masih dalam proses mendapatkan penetapan dari Kelurahan Kekalik Jaya. "Dari segi pengetahuan anggota TSBK menghadapi bencana sudah ada. Mereka sudah bisa mengalisa melihat tanda-tanda bencana, tetapi sejak dibentuk memang pernah mengalami banjir lagi, sehingga belum bisa dinilai ketangguhannya," kata dia.

Tantangan lainnya, menurut Abidin, jumlah anggota UMKM yang terlibat dalam kebencanaan dan juga koperasi baru berkisar 20 - 30 orang dari total perajin tempe dan tahu di sana yang mencapai 500 orang. "Jumlah ini masih sangat kecil

dan sulit membuat perubahan dalam skala kawasan," ujar Abidin.

Nasri menambahkan, program penguatan kapasitas UMKM di Kekalik Jaya ini sebenarnya melibatkan komponen pemerintah, khususnya kelurahan sehingga diharapkan bisa menggandeng BPBD Kota Mataram untuk mereplikanya di tingkat yang lebih luas. Namun upaya untuk pelibatan BPBD Kota Mataram masih menemui kendala. Sejauh ini, keterlibatan BPBD baru dari tingkat Provinsi NTB, itu pun masih pada level perseorangan. Belum ada kebijakan atau regulasi yang dibuat untuk mendukung ketangguhan UMKM ini.

"Bagi KONSEPSI, ini memang program yang pertama kali kami lakukan di kota, biasanya kami lebih banyak bergerak di level kabupaten. Sehingga, untuk mempengaruhi di level kebijakan Pemerintah Kota Mataram masih butuh waktu. Apalagi, tidak semua BPBD memiliki pemahaman yang sama tentang pentingnya UMKM tangguh," kata dia.

Nasri menambahkan, di Kelurahan Kekalik Jaya juga ada anggota DPRD Kota Mataram. Saat ini yang bersangkutan juga sudah menjadi anggota koperasi yang dibentuk para perajin tempe dan tahu ini. Selain itu, KONSEPSI kini menggunakan jalur instansi lain, misalnya Badan Pertanahan Nasional Kota Mataram yang sudah menetapkan KSU-S Kekalik Lestari Bersatu sebagai mitra untuk pemberdayaan. "BPB akan melakukan pemberdayaan masyarakat Kekalik Jaya setelah legalisasi aset. Ini bisa jadi pintu masuk untuk pemberdayaan ke depannya," kata Nasri.

Menurut Abidin, sejak 2008 BPN Kota Mataram telah memiliki program pendaftaran tanah sistematis, sebagai bagian dari reformasi agraria. "BPN akan membantu melalui sertifikasi aset dan juga pemberdayaan, setelah masyarakat mendapatkan tanahnya. Sejauh ini sudah 8 anggota koperasi di Kekalik Jaya yang dapat sertifikat. Nanti akan diperluas, dan dalam praktiknya bisa dikaitkan dengan isu bencana," kata dia.

Abidin menyimpulkan, masih dibutuhkan waktu panjang untuk mengubah perilaku UMKM agar tangguh bencana. "Membuat mereka peduli bencana saja sudah bagus. Karena UMKM selama ini basisnya lebih produksi," kata dia.

Kepala Seksi Kesiapsiagaan BPBD Provinsi NTB, Ridho Ahyana mengatakan, program UMKM Tangguh yang dijalankan Oxfam dan KONSEPSI sangat dibutuhkan mengingat banyaknya pelaku UMKM di Mataram yang rentan terdampak bencana. Sekalipun demikian, BPBD tidak bisa berbuat banyak, mengingat pemberdayaan UMKM selama ini menjadi wewenang dari Dinas Koperasi. "Kami sudah pernah mengajukan anggaran untuk pendampingan UMKM Tangguh ini ke Bappeda, tetapi dianggap akan tumpang tindih dengan kewenangan di dinas lain," kata dia.⁴²

Khusus untuk pengembangan UMKM di Kekalik Jaya, menurut Ridho, peluangnya cukup besar. "Masyarakat sudah antusias. Kami sudah mencoba mengintegrasikan melalui jalur TSBK dan Kelurahan Tangguh, tetapi memang belum langsung ke UMKM-nya. Untuk pengembangan UMKM, perlu kerjasama dengan Dinas Koperasi yang lebih berwenang," kata dia.

DESKRIPSI PROGRAM

Program UMKM Tangguh di Kota Mataram pada periode pertama ditujukan untuk dua keluarahan yang sama-sama memiliki para pengusaha tempe dan tahu, yaitu Kelurahan Abian Tubuh Baru dan Kekalik Jaya. Durasi program berlangsung dari Januari hingga Juni 2017 dengan total anggaran Rp 274 juta. Dalam perkembangannya, program pendampingan di Kelurahan Abian Tubuh Baru tidak berlanjut karena minimnya antusiasime pelaku UMKM. Akhirnya program difokuskan di Kekalik Jaya. Setelah program tahap pertama selesai, dilakukan perpanjangan selama enam bulan, yaitu dari bulan November hingga bulan Mei 2018 dengan nilai anggaran Rp 100 juta. Sejauh ini, program di Kekalik Jaya sudah sukses membentuk koperasi UMKM dengan anggota awal 15 orang dan berkembang menjadi 30 orang.

⁴² Berdasarkan wawancara di Kota Mataram pada 23 Juli 2018

4

INTEGRASI MANAJEMEN RISIKO, INKLUSI SOSIAL DAN PEMBANGUNAN SOSIAL EKONOMI DI KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

FELMI YETTI (Program Manager Yayasan FIELD Indonesia kerjasama dengan Arbeiter Samariter Bund)

Dari 514 Kabupaten dan Kota di Indonesia, Kabupaten

Kepulauan Mentawai berada pada posisi ke 26 kabupaten rawan bencana. Jika dilihat di tingkat Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Kepulauan Mentawai berada pada posisi ke 3 daerah rawan bencana yang berisiko tinggi. Urutan pertama adalah Kabupaten Agam, Urutan Kedua adalah Pesisir Selatan dan Urutan ketiga, Kabupaten Kepulauan Mentawai.

“Untuk kerawanan desa berpotensi terjadi tsunami, ada 33 desa yang terancam tsunami dari 43 desa yang ada di Kabupaten Kepulauan Mentawai, dan itu berpotensi sedang dan tinggi. Pemetaan ini dilakukan oleh Institut Teknologi Bandung pada tahun 2018.” begitu ungkap Bapak Ir. Novriadi, Kalaksa BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai pada sambutannya dalam rangkaian kegiatan Pelatihan dan Simulasi Evakuasi Mandiri yang Inklusif yang dilaksanakan tanggal 1-4 November 2021. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Yayasan FIELD Indonesia-Arbeiter Samariter Bund (ASB) bekerjasama dengan BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kecamatan Sipora Utara dan Selatan, pemerintahan desa, TNI, Basarnas, Satgas Covid 19, NGO Lokal, beserta masyarakat di 4 desa wilayah dampingan Program Yayasan FIELD Indonesia -Arbeiter Samariter Bund (ASB) yaitu Desa Sioban dan Desa Saureinu di Kecamatan Sipora Selatan serta Desa Goisooinan dan Desa Sipora Jaya Kecamatan Sipora Utara. Kerjasama tersebut merupakan

implementasi dari metode “pentahelix” dalam penanganan dan penanggulangan bencana. Metode pentahelix adalah suatu bentuk cara mengatasi masalah atau pengembangan program dengan melibatkan pihak-pihak dari berbagai sector (lintas sector).



Foto:
Warga

Belajar sedang belajar di Balai Belajar Masyarakat di desa Sioban Kec. Sipora Selatan.

Arbeiter Samariter Bund (ASB) bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Provinsi Sumatra Barat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatra Barat telah melakukan serangkaian kerjasama dalam membangun ketangguhan masyarakat pesisir semenjak tahun 2013. Sinergi antara ASB dengan DPMD sebagai *leading sector* dalam penguatan pemerintahan desa dan BPBD sebagai *leading sector* dalam koordinasi kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana diperkuat melalui pelaksanaan program “Membangun Ketangguhan Masyarakat terhadap Ancaman Bencana di Kabupaten Kepulauan Mentawai Melalui Desa Tangguh” di Kecamatan Siberut Barat Daya, Siberut Barat dan Siberut Selatan yang dilakukan pada tahun 2014 - 2015. Sinergi ini kemudian dilanjutkan dalam implementasi program “Peningkatan Kapasitas Pengurangan Risiko Bencana dan Ketangguhan Desa Pesisir di Sumatera Barat” pada tahun 2016-2019, yang

berlokasi di 6 desa yang tersebar di Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kabupaten Pesisir Selatan.

Melalui pembelajaran yang telah dikumpulkan dari implementasi dari kedua program tersebut dan mengakomodir masukan dari pemerintah daerah serta para pemangku kepentingan terkait, ASB menindaklanjuti upaya untuk meningkatkan kapasitas desa-desa pesisir di Sumatera Barat melalui program *“Penguatan Ketangguhan di Wilayah Asia Selatan dan Asia Tenggara melalui integrasi Manajemen Risiko, Inklusi Sosial dan Pembangunan Sosial Ekonomi”* yang diimplementasi pada tahun 2021-2023. Sebagai bentuk penguatan kapasitas mitra lokal, program ini dilaksanakan secara langsung oleh mitra kerja ASB yaitu Yayasan FIELD Indonesia.

Sesuai judulnya, program ini merupakan program kolaboratif dari tiga mitra kerja ASB yang tersebar di tiga negara, yaitu di Indonesia, Bangladesh dan Filipina. Program ini dikembangkan dengan bercermin pada pembelajaran di ketiga negara ini tentang meningkatnya intensitas ancaman bencana bagi masyarakat pesisir yang diakibatkan oleh perubahan iklim. Lebih lanjut, meskipun dampak perubahan iklim telah secara langsung dirasakan khususnya dalam aspek penghidupan masyarakat pesisir termasuk nelayan dan petani, namun pengetahuan masyarakat dan pemerintah desa dalam mengambil langkah-langkah mitigasi baik secara praktis maupun melalui kebijakan masih sangat terbatas.

Dalam upaya membangun ketangguhan masyarakat, sasaran utama dari program ini adalah pengembangan sosial ekonomi masyarakat yang mengintegrasikan Pengurangan Risiko Bencana (PRB), Adaptasi Perubahan Iklim (API), dan inklusi sosial. Berangkat dari capaian program-program sebelumnya dimana ASB bersama DPMD dan BPBD telah berhasil mengedepankan strategi *“Semua Terlibat, Semua Selamat”* dalam penyusunan perencanaan, dan penyelenggaraan upaya membangun ketangguhan masyarakat pesisir, maka program ini juga akan memastikan bahwa kelompok masyarakat seperti penyandang disabilitas, perempuan dan orang lanjut usia yang seringkali tertinggal dilibatkan secara aktif. Dengan demikian, diharapkan kelompok-kelompok yang memiliki risiko hingga tiga kali lebih besar terhadap dampak bencana ini bisa terlibat dalam perencanaan

pembangunan serta memiliki sumber penghidupan yang berkelanjutan dan tahan terhadap guncangan dari luar.

Untuk memastikan agar pemerintah, lembaga, pemerintahan desa dan masyarakat di 4 desa wilayah dampingan program ASB-Yayasan FIELD Indonesia memiliki pemahaman yang sama baik mengenai ketangguhan masyarakat terhadap ancaman bencana dan gangguan sosial ekonomi yang disebabkan oleh perubahan iklim yang berpotensi menghambat laju pembangunan desa dan melumpuhkan kehidupan masyarakat dari segi sosial dan ekonomi yang inklusif kegiatan diawali dengan serangkaian sosialisasi di berbagai tingkat. Mulai dari tingkat Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan empat desa wilayah dampingan program.

Awal Februari 2021, dilakukan Kick Off Meeting Program di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Dengan kegiatan ini tercapai pemahaman yang sama antara semua pemangku kepentingan tentang tujuan dan cakupan program. Selanjutnya dilakukan koordinasi di 4 Desa wilayah program untuk memastikan perwakilan masyarakat yang dilatih menjadi petani pemandu untuk melakukan Pengkajian/Penilaian Risiko dan Kapasitas desa yang diberi nama Pelatihan Pemandu Pengkajian Perikehidupan Berkelanjutan. Pelatihan ini menghasilkan adanya peningkatan kapasitas petani yang dapat menjadi pemandu/fasilitator desa untuk menjadi fasilitator bagi masyarakatnya dalam melakukan kegiatan Pengkajian Perikehidupan Berkelanjutan (PPB) / *Sustainability Livelihood Assesment (SLA)* di masing-masing desa. Dalam masa kegiatan tersebut juga dilakukan pengambilan data awal jumlah disabilitas dan kategorinya di 4 desa, kegiatan PPB ini dilakukan bulan Maret sampai awal Juni 2021. Dari hasil kajian ini muncullah rencana aksi masyarakat di 4 desa dalam membangun ketangguhan masyarakat terhadap ancaman bencana dan gangguan social ekonomi yang disebabkan oleh bencana dan perubahan iklim diantaranya menjadikan desa tangguh pangan dengan memanfaatkan lahan tidur sebagai sumber pangan dan sumber ekonomi warga, bisa membuat pupuk kompos dan terciptanya lingkungan desa yang bersih, kegiatan ini dilakukan pada minggu ke dua Juni 2021.

Foto: Kelompok belajar, sedang belajar melakukan pembibitan tanaman dengan menggunakan daun batang pisang untuk media pembibitan agar sekaligus bisa menjadi pupuk.



Foto: Petani desa Sioban sedang belajar Ekologi tanah di lahan belajar. Mengenal tanah kita sebelum menanam tanaman untuk Lumbung pangan Hidup.

Rencana Aksi Masyarakat yang diperoleh melalui Pengkajian Perikehidupan Berkelanjutan ini disosialisasikan kepada pemerintah desa dan Kabupaten dalam kegiatan Pertemuan Multi pihak yang dilakukan tanggal 29 Juni 2021. Dari Rencana aksi masyarakat tersebut dilakukan TOT Sekolah Lapangan tematik yaitu Pelatihan bagi Pemandu Sekolah Lapangan Lumbung Pangan Hidup yang kemudian dilanjutkan di lapangan di 4 desa. Kegiatan Sekolah Lapangan Lumbung pangan hidup yang dilakukan sebanyak 12 kali pertemuan dengan topik-topik Ekologi tanah, analisis agroekosistem, penglibatan disabilitas, peran laki-laki dan perempuan dalam pertanian, pengolahan tanah, analisis kebutuhan sehari-hari, desain lahan belajar, seleksi benih, pembibitan, pembuatan kompos, MOL, Eco enzyme, uji ion, akar dan jaringan pengangkut, bahaya pestisida kimia, penyemaian, penanaman, pengamatan tanaman dan Organisme Pemakan Tanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pengolahan hasil tani. Kegiatan ini dilakukan dalam rentang waktu Juli -Oktober 2021. Dalam masa kegiatan itu dilakukan setiap bulannya Penguatan Pemandu dalam kegiatan Sekolah lapangan Lumbung pangan Hidup baik dalam hal Kepemanduan Sekolah lapangan maupun teknis. Pada Bulan September 2021 dilakukan Pelatihan Penguatan Disabilitas dan Gender sensitive bagi perwakilan perangkat desa, organisasi PKK, tokoh masyarakat, disabilitas dan pemandu sekolah lapangan. Dalam pelatihan tersebut, isu soal penguatan disabilitas adalah pengetahuan baru di Sipora terlebih lagi soal bagaimana melakukan pendataan tentang orang dengan disabilitas di desa dan

bagaimana membangun jaringan guna penguatan disabilitas ke depannya di desa. Dalam Pelatihan ini kita bekerjasama dengan HWDI Propinsi Sumatera Barat dan NGO yang bergerak di isu yang sama.

Untuk mensosialisasikan kegiatan Sekolah Lapangan Lumbung Pangan Hidup yang telah dilakukan, juga sebagai langkah membangun dukungan dari pemerintahan desa dan Kabupaten, dilakukan Hari Temu Lapangan Petani yang mengundang Organisasi Perangkat Daerah terkait, Kecamatan, Pemerintahan desa, tokoh agama, adat, pemuda, disabilitas dan masyarakat lain, ini dilakukan pada bulan Oktober 2021. Pada awal November juga dilakukan Pelatihan simulasi Evakuasi Mandiri bagi masyarakat di 4 desa wilayah dampingan program. Kegiatan ini bekerjasama dengan BPBD, Pusdalop Kabupaten Kepulauan Mentawai serta NGO Lokal yang berpengalaman dalam melakukan pelatihan dan simulasi evakuasi mandiri.



Foto: Pelatihan Simulasi Evakuasi Mandiri yang Inklusif bersama masyarakat dan pemerintahan desa, NGO Lokal dan Pusdalop BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Di bulan Oktober 2021 juga dilakukan Follow Up dari Sekolah lapangan yaitu Inisiasi Pembibitan Tanaman Multi Guna (PTMG) yaitu inisiasi untuk melakukan pembibitan tanaman tua (local) yang bisa bermanfaat guna penanaman pohon bagi daerah rawan banjir seperti Saureinu, penahan longsor bagi Goisooinan dan Sipora

Jaya, kelestarian lingkungan, dan juga investasi bagi pengembangan ekonomi masyarakat. Dalam bulan ini juga dilakukan studi penjajakan model yang dapat direplikasi desa dalam meningkatkan mata pencaharian (pemberdayaan ekonomi) yang berkelanjutan bagi masyarakat berbasis pengurangan risiko bencana dan berprinsip inklusif. Kegiatan ini dilakukan dengan cara 1) wawancara informal dengan anggota dan pemandu sekolah lapangan, masyarakat desa, pemerintahan desa dan kabupaten. Dalam Wawancara informal tersebut didapat persoalan bahwa untuk kebutuhan pangan, Mentawai masih sangat tergantung dengan bahan pangan dari Padang. Jika terjadi bencana dan cuaca buruk dan kapal tidak masuk ke Mentawai, maka stock pangan terputus. Sementara petani local belum bisa memenuhi permintaan kebutuhan pokok dari warung-warung local. Kemudian kontinyuitas hasil tani local masih menjadi persoalan. Sejak pandemi COVID 19, juga berkurang kunjungan dari luar Mentawai, sehingga permintaan terhadap produk local juga menjadi kendala, biaya angkut barang ke luar Mentawai juga menyebabkan tingginya harga jual produk Mentawai. 2) Petani ikut pameran produk pertanian dan hasil olahannya yang dilakukan DPMD dan PKK Kabupaten Kepulauan Mentawai. Dari pameran ini didapat pembelajaran bahwa yang paling dibutuhkan konsumen, daya beli paling tinggi itu adalah, untuk penduduk local yaitu kebutuhan pangan harian (pokok) seperti sayuran, cabe, tomat, terung, jengkol, talas, pisang dan buah-buahan. Untuk wisatawan yang datang ke Mentawai (untuk oleh-oleh) adalah pangan olahan dari keladi seperti keripik keladi, ikan asin, madu, sirup pala.

Di penghujung tahun, pada awal Desember 2021 dilakukan Pelatihan Pengembangan Bisnis dan Manajemen Ekonomi Rumah Tangga bagi petani pemandu dan pelaku Industri Rumah Tangga dari 4 Desa. Pelatihan ini bertujuan untuk 1) Masyarakat yang dilatih dapat mengidentifikasi pengembangan ekonomi yang relevan dikembangkan di 4 desa sesuai dengan kapasitas dan potensi masyarakat, 2) Peningkatan kapasitas, manajemen dan motivasi usaha, model yang dapat direplikasi desa dalam meningkatkan mata pencaharian (pemberdayaan ekonomi) yang berkelanjutan bagi masyarakat berbasis pengurangan risiko bencana yang inklusif.

Tantangan yang dihadapi dan solusi pemecahannya

Pada saat program ini dimulai, Covid 19 masih menjadi pandemic. Ini berdampak pada pembatasan pertemuan yang melibatkan banyak pihak. Sekolah lapangan yang menggunakan pendekatan partisipatif merupakan hal yang masih belum terbiasa di masyarakat. Beberapa kegiatan seperti membawa bibit dan benih dari rumah, yang pernah ditanam oleh petani untuk dibudidayakan di lahan belajar, sering tidak dibawa oleh peserta pelatihan ke lahan belajar karena belum terbiasa melakukan pembenihan sendiri, masih sering tergantung terhadap pendamping. Namun setelah berproses dalam kegiatan sekolah lapangan, mulai belajar untuk mengembangkan benih tanaman sendiri, seperti cabe, sayuran, terung, tomat, dll.

Persoalan penyehatan tanah dengan kondisi tanah yang cenderung asam dan liat di lahan belajar, membuat kebutuhan akan bahan organik menjadi hal yang sangat penting sebelum menanam. Pupuk kandang yang tidak banyak tersedia, membuat materi pembuatan pupuk organik cair, kompos dan eco enzyme dari pengolahan biomasa pertanian seperti batang pisang, daun-daunan dan sisa-sisa limbah dapur rumah tangga menjadi solusinya sampai saat ini.

Penguatan disabilitas, masih menjadi pengetahuan baru, baik di tingkat staf proyek, pemerintahan desa bahkan masyarakat, ini terungkap dari peserta pelatihan sewaktu dilakukannya pelatihan penguatan disabilitas dan gender sensitive, jadi ketika identifikasi kelompok disabilitas data desa masih sangat terbatas.



Foto : Pameran Produk pertanian dan pengolahan hasil pertanian dari kelompok sekolah lapangan Lumbang Pangan Hidup kerjasama dengan PKK Kabupaten dan DPMD Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Untuk pengembangan ekonomi, masih terkendala dalam hal pemasaran, pemasaran lewat media on line baru bisa dilakukan oleh Desa Sipora jaya karena sinyal internet yang bagus. Namun untuk 3 desa lainnya seperti Goisooinan, Saureinu, Sioban, akses internet masih sangat terbatas. Begitu juga untuk kendala peririzinan seperti PIRT, Label Halal masih belum mendapat kepercayaan pasar. Untuk itu dibangun kerjasama produksi dan pemasaran antar desa. Desa Goisooinan, Saureinu dan Sioban bisa menghasilkan produksi hasil pertanian seperti tanaman kebutuhan pokok sehari-hari, dan Desa Sipora Jaya yang masyarakatnya sudah beragam dan akses internetnya baik menyediakan diri untuk memasarkan.

Peran-Peran Para Pihak



Foto: Diskusi Penglibatan Disabilitas dan Gender Sensitiv dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring program pembangunan desa dengan Perangkat Desa di Desa Saureinu.

Dalam pelaksanaan program, Yayasan FIELD Indonesia yang memfasilitasi secara langsung keseluruhan kegiatan program pada tingkat inisiasi di desa dan kabupaten. Selanjutnya dikarenakan program ini berbasis desa maka masyarakat dan pemerintah desalah yang berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan program. Peran aktif masyarakat dengan dilatihnya menjadi pemandu/ fasilitator desa tersebut dalam program ini diharapkan dapat menjadi pendukung keberlanjutan program. Dalam hal ini, keterlibatan aktif desa dan masyarakat dapat mengarahkan pada mekanisme penyelenggaraan pengelolaan sumber daya, adaptasi perubahan iklim dan penanggulangan bencana yang sesuai dengan konteks desa dan relevan dengan sumber daya yang ada.

Pelaksanaan kegiatan program tidak terlepas dari dukungan segenap pihak baik tingkat desa dan kabupaten. Arbeiter Samariter Bund (ASB) dan Yayasan FIELD Indonesia mengapresiasi antusiasme desa dalam bekerja bersama untuk pembangunan desa ke arah yang lebih baik dan berdaya. Antusiasme dukungan juga diperoleh dari Pemerintah Kabupaten Mentawai khususnya BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai. Dukungan berupa konsultasi multipihak, keterlibatan langsung dalam kegiatan dan berbagi penguatan dalam kegiatan Kesiapsiagaan dan

mitigasi bencana.

Untuk pengembangan ekonomi, masih terkendala dalam hal pemasaran, pemasaran lewat media on line baru bisa dilakukan oleh Desa Sipora jaya karena sinyal internet yang bagus. Namun untuk 3 desa lainnya seperti Goisooinan, Saureinu, Sioban, akses internet masih sangat terbatas. Begitu juga untuk kendala perizinan seperti PIRT, Label Halal masih belum mendapat kepercayaan pasar. Untuk itu dibangun kerjasama produksi dan pemasaran antar desa. Desa Goisooinan, Saureinu dan Sioban bisa menghasilkan produksi hasil pertanian seperti tanaman kebutuhan pokok sehari-hari, dan Desa Sipora Jaya yang masyarakatnya sudah beragam dan akses internetnya baik menyediakan diri untuk memasarkan.

Peran-Peran Para Pihak

Foto: Diskusi Penglibatan Disabilitas dan Gender Sensitiv dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring program pembangunan desa dengan Perangkat Desa di Desa Saureinu.

Dalam pelaksanaan program, Yayasan FIELD Indonesia yang memfasilitasi secara langsung keseluruhan kegiatan program pada tingkat inisiasi di desa dan kabupaten. Selanjutnya dikarenakan program ini berbasis desa maka masyarakat dan pemerintah desalah yang berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan program. Peran aktif masyarakat dengan dilatihnya menjadi pemandu/ fasilitator desa tersebut dalam program ini diharapkan dapat menjadi pendukung keberlanjutan program. Dalam hal ini, keterlibatan aktif desa dan masyarakat dapat mengarahkan pada mekanisme penyelenggaraan pengelolaan sumber daya, adaptasi perubahan iklim dan penanggulangan bencana yang sesuai dengan konteks desa dan relevan dengan sumber daya yang ada.

Pelaksanaan kegiatan program tidak terlepas dari dukungan segenap pihak baik tingkat desa dan kabupaten. Arbeiter Samariter Bund (ASB) dan Yayasan FIELD Indonesia mengapresiasi antusiasme desa dalam bekerja bersama untuk pembangunan desa ke arah yang lebih baik dan berdaya. Antusiasme dukungan juga diperoleh dari Pemerintah Kabupaten Mentawai khususnya BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai. Dukungan berupa konsultasi multipihak, keterlibatan langsung dalam kegiatan dan berbagi penguatan dalam kegiatan Kesiapsiagaan dan mitigasi bencana.

5

CERITA LAPANGAN MEMBANGUN KETANGGUHAN BERBASIS KOMUNITAS

MELKY KOLI BARAN/DIREKTUR YPPS FLORES TIMUR

Cerita Yang Meneguhkan

Mengawali cerita pengalaman lapangan ini saya mencatat dua cerita. Cerita tentang kesiapsiagaan menghadapi bencana dan cerita tentang adaptasi iklim cara orang kampung.

Cerita 1:

Bulan Desember, tanggal 14, tahun 2021, pukul 10:20:23 waktu setempat. Sontak kabupaten Flores Timur diguncang gempa dengan magnitudo 7,4. Pusat gempa 112 km barat laut Kabupaten Flores Timur. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini tsunami. Peringatan itu dicabut pada pukul 12.20 waktu setempat.

Pertama, saya ingat tahun 1992 silam, daerah ini pernah diguncang bencana dengan kekuatan 6,8SR, dan menyasar wilayah utara Flores Timur. Kedua, saya ingat sejak tahun 2009 hingga 2015 kami di Yayasan Pengkajian dan Pengembangan Sosial (YPPS) didukung Oxfam dan juga Yayasan Idep Selaras Alam pernah bekerja bersama sejumlah desa di Flores Timur untuk membangun ketangguhan berbasis komunitas dalam menghadapi bencana.

Terkait hal kedua ini, saya masih menyimpan nomor telepon para coordinator Tim Siaga Bencana Desa (TSBD). TSBD adalah organisasi tingkat desa yang YPPS fasilitasi sebagai kelompok inti desa dalam proses belajar membangun ketangguhan berbasis komunitas.

TSBD di sekitar 10 desa di Flores Timur itu dilatih membangun kesiapsiagaan di desa, serta bagaimana merespon kejadian bencana di desa. Desa-desa ini diperkuat kapasitas mereka menghadapi bencana yang dapat saja terjadi sesuai dengan tingkat ancaman di masing-masing desa. Tak lupa juga menyepakati jalur evakuasi dan tempat evakuasi untuk setiap jenis ancaman.

Salah satunya adalah desa Serinuhu, kecamatan Titehena. Ketika guncangan gempa hari itu, saya langsung ingat desa Serinuhu. Sebab Desa ini sebagiannya teggelam ke dasar laut pantai utara Flores Timur ketika wilayah ini digugang gempa dan tsunami tahun 1992. Saya menelpon om Emanuel Kewuta yang adalah Koordinator TSBD di desa Serinuhu. Saya agak gembira ketika tersambung dengan om Emanuel. Dari seberang sana, om Emanuel tanpa ditanya langsung menyampaikan bahwa mereka baru saja tiba bersama seluruh masyarakat desa di “Tempat Evakuasi” yang telah disepakati oleh warga desa itu tahun 2015 silam. Ia menjelaskan bahwa ketika terjadi goncangan gempa, spontan masyarakat membunyikan tanda di seluruh desa, yang serentak dikuti dengan evakuasi mandiri warga menuju tempat evakuasi.

“Saat ini kami sedang bersihkan lokasi. Kami memotong kayu sekitar sini untuk membangun dapur dan tenda. Kami telah sepakat untuk bertahan beberapa waktu di tempat ini. Jika agak aman, anggota TSBD akan turun ke desa untuk memastikan bahwa seluruh desa aman selama warga di pengungsian”, cerita om Emanuel Kewuta dari seberang sambungan telepon.

Ketika peringatan potensi tsunami dicabut pada pukul 12.20 waktu setempat, saya menghubungi lagi om Emanuel untuk menyampaikan bahwa peringatan potensi tsunami telah dicabut. Jadi warga boleh Kembali turun ke desa. Namun ia menjelaskan bahwa TSBD, Pemerintah Desa dan masyarakat telah sepakat untuk tetap bertahan di tempat pengungsian. “Kami telah sepakat untuk tetap bertahan di sini, Apalagi STBD dan masyarakat telah selesai membangun tenda untuk dapur dan tempat berteduh”.

Hati saya lega campur gembira bahwa penguatan kapasitas komunitas untuk membangun kesiapsiagaan delapan tahun silam itu ada gunanya hari ini ketika

masyarakat menghadapi guncangan gempa bumi.

Cerita 2:

Hendrikus Eko dan Mikael Kere Lio, dua orang desa yang menjabat sebagai Kepala Desa di Flores Timur. Hendrikus menjabat Kepala Desa Kimakamak ketika tahun 2017 silam YPPS memfasilitasi belajar ketangguhan iklim di desa itu. Mikael Kere Lio adalah Kepala Desa Gekeng Deran. Beliau menjabat sebagai Kepala Desa ketika tahun 2019 YPPS memfasilitasi belajar iklim di desa itu.

Kemudian keduanya tidak lagi berambisi menjadi Kepala Desa. Mereka lebih suka menjadi 100% petani setelah terlibat belajar bertani adaptif kekeringan. Hendrikus Eko menjadi petani sorgum di desanya. Ia juga mendorong petani lain menanam sorgum karena sorgum bisa dipanen tiga kali dalam setahun. Kalau tanam jagung cuma sekali saja dan kadang gagal karena buruknya iklim dan kurangnya hujan. Kini Hendrikus punya usaha pengolahan sorgum di rumahnya. Ia bekerja sama dengan sejumlah Puskesmas di pulau Adonara untuk penurunan stunting melalui pemberian makanan tambahan berbahan sorgum kepada anak-anak stunting.

Mikael juga berhenti dari Kepala Desa dan tidak lagi mencalonkan dirinya. Ia jatuh cinta dengan pertanian adaptif kekeringan. Mikael tidak saja menanam sorgum tetapi juga kacang tanah dan kacang ijo. Sama seperti Hendrikus, Mikael juga mendorong para petani di desanya untuk bertani adaptif kekeringan. Di kebunnya yang tidak jauh dari desa, ia beri nama Pondok Inspirasi. Kebun itu ditanami di musim kemarau dan di musim hujan. Dilengkapi dengan rumah jemur energi matahari dan mesin pengolahan sorgum.

Impian Awal

Tahun 2009 hingga 2015, YPPS bekerja sama dengan Oxfam dalam proyek Building Resilience (BR) dan Building Deepening Resilience (BDR). Proyek berdurasi lima tahun ini berisi penguatan kapasitas desa dan kabupaten dalam membangun

ketangguhan menghadapi bencana. Pada periode ini, YPPS memfasilitasi ketangguhan di 10 desa bersama Oxfam dan dua desa bersama Yayasan Idep Selaras Alam.

Dalam dan melalui proyek ini, YPPS menaruh impian agar korban jiwa dan derita akibat terjadinya bencana dikurangi. Karena itu, melalui proyek ini, difasilitasi juga penguatan kapasitas Pemerintah Daerah dan stakeholder terkait untuk membangun ketangguhan sehingga mampu mendukung masyarakat jika terjadi bencana.

Namun yang lebih penting adalah, bagaimana ketangguhan itu terfasilitasi di masyarakat sehingga ketika terjadi bencana secara tiba-tiba, masyarakat secara mandiri melakukan tindakan-tindakan penyelamatan. Dengan demikian, korban jiwa dan derita dikurangi. Itulah impian kecil YPPS bersama Oxfam dan juga bersama IDEP kala itu.

Untuk mendukung tercapainya impian ini, maka YPPS juga memperkuat ketangguhan pemerintahan kabupaten. Dua level pendekatan pun jadi pilihan, yakni memfasilitasi proses belajar membangun ketangguhan di desa-desa dan instrument kebijakan di tingkat kabupaten. Saat itu, di Kabupaten Flores Timur belum ada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Secara strategis, pilihan membangun ketangguhan di komunitas tidaklah salah. Namun mengingat keterbatasan sumberdaya proyek dibandingkan cakupan wilayah kabupaten yang sangat luas, tidaklah mungkin proyek ini bisa menjangkau 250 desa dan kelurahan di kabupaten ini. Selain itu YPPS juga memiliki kapasitas yang sangat terbatas. Maka mau tidak mau, YPPS mesti tetap “berjalan sambil membuat jalan” di dua level sekaligus, yakni desa dan kabupaten.

Kerja Kongkret

“Berjalan sambil membuat jalan”, adalah refleksi kemudian ketika proyek membangun ketangguhan di Flores Timur telah berjalan sekian jauh bersama

Oxfam. Hal ini kami lakukan dari titik nol.

a. Level Kabupaten

Assesment yang kami lakukan di level kabupaten sebelum memulai proyek ini menemukan bahwa sangat minim informasi terkait penanggulangan bencana. Cerita yang kami peroleh dari masyarakat maupun staf pemerintah daerah tentang penanggulangan bencana adalah kegiatan-kegiatan menyalurkan bantuan kepada para korban. Itu perspektif yang dominan. Perspektif kesiapsiagaan, membangun ketangguhan menghadapi bencana masih sangat jauh, bahkan tak teridentifikasi dari assesment awal ini. YPPS memandang penting untuk mengadvokasi kebijakan di kabupaten ini.

“Assesment awal menunjukkan masih terbatasnya pengetahuan aparat di instansi terkait tentang Pengurangan Risiko Bencana. Paradigma respon masih demikian kuat. Perangkat kelembagaan yang ada hanyalah satuan pelaksana (Satlak) yang melakukan respon kedaruratan. Demikian pula yang terjadi di instansi terkait lainnya. Inilah yang mendorong YPPS untuk focus pada advokasi ke Pemkab dan pemangku kepentingan lainnya agar kerja-kerja PRB menjadi perhatian semua pihak” (*Oxfam di Indonesia, Membangun Ketahanan Terhadap Bencana, “Advokasi Regulasi & Kelembagaan Penanggulangan Bencana di Flores Timur”, 2011, hal.33*).

Dari assesment inilah, implementasi proyek Membangun Ketangguhan di kabupaten Flores Timur mengambil focus memperkuat kapasitas pemerintah kabupaten dalam membangun ketangguhan menghadapi bencana.

- **Memfasilitasi Kelompok Inti**

Kami mulai dengan membangun sebuah kelompok inti di kabupaten Flores Timur yang akan menjadi kawan dalam melaksanakan advokasi. Sebuah seminar kabupaten jadi pembuka jalan. Usai seminar, dibuka kesempatan diskusi terfokus di hari berikutnya. Para peserta seminar diberi kesempatan jadi peserta. Hadir dalam diskusi terfokus itu sekitar 20 peserta. Mereka berasal dari staf pemerintah, TAGANA yang dibina Dinsos, jurnalis dan aktivis

LSM. Diskusi terfokus ini menyepakati dua hal. Pertama, membentuk sebuah Pokja (Kelompok Kerja) yang diberi nama Pokja PRB. Kedua, tugas Pokja adalah melakukan edukasi public dan menyiapkan draft Perda Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan draft Perda tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

- **Mengadvokasi Kebijakan Daerah**

Didukung Oxfam, YPPS dan Pokja melakukan kajian di desa-desa dan Menyusun sebuah Naskah Akademik tentang Kelembagaan dan Kebijakan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Flores Timur. Pertengahan tahun 2010, dua draft Perda telah disiapkan dan diserahkan ke Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD Kabupaten Flores Timur.

Awal tahun 2011, kedua perda ini ditetapkan. Sesuai amanat Perda, Bupati Flores Timur membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur. Pokja telah sukses melaksanakan tugasnya dan bertransformasi menjadi Forum PRB Kabupaten berdasarkan amanat Perda. Selanjutnya, Forum bersama YPPS mendukung BPBD yang baru dibentuk.

- **Instrument Pendukung Penanggulangan Bencana**

Bersama BPBD yang telah dibentuk, YPPS dan Forum PRB didukung penuh oleh Oxfam menyiapkan instrument Penanggulangan Bencana yang akan menjadi kekuatan bagi BPBD kabupaten Flores Timur.

Cuma butuh waktu setahun, BPBD Kabupaten Flores Timur telah memiliki dokumen Analisis Risiko Bencana, Peta Risiko Bencana, RPB, dan Rencana Kontigensi untuk Banjir Bandang Kota Larantuka sebagai ancaman prioritas dari 9 jenis ancaman bencana di Kabupaten Flores Timur.

b. Level Komunitas

Pada level komunitas, YPPS dan Oxfam memfasilitasi mekanisme membangun ketangguhan komunitas di 10 desa. Dimulai dengan pertemuan tingkat desa untuk memahami bersama tentang paradigma penanggulangan bencana yang lebih

memberi perhatian pada membangun ketangguhan masyarakat.

Dari pemahaman bersama inilah, bersama pemerintah desa membentuk sebuah kelompok inti tingkat desa. Kelompok ini diberi nama Tim Siaga Bencana Desa yang disingkat dengan nama TSBD. Pembentukan TSBD parallel dengan pembentukan Pokja PRB di level kabupaten.

Di Desa tim ini menjadi representasi desa dan menjadi bagian dari proyek Membangun Ketangguhan terhadap bencana. Sama seperti Pokja di level Kabupaten, TSBD menjadi bagian dari YPPS untuk memperkuat kapasitas dalam menghadapi ancaman bencana. TSBD dilatih berbagai hal terkait kesiapsiagaan menghadapi bencana. Penguatan kapasitas yang bersifat strategis mendukung ketangguhan komunitas seperti melakukan Kajian Kapasitas dan Kerentanan Desa, Menyusun rencana aksi Desa untuk memperkuat ketangguhan dan usulan-usulan Kebijakan Desa.

Dari penguatan kapasitas yang bersifat strategis inilah, terbaca kebutuhan-kebutuhan penguatan kapasitas yang lebih teknis. Dari Kajian Kapasitas dan Kerentanan, setiap desa mengidentifikasi jenis-jenis ancaman bencana di desa. YPPS dan Oxfam mendukung sejumlah penguatan kapasitas teknis di desa. Antara lain, menyusun sistem peringatan dini yang diikuti pemasangan rabu-rambu evakuasi dan penentuan tempat evakuasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Tak lupa menguji sistem peringatan dini dan jalur evakuasi dengan menggelar simulasi respon bencana di desa. Selain itu, berbagai Latihan teknis seperti pertolongan pada korban, pengelolaan Dapur Umum dan usulan pembangunan infrastruktur.

Iklm dan Ketangguhan Mata Penghidupan

a. Titik Tolak

Analisis risiko bencana dan peta rawan bencana kabupaten Flores Timur memperlihatkan ada 9 ancaman bencana yang pernah dan sering terjadi. Dari 9

ancaman ini, ada tiga ancaman bencana murni alam, yakni gempa bumi, tsunami dan letusan gunung api. Sisanya adalah bencana hydrometeorologi. Banjir, banjir bandang, longsor, angin puting beliung, badai, abrasi dan kekeringan.

Bencana-bencana hydrometeorologi ini mengancam langsung ke mata penghidupan masyarakat Flores Timur yang adalah petani lahan kering tadah hujan, di mana kesuksesan para petani sangat bergantung pada cura hujan.

Dari pemetaan ancaman bencana seperti ini, paska tahun 2015 yang merupakan paska proyek BR dan BDR, YPPS dan Oxfam menghubungkan kerentanan dan kapasitas mata penghidupan dengan ancaman-ancaman bencana hydrometeorologi.

Pertama, kami melakukan diskusi terfokus di desa-desa untuk membahas ancaman bencana terhadap mata penghidupan. Dari proses ini kami menemukan bahwa ancaman perubahan iklim terasa sampai ke tingkat para petani.

Selama 30 tahun terakhir, musim kemarau dengan tingkat kekeringan cukup tinggi telah meningkat mencapai 8 sampai 9 bulan setahun. Dengan demikian, musim hujan berkisar 3 bulan setahun dengan curah hujan tak menentu, tetapi kadang meningkat dalam beberapa hari dan menyebabkan banjir, longsor dan angin badai yang merusak tanaman pertanian, secara khusus tanaman palawija. Dengan demikian, kami menemukan bahwa kekeringan panjang, curah hujan yang sangat terbatas dan tak menentu menjadi salah satu ancaman bagi mata penghidupan.

Curah hujan yang sangat minim menyebabkan tanaman palawija tak bisa memberi hasil yang maksimal. Gagal tanam dan gagal panen adalah cerita-cerita keseharian. Perlahan pertanian menjadi sektor yang kurang diminati oleh generasi muda. Alasannya adalah biaya yang dikeluarkan jauh lebih tinggi dari hasil musiman yang diperoleh.

b. Belajar Mengenal Iklim

Berhadapan dengan realitas curah hujan dan musim yang tak menentu, kami memfasilitasi masyarakat, para petani di desa-desa untuk belajar mengenal iklim setempat, yang kami sebut iklim micro.

Dari tiap desa, kami rekrut dua orang muda dan ditemani seorang aparat Desa sebagai peserta belajar mengenal iklim. Proses belajar sederhana untuk melatih orang desa melakukan perhitungan sederhana. Menghitung bulan musim kemarau dan bulan musim hujan di 10 tahun sebelumnya. Di dalamnya, menghitung ketersediaan air skala rumah tangga di musim kemarau dan juga menghitung penyebaran hari-hari dengan curah hujan rendah sampai sedang di 10 tahun sebelumnya. Dengan cara ini, para petani mengetahui kecenderungan perubahan curah hujan di musim hujan dan ketersediaan air di musim kemarau.

Rata-rata kami temukan bahwa curah hujan dan ketersediaan air cenderung semakin buruk di tahun-tahun terakhir. Di salah satu desa, penduduk desa itu bercerita bahwa di tahun 1970-an dan sebelumnya, air sangat besar di kali yang membelah kampung mereka itu. Mereka menjelaskan bahwa jika berdiri di seberang kali dan berbicara, lawan bicara di seberangnya tidak bisa mendengar apa yang disampaikan. Hal ini karena deruh air kali melampaui suara manusia. Juga di kali itu tidak kelihatan batu-batu di dalam kali. Saat ini jauh berbeda. Aliran air cuma riak kecil saja. Debit air menurun jauh karena curah hujan yang berkurang sepuluh dan dua puluh tahun terakhir.

Untuk menentukan musim mempersiapkan ladang dan saat pasti menanam di awal musim hujan, para petani dipandu oleh tanda-tanda alam. Saat ini, banyak tanda alam telah hilang bersamaan dengan perubahan-perubahan bentang alam.

c. Pertanian Adaptif Kekeringan

Hasil belajar mengenal iklim ini kami jadikan bukti untuk pembahasan lebih jauh bersama para mitra belajar tentang bagaimana menjalankan pertanian di tengah ancaman kekeringan dan kekurangan hujan dari tahun ke tahun. Dua orang muda tiap desa menyediakan waktu dan juga warga desa untuk membahas hasil-hasil belajar ini sehingga menjadi pengetahuan bersama dan dipraktikkan di desa masing-masing.

Pada tahapan ini, kami mendapatkan berbagai cerita pengalaman, yang kemudian bersama para petani kami olah menggunakan dua pilihan dalam strategi menghadapi ancaman perubahan iklim, yakni *mitigasi dan adaptasi*. Melakukan

mitigasi dan adaptasi melalui kegiatan pertanian.

Pada tahapan ini, diskusi menjadi sangat panjang oleh berbagai pertimbangan. Adaptasi dan mitigasi menjadi solusi menghadapi pilihan melanjutkan mata penghidupan di sektor pertanian atau meninggalkan sector pertanian. Pilihannya adalah adaptasi sambil juga melakukan mitigasi. Namanya pertanian adaptif kekeringan.

Pertanian adaptif kekeringan adalah salah satu pilihan para petani mitra belajar iklim. Rumus sederhananya adalah, setelah mengetahui perkiraan curah hujan dalam setahun, lalu bagaimana pilihan berdamai dengan curah hujan yang terbatas itu. Targetnya adalah tanaman palawija bisa sukses dan dipanen dengan hasil yang memadai walau dengan ketersediaan curah hujan yang terbatas. Inilah pendekatan pertanian adaptif kekeringan.

Sampai di sini, para petani lebih tahu harus menanam apa di kebunnya. Prinsipnya adalah bisa menanam dan memanen apa yang akan dikonsumsi dan untuk itu petani juga mau konsumsi apa yang ditanam dan dipanen.

Tahapan berikut adalah aksi iklim bertani yang beradaptasi dengan kekeringan dan kekurangan hujan.

1. Kami fasilitasi para petani untuk membuat daftar jenis tanaman palawija yang ada di komunitas.
2. Dari jenis tanaman palawija yang telah didaftar itu, para petani harus memilih manakah jenis tanaman yang jika dibudidayakan dan bisa dipanen hasilnya walau hanya dengan curah hujan yang kurang bahkan terbatas.
3. Dari jenis tanaman yang diidentifikasi pada point kedua, manakah jenis tanaman yang benih atau bibitnya tersedia di komunitas.

Proses ini memberi pelajaran kepada kami bahwa, di komunitas tersedia jenis tanaman palawija yang bisa dibudidayakan dengan curah hujan yang terbatas. Ada jagung kuning yang tahan panas, ada jagung umur pendek yang bisa dipanen dalam usia 40 hari, ada padi lokal yang tahan panas, ada berbagai jenis kacang-kacangan dan ubi-ubian. Ubi-ubian ini bisa bertahan di ladang sepanjang musim kemarau

yang panas. Batang dan daunnya bisa kering tetapi umbinya tetap tersimpan dalam tanah dan kapan saja bisa dipanen. Lebih diandalkan lagi adalah beberapa varian sorgum yang punya keunggulan berhadapan dengan kekeringan dan curah hujan yang kurang. Sorgum ini bisa hidup dengan air yang kurang dan bisa dipanen selama tiga kali setahun. Panen ketiga jatuh pada bulan Oktober yang merupakan puncak musim kemarau.

Dari proses mengenal iklim, kami memfasilitasi petani untuk mengembangkan pertanian adaptif kekeringan pada dua musim, yakni musim kemarau dan musim hujan.

1) Musim kemarau:

Salah satu indikator yang kami gunakan adalah ketersediaan sayuran segar di musim kemarau yang kering. Indikator ini menjadi dugaan kami tentang tingginya angka anak-anak stunting di kabupaten Flores Timur (20,9% pada Agustus 2021).

Dalam belajar beradaptasi dengan iklim, kami melatih para petani di desa untuk membangun kebun pangan di musim kemarau untuk menanam tanaman sayur-sayuran.

Tantangan kami adalah air yang kurang di desa. Dengan tantangan ini, kami melatih para petani untuk bertani tanaman pangan jenis sayur di halaman rumah. Masalah air diatasi dengan dua cara adaptasi, yakni menyesuaikan ketersediaan air dengan luas kebun dan jenis tanaman yang ditanam dan penggunaan mulsa organik untuk mengurangi penguapan air. Petani dilatih menggunakan mulsa dan memilih jenis tanaman yang bisa bertumbuh dan dipanen hanya dengan air yang terbatas.

2) Musim hujan:

Bertani adaptif di musim hujan dilakukan di kebun-kebun yang lebih luas. Air yang diandalkan untuk tanaman adalah air hujan yang tentu sangat terbatas. Menghadapi kendala kurang hujan ini, petani kami fasilitasi untuk:

- a. Di setiap kebun wajib ditanami tanaman-tanaman hijauan jenis legum seperti

gamal.

- b. Kebiasaan petani membakar sisa bahan organik di kebun jelang masa tanam ditiadakan. Ketika siap tanam, petani merapikan ladangnya, dan tanah ladang ditutupi mulsa dari bahan organik yang tidak dikabar dan mengambil dari daun-daun legum di kebun. Untuk menanam, cukup membuka jalur tanam yang disesuaikan dengan setiap jenis tanaman yang akan ditanami.
- c. Kebun ditanami dengan tanaman-tanaman yang adaptif dengan kekeringan dan kekurangan hujan. Padi, jagung, ubi-ubian, kacang dan sorgum.
- d. Mulsa penutup tanah memiliki 4 fungsi yang sangat ramah iklim:
 - Jika turun hujan, mulsa menahan terpaan air hujan sehingga tidak mengalir pergi membawa humus tanah, tetapi meresap ke dalam tanah. Karena itu, tanah ladang menyimpan banyak air hujan.
 - Mulsa akan mengurangi penguapan air saat panas matahari. Dengan demikian tanah ladang akan tetap lembab walau beberapa hari tidak turun hujan.
 - Mulsa akan menghambat tumbuhnya gulma. Salah satu pekerjaan terberat petani adalah ongkos yang tinggi untuk pembersihan gulma dari kebun.
 - Di akhir musim, mulsa kebun akan lapuk dan menambah lapisan humus tanah sehingga tanah akan tetap subur untuk tahun berikutnya.
- e. Tanaman-tanaman legum yang ditanam di kebun, daunnya akan digunakan sepanjang musim hujan sebagai mulsa untuk menunjang empat fungsi mulsa seperti disebutkan di atas.

Pelajaran

Proses belajar yang Panjang bersama masyarakat tentang membangun ketangguhan menghadapi bencana akhirnya sampai juga pada hal-hal praktis terkait mata penghidupan yang terhubung dengan iklim.

Pengetahuan dan teori yang rumit tentang perubahan iklim dan dampak-dampak lokal, lebih mudah didiskusikan di komunitas melalui pendekatan-pendekatan lokal. Salah satu pendekatan adalah mata penghidupan. Hal yang menjadi

perhatian semua orang. Dengan demikian, Tindakan adaptasi dan mitigasi, sedapat mungkin terhubung dengan kebutuhan-kebutuhan local dan menjadi praktek lokal adaptasi dan mitigasi iklim.

6

RISET AKSI PETANI : BELAJAR DAN MELAKUKAN AKSI ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM

FIELD BUMI CERIA

Siang itu, serombongan ibu petani berjalan menuju ke sebuah rumah tua yang kosong. Nampak dua daun jendela khas jaman dulu terbuka lebar yang menghantarkan cahaya masuk ke ruangan yang ada di rumah tua yang dingin itu. Terdapat dua ruangan di dalamnya, satu ruang keluarga berukuran 3 x 5 meter dan satu lagi dulunya digunakan sebagai gudang. Meskipun dindingnya sudah berlumut, hari itu ruang keluarga tersebut kelihatan bersih dan tidak pengap karena udara leluas keluar masuk melalui jendela yang terbuka tadi. Beberapa tikar digelar di lantai ruangan itu. Ada 'benda asing' berupa segulung kertas plano, alat tulis seperti spidol, lakban, dan penggaris tergeletak di ruangan itu. Di rumah tua yang tidak ditempati lagi sejak gempa bumi Sumatra Barat tahun 2009 ini sebanyak 20 perempuan berkumpul dan berdiskusi secara rutin setiap Rabu dan Sabtu mulai pukul setengah dua siang hingga menjelang petang. Mereka adalah sekelompok warga Korong Kampuang Surau dan Padang Lapai di Nagari Guguk, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, yang sedang melakukan riset atau penelitian tentang kondisi nagari dan masyarakat di wilayahnya. Kegiatan ini mereka namakan riset aksi petani, karena setelah selesai penelitian, ibu-ibu petani tersebut bersama warga lain di nagari ini akan melakukan upaya pemecahan atau mencari solusi dari permasalahan yang ditemukannya.

Dalam suasana pertemuan yang ceria itu, nampak Ibu Yulianti (40) berdiri di salah satu sudut ruangan memandu proses diskusi peserta pertemuan. Meskipun sedang hamil 8 bulan, Ibu Yulianti tetap energik dalam memfasilitasi proses diskusi yang

penuh dengan lalulalang komentar, pendapat, pertanyaan, sanggahan, maupun candaan yang muncul dari peserta lain setiap satu peserta selesai mempresentasikan hasil diskusi kelompok kecilnya. Hasil diskusi mereka dituangkan dalam kertas plano yang ditempel di dinding ruangan itu. Tepuk tangan sesekali mewarnai suasana diskusi itu. Suasana menjadi semakin ceria ketika Ibu War (49), yang akrab dipanggil Tek War oleh para peserta, menyuguhkan kue dan makanan ringan lainnya kepada para peserta diskusi. Selesai presentasi dan diskusi pleno, Ibu Yuliati mengajak peserta pertemuan menentukan isu dominan di nagarinya. Isu dominan adalah isu yang paling dirasakan dan dipahami oleh sebagian besar warga nagari. Peserta pertemuan diajak melihat kembali 25 isu yang sudah terkumpul sebelumnya, untuk kemudian berdiskusi menetapkan 1 isu yang paling berdampak terhadap masyarakat di nagarinya dan menyumbang terhadap terjadinya bencana dan perubahan iklim. Bila nantinya isu dominan sudah ditetapkan dan disepakati, mereka akan menindaklanjutinya dengan melakukan pencarian data dan informasi pelengkap ke lapangan.



Foto Kegiatan riset dilakukan oleh para petani sendiri untuk mengetahui dan memahami permasalahan dan situasi yang dialami dan dihadapi dalam lingkungan kehidupan dan pekerjaan mereka.

Agar diperoleh dasar dalam melakukan pencarian data dan informasi pelengkap tersebut, terlebih dahulu para peserta mengurai isu dominan terpilih. Mereka saling mengungkapkan pendapat apa sebab isu itu muncul dan apa akibat yang akan ditimbulkannya bagi warga di nagari. Mereka melakukan hal ini untuk mempertajam pemahaman mereka terhadap mengapa penting untuk menindaklanjuti isu ini dan mendorong diri mereka sendiri untuk tertarik dan aktif dalam melakukan penelitian. Para peserta riset aksi petani ini akhirnya menyepakati isu dominan di nagarinya adalah soal “kebiasaan masyarakat membuang sampah di bandar air”. Menurut pandangan para peserta, perilaku masyarakat di nagarinya dalam membuang sampah di bandar air ini sudah sangat meresahkan. Tumpukan sampah yang mereka buang menyumbat saluran air dan mengakibatkan banjir. Ibu Yuliati dan Ibu War pun menambahkan bahwa, banjir telah menelan korban satu jiwa meninggal dunia karena jatuh ke bandar air bersama motornya saat melintasi jalan yang tergenang air banjir. Tumpukan sampah juga menyumbat aliran air ke sawah. Kalaupun air bisa masuk ke sawah, sampah-sampah anorganik seperti plastik pun ikut masuk dan tertimbun di tanah sawah. Diskusi para peserta menghangat ketika mereka terus menggali hal-hal terkait akibat sampah yang ada disaluran air. Menurut mereka, pencemaran air dapat menimbulkan diare, demam berdarah, gatal-gatal, dan penyakit kulit. *“Apa sebab isu itu muncul?”* pancing Ibu Yuliati. Sembari melihat ke teman-temannya di ruangan itu, Ibu Len akhirnya bersuara, *“Masyarakat resah setelah terjadi penumpukan sampah, kemudian belum adanya pengetahuan dan ketrampilan dan perilaku mengolah sampah untuk dijadikan sesuatu yang bermanfaat. Kelihatannya ingin gampang saja, daripada mengolahnya, mereka buang saja ke bandar air...”* yang disambut dengan tawa oleh para peserta. *“Itu perilaku saya juga kayak gitu,”* kata beberapa peserta yang merasa bahwa mereka pun juga melakukan hal semacam itu. Salah seorang peserta lain pun meresponnya, *“Ya, itulah mengapa kita ikut Sekolah Lapangan riset aksi petani ini.”* Pada pertemuan berikutnya, ibu-ibu peneliti ini melakukan riset ke sebuah Sekolah Dasar yang ada di Nagari Guguk, yaitu SDN 08 Pasa Surau, untuk melakukan wawancara dengan kepala sekolah dan guruguru di sana. Mereka mendapatkan data bahwa ada 163 orang murid sekolah dasar yang bersekolah di sana laki-laki 95 orang dan perempuan 68 orang. Jumlah

guru ada 8 orang, terdiri 1 guru laki-laki dan 7 orang guru perempuan. Murid-murid sebanyak itu membeli jajanan pada penjual jajanan keliling dan warung-warung kecil di sekitar sekolah yang tidak menyediakan tempat sampah. Sampah yang dihasilkannya pun menumpuk dan biasanya dibersihkan oleh petugas ebersihan sekolah dengan cara membakar atau dibuang. Jenis sampah yang banyak dibuang adalah sampah plastik pembungkus jajanan. Ibu kepala sekolah mengatakan, *“Sekarang ini jarang ada jajanan di sekolah yang memakai pembungkus dari bahan alami seperti daun pisang. Yang banyak adalah makanan yang dibungkus dengan plastik. Kalau setiap hari dikumpulkan, maka sudah sangat banyak sampah itu.”* Selama ini menurutnya, tidak pernah terpikirkan bagaimana masalah sampah di sekolah. Dengan kedatangan ibu-ibu peserta Sekolah Lapangan ke sekolah ini dan melakukan wawancara kepada pihak sekolah, muncul ide dari kepala sekolah untuk membahas isu sampah di sekolah ini dengan guru-guru yang ada di sekolah ini.

Setelah selesai melakukan wawancara ke sekolah tadi, ibu-ibu kembali berkumpul dan menganalisis hasil

penelitian mereka. Dari situ kemudian muncul pertanyaan-pertanyaan. Dengan melihat besarnya jumlah

sampah plastik pembungkus jajanan di sekolah, muncul pertanyaan pengembangan dari diskusi hasil

analisis data lapangan mereka, yaitu: - Apakah pernah ada siswa sekolah yang mengalami sakit dan sering tidak masuk sekolah? - Kalau ada, biasanya penyakit apa yang dialami? Para peserta akan mencari apakah ada hubungan antara penyakit yang sering diderita oleh siswa Sekolah Dasar tersebut dengan sampah dan jajanan yang biasa mereka konsumsi. Kemudian mereka sepakat untuk melakukan penelitian juga ke Puskesmas untuk mencari tahu:

- Siapa saja yang sering berobat ke rumah sakit.
- Penyakit apa saja yang biasanya paling banyak dikeluhkan.
- Berapa orang yang terserang.
- Kalau ada, siapa yang sering terserang. Apakah anak-anak, ibu-ibu, bapak-

bapak, lansia, wanita hamil, dan lain-lain.

Semua itu untuk melengkapi data dan informasi tentang isu sampah di nagarinya dan bagaimana peserta Sekolah Lapangan ini merencanakan untuk membahas hasil temuan lapangan mereka dengan pihak pemerintahan nagari, sekolah, Puskesmas, maupun dinas kesehatan. [FBC]

7

MITIGASI BENCANA TSUNAMI OLEH KOMUNITAS DESA KEMBANG

RUMAH ZAKAT

Pacitan merupakan salah satu dari 38 kabupaten yang ada di provinsi Jawa Timur. Kabupaten Pacitan terletak di antara 110,55° - 111,25° BT 7,55° - 8,17° LS Kabupaten Pacitan memiliki 12 kecamatan, 5 kelurahan dan 166 desa. Desa Kembang merupakan salah satu bagian dari Kecamatan Pacitan dengan luas wilayah desa adalah 416.230 Ha. Desa ini terletak 4 km dari pusat pemerintahan Kecamatan Pacitan. Desa Kembang terdiri dari lima Dusun, lima RW (Rukun Warga) dan lima belas RT (Rukun tetangga). Sebagian besar wilayah Desa Kembang adalah dataran, secara agraris tanah sawah juga relatif luas sebagai lahan penanaman untuk tanaman semusim. Adapun batas-batas daerah Desa Kembang yaitu:

- Sebelah utara : Desa Sirnobojo
- Sebelah selatan : Desa Plumbungan
- Sebelah barat : Kelurahan Ploso
- Sebelah timur : Desa Sukoharjo

Desa Kembang memiliki potensi ancaman Tsunami pantai selatan Pulau Jawa, hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) di beberapa kesempatan. Desa Kembang terletak paling dekat dengan muara sungai Grindulu yang berbatasan langsung dengan laut. Selain itu, banjir juga merupakan bentuk ancaman bencana lainnya yang ada di Desa Kembang. Pada tahun 2017 banjir besar disebabkan oleh curah hujan tinggi mengakibatkan

volume air sungai meningkat dan memasuki area pemukiman warga. Hal ini diperburuk juga dengan kurang baiknya drainase aliran air serta longsor yang juga turut menyebabkan material tanah, kayu, air dan batu turun, sehingga komplekslah bencana yang terjadi.



Foto : Mangrove untuk upaya mitigasi bencana tsunami oleh masyarakat Desa Kembang di Selatan Jawa

Menyikapi kondisi geografis yang demikian, Rumah Zakat bersinergi dengan semua stakeholder yang ada mengajak masyarakat Desa Kembang meningkatkan tingkat kesadarannya dengan pengetahuan kebencanaan, mulai dari pemetaan desa, mengklasifikasikan penduduk berdasarkan tingkat usia, petunjuk arah evakuasi, simulasi evakuasi mandiri, pertolongan pertama gawat darurat, hingga pada aksi yang dilakukan saat tanggap darurat. Bentuk pemetaan desa dilakukan melalui *Focus Group Discussion* (FGD) bersama masyarakat dan pemerintah setempat sehingga melahirkan dokumen ketangguhan desa. sehingga sebelum bencana terjadi masyarakat paham apa yang mereka lakukan untuk mengurangi dampak bencana, saat bencana terjadi masyarakat tahu harus kemana dan melakukan apa. Masyarakat juga memiliki Tas Siaga yang berisi dokumen penting, pakaian serta makanan dan minuman yang akan dibawa ketika terjadi bencana. Di Desa Kembang terdapat 2.602 jiwa, yang terdiri dari 1.300 orang perempuan dan 1.302 orang

laki-laki. Dari jumlah penduduk ini terdapat 598 kelompok lansia. Angka ini cukup besar dalam situasi bencana.

Pelatihan pertolongan pertama gawat darurat yang dilakukan dimulai dari cara mengidentifikasi korban, penanganan luka/cedera hingga cara memobilisasi korban ke tempat aman atau ke rumah sakit terdekat. Sehingga jika ada warga yang cedera dan butuh pertolongan, warga yang dilatih ini mampu dan bisa menyelamatkan nyawa korban sebelum petugas medis datang ke lokasi. Dengan adanya pelatihan pertolongan pertama ini, tingkat resiko yang ditimbulkan saat bencana terjadi menjadi berkurang, karena sebelum bencana terjadi masyarakat paham apa yang mereka lakukan, saat bencana terjadi masyarakat tahu harus kemana dan melakukan apa. Ditambah lagi masyarakat dipandu dengan adanya peta evakuasi yang sudah disosialisasikan dan ditempel di setiap rumah warga. Tidak hanya itu peta evakuasi ini juga terpasang di beberapa tempat strategis. Plang petunjuk arah evakuasi hingga ke tempat kumpul sementara saat terjadi bencana pun sudah terpasang. Selain itu, terdapat early warning system yang dibuat sebagai pertanda adanya bahaya yang mengancam. Early warning system ini dirancang dan didirikan di perbatasan desa Sirnobojo dan Desa Kembang. Early warning system ini tidak hanya digunakan saat terjadi bencana saja, untuk memperkenalkan pola kerjanya, masyarakat juga dilatih dalam bentuk simulasi bencana.

Masyarakat Desa Kembang memiliki kearifan lokal yang membuat masyarakat semakin kompak. Selain early warning system yang terletak diantara dua desa, mereka juga membudayakan alat tradisional "kentungan" yang digunakan untuk memberikan peringatan dini kepada masyarakat jika akan terjadi bencana. Hampir setiap rumah memilikinya, sehingga saat bencana terjadi atau bahkan dalam simulasi, bunyi kentungan ini akan saling bersahutan. Dalam beberapa kesempatan, masyarakat juga menggunakan alat lain yaitu pengeras suara di masjid/mushalla. Desa Kembang memiliki lumbung pangan dengan luas lahan sawah sebesar 112 Ha yang berfungsi sebagai bahan pangan dalam keadaan darurat. Sebagian masyarakat juga memiliki hewan ternak yang berjumlah kurang

lebih 1.000 ekor berupa sapi dan kambing. Dalam situasi darurat, masyarakat Desa Kembang juga sudah teruji untuk mendirikan dapur umum, bukan hanya untuk memberikan pasokan makanan kepada masyarakat Desa Kembang sendiri, juga turut membantu masyarakat desa lainnya juga yang terkena bencana.



Foto : Kunjungan ibu Kofifah (Gubernur Jawa Timur) ke wilayah Watumejo Watumejo Park, Desa Kembang

Saat ini, Desa Kembang sedang mengembangkan area yang bernama Watumejo Watumejo Park. Di kawasan ini, selain untuk melestarikan mangrove, juga mengedukasi masyarakat bahwa memperbaiki lingkungan menjadi faktor utama dalam mengurangi risiko bencana. Sehingga pengunjung yang datang akan mendapat bibit mangrove untuk ditanam, baik di lokasi Watumejo Mangrove Park nya atau pun di tempat lain. Mangrove yang digunakan untuk penahan atau pemecah gelombang tinggi dari laut, dimanfaatkan juga untuk pariwisata. Tentu ini menjadi nilai plus yang dapat dirasakan oleh masyarakat, yaitu bertambahnya penghasilan masyarakat. Konsep Watumejo Mangrove Park ini di-*inline*-kan perahu masyarakat Desa Kembang yang biasa mereka gunakan untuk melaut. Tidak cukup sampai disitu, pengunjung akan disugahi dengan budidaya tambak udang dan tambak ikan bandeng. Ini merupakan bentuk pendampingan yang dilakukan oleh Rumah Zakat dalam mengedukasi bencana kepada masyarakat pesisir, tidak hanya tangguh bencana, namun tangguh juga ekonomi masyarakatnya.

8

TIM SIAGA BENCANA DESA : KATALISATOR KETANGGUHAN DESA DALAM PENGURANGAN RISIKO BENCANA BERBASIS KOMUNITAS DI KAWASAN SEMBALUN

RIZWAN RIZKIANDI : KONSORSIUM UNTUK STUDI DAN PENGEMBANGAN PARTISIPASI (KONSEPSI) NTB

Sembalun merupakan nama sebuah daerah dataran tinggi di Pulau Lombok, letaknya di sebelah timur laut Pulau Lombok di ketinggian sekitar 1.200 meter dari permukaan laut (mdpl), serta menjadi bagian dari kawasan gunung berapi, yakni Gunung Rinjani (3.726 mdpl). Secara administratif pemerintahan, daerah Sembalun terdapat di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sembalun dapat dijangkau dengan kendaraan motor dan mobil beroda empat. Jaraknya sekitar 35 km dari ibu kota Kabupaten Lombok Timur, yaitu Kota Selong dan dari ibu kota provinsi di Mataram sekitar 114 km melalui jalur selatan hingga ke salah satu desa di dataran ini, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun. Kondisi topografi Sembalun dikelilingi oleh bukit-bukit dengan puncak tertinggi di Gunung Rinjani dimana terdapat Danau Segara Anak. Beberapa dari bukit tersebut merupakan kawasan hutan rimba dan kawasan padang ilalang. Dari antara lereng bukit terdapat mata air dan sungai yang airnya mengalir dan menjadi sumber mata air penduduk di Pulau Lombok.

Kawasan Sembalun termasuk wilayah berisiko tinggi dari ancaman sejumlah potensi bencana alam. Secara obyektif, letak dan posisi kawasan ini berada persis di kaki Gunung Rinjani sehingga sangat berpotensi menjadi wilayah terpapar gunung meletus. Dalam sejarahnya, Gunung Rinjani telah meletus sebanyak sembilan kali selama rentang waktu antara tahun 1847-2004 terutama di kisaran

kalderanya. Banjir dan tanah longsor juga selalu mengancam setiap saat karena perbukitan semakin kritis dan tandus akibat dari maraknya penebangan pohon di Kawasan Hutan Gunung Rinjani. Tahun 2006, hantaman banjir bandang telah membawa korban jiwa (meninggal, luka-luka) dan kerugian lain hingga milyaran rupiah. Pada kejadian serupa 2012, bencana banjir bandang tidak sampai menelan korban jiwa dan besarnya kerugian dapat diminimalisir.

Tahun 2012, kondisinya telah jauh berbeda sebagaimana diungkapkan oleh salah seorang pengurus Tim Siaga Bencana Desa (TSBD): "Tahun 2012 sudah terbentuk TSBD sehingga kalau ada tanda-tanda akan terjadi bencana kami segera menyiapkan masyarakat dengan melakukan peringatan dini terutama jika hujan terus menerus disertai awan hitam pekat. Masyarakat kita minta untuk mempersiapkan diri. Kami sudah memiliki prosedur kerja yang menjelaskan peran masing-masing anggota sehingga kami tahu apa yang harus dilakukan."

Ketangguhan PRBBK ; Mengenali Ancaman, Mengurangi Kerentanan, Meningkatkan Kapasitas

Ikhtiar membangun ketangguhan masyarakat tampaknya mulai menunjukkan hasil jika berkaca dari perbedaan dinamika sosial pada dua kejadian bencana Tahun 2006 dan Tahun 2012. Di tingkat individu, setiap orang makin menyadari adanya resiko bencana sehingga budaya kesiap-siagaan untuk menghadapinya tumbuh dari hari ke hari. Sosialisasi dan penyadaran melalui berbagai media dan forum (poster, pamflet, khutbah jum'at) cukup efektif menggugah kesadaran masing-masing individu. Diharapkan, pengetahuan ini selalu 'terdistribusi' dari satu individu ke individu lainnya dalam keseharian mereka baik di tingkatan rumah tangga maupun unit sosial lainnya.

Penguatan kapasitas kesiap-siagaan individu yang relatif beragam ini diperkuat dengan keberadaan sebuah institusi sosial, yakni Tim Siaga Bencana Desa (TSBD) untuk menjamin agar 'benih-benih ketangguhan' sebagaimana istilahnya seorang Praktisi Bencana bisa tersemaikan menjadi 'budaya tangguh' dalam kehidupan

sosial (keseragaman). Cerita seputar kejadian banjir bandang Sembalun tahun 2012 tersebut telah menarik perhatian Pemerintah Daerah terhadap inisiasi setempat khususnya keberadaan TSBD. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lombok memandang pentingnya keberadaan lembaga siaga bencana tersebut dalam upaya mendorong aksi nyata PRB di level desa. BPBD telah memfasilitasi terbentuknya TSBD di 4 (empat) desa lain dengan mengambil pembelajaran dari proses pembentukan TSBD pada lokasi program pada tahun 2015. Selain itu, TSBD mendapat pengakuan hukum sebagai satu bentuk partisipasi masyarakat melalui pengaturan dengan pasal tersendiri di dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Bencana di Kabupaten Lombok Timur.



Foto : Pelatihan kesiapsiagaan bencana untuk Tim Siaga Bencana (Foto dokumen penulis)

Hingga tahun 2021, pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta dukungan para pihak telah bekerjasama dalam mengembangkan pengurangan risiko bencana berbasis komunitas (PRBBK) di desa-desa yang ada di Lombok Timur, khususnya pembentukan Tim Siaga Bencana Desa (TSBD) di kawasan yang rawan bencana. Hal

ini tentu upaya untuk replikasi praktik baik PRBBK yang tumbuh dan berkembang di Sembalun, Lombok Timur.

Ujian Ketangguhan : Guncangan Gempa 7.0 SR - Lombok 2018

Pada Juli - Agustus 2018, Pulau Lombok diguncang gempa bumi beruntun 6.9 SR hingga 7.0 SR. Gempa yang terjadi pada tahun 2018 tersebut menyebabkan wilayah Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Utara terdampak, termasuk Sembalun sebagai salah satu kecamatan di Lombok Timur yang terkena dampak paling parah. Kejadian gempa Lombok 2018 yang pusatnya di Sembalun mengakibatkan kerusakan infrastruktur bangunan termasuk pemukiman masyarakat, bahkan kerugian korban jiwa. Terdapat 10 orang meninggal di wilayah Sembalun.

Tim Siaga Bencana Desa (TSBD) yang terdapat di Sembalun Bumbung dan Sembalun Lawang merupakan kelompok relawan pengurangan risiko bencana berbasis komunitas (PRBBK) yang terlibat langsung dalam melakukan respons bencana. Tentu ini menjadi ujian ketangguhan terhadap masyarakat di kawasan Sembalun, khususnya peran TSBD dalam merespons bencana yang terjadi. Gempa 2018 ini menjadi pengalaman pertama TSBD dalam menghadapi bencana gempa besar selama 10 tahun terbentuk.

Kejadian bencana ini menjadi sebuah pembelajaran penting bagi proses pembangunan ketangguhan desa di kawasan Kaki Rinjani, Sembalun. Pada masa tanggap darurat bencana gempa ini menjadi ruang untuk menerapkan kapasitas TSBD yang kaitannya dengan evakuasi dan pertolongan pertama, assessment korban dan kebutuhan pengungsi, distribusi logistic serta tindakan-tindakan pendukung dalam masa tanggap darurat.

Peristiwa ini jelas terekam sebagai bagian dari sejarah dalam merawat ketangguhan masyarakat di Sembalun. TSBD yang berperan sebagai *leading sector*

penanggulangan bencana di tingkat desa mendapatkan suatu pembelajaran baru dalam memahami kapasitas komunitas dalam merespons dan mengantisipasi bencana yang sama jika terjadi pengulangan kejadian ke depan. Upaya memperkuat peran TSBD dalam rangka membangun ketangguhan desa tentu menjadi keniscayaan atas kejadian bencana gempa yang menimpa Lombok, khususnya kawasan Sembalun. Gempa bumi Lombok menambah deretan kejadian bencana di wilayah Sembalun, yang selama ini terbiasa menghadapi bencana alam seperti banjir, longsor, erupsi gunung api, kebakaran hutan, pohon tumbang serta puting beliung.

Jejaring Respons Kemanusiaan

Pengurangan risiko bencana berbasis komunitas (PRBBK) menjadi suatu perspektif dan metodologi praktik dalam penanggulangan bencana yang melibatkan masyarakat secara langsung. PRBBK memiliki ciri visi penyelamatan hidup dan penghidupan berkelanjutan: *Disaster Risk Management* (DRM) sebagai “*public goods*” dan hak-hak asasi manusia. Sehingga hal ini tentu akan membuka ruang kerja kolaboratif dalam merespons bencana yang terjadi di lintas kawasan sebagai upaya untuk menjamin hak-hak asasi manusia di masa pra-bencana, tanggap darurat dan pasca-bencana.

TSBD yang terdapat di 2 (dua) desa, yakni Sembalun Bumbung dan Sembalun Lawang melaksanakan respons kebencanaan yang terjadi di berbagai kawasan di Nusa Tenggara Barat secara umum, khususnya di wilayah yang terdampak bencana di Lombok. Tidak sedikit keterlibatan TSBD dalam merespons bencana dalam rangka memperkuat peran komunitas sebagai bagian dari organisasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan di masa tanggap darurat.

Tentukan langkah respons cepat TSBD, khususnya dalam menggalakkan bantuan moril dan materil pada korban bencana untuk memenuhi kebutuhan hidup para korban, membuka ruang untuk komunitas berjejaring dengan berbagai pihak terutama secara khusus masyarakat lokal yang di Sembalun dapat berpartisipasi dalam bergotong royong membantu sesama. Jejaring respons kemanusiaan pada

korban bencana, seperti ketika terjadi gempa Lombok 2018 yang berpusat di Lombok Utara, bencana banjir bandang dan kebakaran pemukiman masyarakat di Bima, hingga bencana banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Lombok Barat pada Desember 2021, TSBD yang ada di Sembalun sebagai bagian dari organisasi pengurangan risiko bencana berbasis komunitas telah menunjukkan kekuatan dari sebuah kepedulian dan semangat gotong royong dalam membangun ketangguhan secara kolaboratif. Maka tentu ini menjadi suatu praktik baik dalam mengembangkan desa tangguh bencana melalui pengurangan risiko bencana berbasis komunitas (PRBBK). Kerja-kerja berjejaring mulai tumbuh dalam tubuh komunitas TSBD yang

Regenerasi & Keberlanjutan Ketangguhan Desa Berbasis PRBBK

Sejak terbentuk pada 2010 - 2021, Tim Siaga Bencana Desa (TSBD) yang ada di Sembalun Bumbung dan Sembalun Lawang tumbuh dan berkembang di bawah peran pengelolaan masyarakat yang secara usia sudah masuk dalam tahap pralanjut usia. Tentu kondisi fisik dan produktivitas para pengurus TSBD yang lama tak lagi sama dengan kondisi ketika awal di bentuk TSBD karna 10 tahun yang lalu masih dalam keadaan tergolong energik untuk bergerak guna pengurangan risiko bencana di tingkat desa.

Pada 2021, upaya untuk menyegarkan kepengurusan TSBD mulai digaungkan oleh para sesepuh, dengan melibatkan kalangan muda. Bahkan generasi ke-2 (dua) Tim Siaga Bencana Desa (TSBD) Sembalun Lawang dan Sembalun Bumbung merupakan anak-anak dari pengurus TSBD yang lama. Tentu hal ini menjadi catatan penting, bahwa ketangguhan itu mampu diwariskan oleh para orang tua yang telah melewati fase perjuangan dalam pengurangan risiko bencana berbasis komunitas (PRBBK) di tingkat desa.

Regenerasi yang lahir dari inisiasi diasaskan pada semangat gotong royong dan musyawarah pada tingkat TSBD ini menjadi suatu hal baik yang senantiasa akan

menjadi nilai-nilai yang melekat dalam setiap generasi penerus TSBD dalam upaya penanggulangan bencana di tingkat desa. Desember 2021 merupakan tahun yang membuka angin segar bagi keberlanjutan ketangguhan desa dalam menghadapi bencana di Sembalun Bumbung dan Sembalun Lawang. Hal tersebut tentu pasca terlibatnya kalangan muda yang memiliki spirit kerelawanan dalam membangun ketangguhan di desa.

Berbagai pencapaian perubahan yang signifikan pun dapat diraih oleh TSBD setelah para kalangan muda terlibat dalam tubuh komunitas. Perubahan dan pencapaian baik yang terjadi yakni TSBD di 2 (dua) desa mampu melakukan advokasi terhadap kebijakan penanggulangan bencana desa, yakni Pemerintah Desa Sembalun Lawang dan Sembalun Bumbung memperkuat kerangka penanggulangan bencana di level desa melalui produk hukum desa yakni Peraturan Desa tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat. Di sisi lain sekaligus diakuinya Tim Siaga Bencana Desa (TSBD) Sembalun Bumbung dan Sembalun Lawang masuk menjadi bagian kelembagaan desa yang bergerak dalam penanggulangan bencana di level desa.

Keterlibatan generasi muda dalam komunitas penanggulangan bencana desa yang berbasis kerelawanan menjadi harapan baru dalam keberlanjutan ketangguhan masyarakat desa dalam menghadapi ancaman bencana yang ada. Motivasi kalangan muda serta spirit untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan di desa menjadi nilai lebih proses penanggulangan bencana berbasis komunitas.



Foto : Musyawarah besar pemilihan ketua Tim Siaga Bencana Desa (TSBD) bentuk keberlanjutan dan regenerasi (Foto dokumen penulis)

Tentu, Tim Siaga Bencana Desa (TSBD) sebagai organisasi yang berperan dalam pengurangan risiko bencana berbasis komunitas (PRBBK) telah memberikan bukti adanya perubahan dalam menyemai ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana. Namun, sekali lagi bahwa ketangguhan bukan hanya kerja-kerja eksklusif dari satuan organisasi tertentu, namun harus mampu menekankan kerja-kerja inklusif yang terintegrasi dan berkolaborasi sehingga ketangguhan yang diraih adalah nilai kekuatan dari persatuan dan kesatuan secara sadar serta keswadayaan berbagai pihak untuk saling memberikan dukungan satu sama lain.

Tim Siaga Bencana Desa (TSBD) Sembalun Bumbung dan Sembalun Lawang telah menjadi satu bingkai bukti praktik pengurangan risiko bencana berbasis komunitas (PRBBK) yang mampu memberikan nuansa ketangguhan itu lahir dan bertumbuh dalam menghadapi kompleksitas ancaman bencana yang di Sembalun secara khusus. Selain itu adanya penekanan pada kerja-kerja kolaborasi lintas kawasan, lintas sektor dan lintas lembaga guna merawat dan meningkatkan ketangguhan secara kolektif untuk desa dan masyarakat yang tangguh bencana.

9

KETANGGUHAN KOMUNITAS DI TANAH MANOKWARI

OXFAM DAN PERDU MANOKWARI PAPUA BARAT

Membaca Alam Menjinakkan Bencana di Manokwoari

Sabtu sore, 17 Februari 1996. Gempa tektonik besar mengguncang sejumlah wilayah pulau paling timur di Indonesia. Epicentrum tercatat di 101 km timur laut Biak, Papua, dengan kedalaman 33 km dan diikuti gelombang tsunami yang merambat ke segala arah. Pantai Manokwari yang terletak di sebelah baratnya juga dilanda tsunami hingga empat meter. Meski jatuh banyak korban di pusat gempanya, namun Manokwari sendiri berhasil selamat dari kerugian yang besar.

Minggu dini hari, 4 Januari 2009. Guncangan gempa berturut-turut menggoyang daerah kepala burung, Papua Barat, dengan gempa utama pada pukul 5,33 waktu setempat, sebesar 7,6 skala richter. Gempa terjadi di bibir pantai dengan tsunami setinggi 78 cm bergerak mendekat ke Manokwari. Jumlah korban meninggal di Manokwari 1 orang, 3 luka berat, dan belasan ribu orang diungsikan ke puluhan lokasi pengungsian.

Gempa memang menjadi hal yang umum bagi masyarakat Manokwari. Daerah itu dan sekitarnya merupakan daerah pertemuan empat lempeng bumi sekaligus, yakni Australia, Eurasia, Pasifik dan Filipina. Gempa yang terjadi di Manokwari umumnya dipicu pergeseran kerak benua yakni lempeng Australia dan kerak lautan berupa lempeng Pasifik. "Bila energi sudah dilepas dalam bentuk getaran-getaran, maka akan tenang lagi secara alamiah. Namun karena dinamis, dia akan kembali tertimbun, dan suatu saat akan dilepas lagi," demikian pernyataan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

Jadi jelas, ancaman serius gempa dan tsunami berbagai skala mengintai Manokwari setiap saat. Hebatnya, meski berulang kali diterjang bencana,

umumnya tidak menimbulkan banyak korban jiwa di Manokwari. Sudah tangguhkah mereka dalam menghadapi bencana?



Foto : Simulasi bencana tsunami, belajar dari pengalaman untuk membiasakan terhadap alam (Dokumen Perdu, Manokwari)

“Pengalaman empiris yang berulang, dan pemahaman bahwa mereka tinggal di daerah pesisir yang notabene rawan bencana, membuat mereka membangun semacam *coping mechanism*,” ungkap Fredy Chandra, staf Oxfam untuk Program Membangun dan Memperkuat Ketangguhan terhadap Bencana di Indonesia Timur, di Manokwari.

Keadaan dimana mereka berkali-kali menghadapi bencana, membuat mereka semakin peka terhadap perubahan alam yang terjadi dan umumnya ada sesaat sebelum bencana gempa dan tsunami datang. “Biasanya ada ikan paus yang terdampar ke pantai, cuaca yang tiba-tiba terasa panas dan menyengat, atau arus laut yang mendadak sangat kencang,” Fredy menceritakan kembali apa yang diungkapkan masyarakat.

Meskipun belum ada penelitian yang mengesahkan kejadian-kejadian tersebut sebagai penanda gempa dan tsunami, namun masyarakat Manokwari sangat meyakinkannya sejak lama.

Tidak hanya pemahaman terhadap tanda-tanda gempa dan tsunami yang mereka pelajari dari nenek moyang. Cara menghadapi bencana pun diteruskan secara

lisan dari satu generasi ke generasi lain. Fredy mengisahkan pemandangan yang dilihat sebagian masyarakat Manokwari saat terjadi gempa dan tsunami di tahun 2009 dan terakhir, 2011.

Di saat sebagian besar masyarakat yang terdiri dari ibu dan anak menyelamatkan diri ke daerah bukit yang lebih tinggi, banyak nelayan justru berbaris rapi mengarahkan perahu mereka ke laut. "Mereka tahu dengan begitu, perahu mereka akan selamat dari hempasan tsunami. yang akan menimpa kawasan pantai tempat perahu-perahu itu biasa bersandar," jelasnya soal kearifan lokal masyarakat Manokwari yang 80 persen tinggal di daerah pesisir dan bergantung sebagian besar pendapatannya dari melaut.

Upaya penyelamatan aset berharga mereka itu tidak dipelajari dari televisi, melainkan secara turun temurun. Ditambah lagi pengetahuan lokal mengenai cara menghentikan pendarahan dengan menggunakan tanaman obat yang tumbuh di sekitar mereka, misalnya. Ini setidaknya membuat mereka bisa mengurangi ancaman jatuhnya nyawa, akibat kemungkinan tidak bisa segera mengakses pertolongan medis dan rumah sakit, saat terjadi bencana.

"Lalu ada pola berkebun mereka yang dikenal dengan nama *igyaser hanjop*, yang mengatur cara mereka memanfaatkan hutan untuk kebun tempat mereka bertanam secara berkala," kata

Fredy lagi. Selain mengatur hutan menjadi tiga bagian, untuk pemukiman, kawasan penyangga dan area berkebun, kearifan lokal *igyaser hanjop* juga membuat mereka mampu menyimpan per- sediaan karbohidrat alternatif karena mereka secara tradisional meneruskan tradisi menanam tanaman ubi dan singkong. Meskipun saat ini mereka lebih sering makan nasi sebagai sumber karbohidrat.

Ketangguhan lewat kearifan lokal masyarakat Manokwari ini kemudian dipoles menjadi lebih sistematis oleh PERDU (mitranya Oxfam), sejak tahun 2010 lewat program Mem- bangun Ketangguhan terhadap Bencana, dan dilanjutkan dengan program Membangun dan Memperkuat Ketangguhan terhadap Bencana hingga tahun 2013. Program ini diharapkan dapat memperkuat kesiapsiagaan

masyarakat Manokwari dalam upaya pengurangan risiko bencana (PRB), baik sebelum, saat hingga masa pemulihan sesudah bencana

Dari Anike Mandacan Hingga Bapak Pendeta

PERDU yang dirintis tahun 1999, awalnya adalah lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang pertanian. “Saat mengenal program PRB, kami melihat ada kaitannya isu-isu lingkungan dan konservasi yang kami sering angkat, dengan tujuan PRB sendiri yang meliputi pemberdayaan dan pengorganisasian masyarakat,” kata Mujiyanto, Direktur Eksekutif PERDU.

Salah satu bentuk pengorganisasian masyarakat yang dimaksud berupa pembentukan Tim Siaga Bencana Kampung (TSBK) di lokasi-lokasi yang dianggap rentan dan berisiko tinggi untuk terjadinya bencana.

Berdasarkan Analisis Risiko Bencana yang disusun PERDU bersama Forum Penanggulangan Bencana dan BPBD Manokwari, dari total wilayah Manokwari yang sebesar 14.448 Km² atau sekitar 10 persen bagian dari kawasan seluruh Papua Barat, umumnya merupakan area luasan risiko bencana.

Kawasan berisiko tinggi terhadap gempa bumi di Manokwari seluas 1.784,48 km² dengan risiko jumlah jiwa yang rentan terhadap bencana berupa guncangan tersebut setidaknya 121.358 jiwa. Itu baru kerentanan terhadap gempa. Belum lagi tsunami yang perhitungan luasan risiko tingginya sebesar 203,82 km² yang mencakup 86 kampung di 13 distrik. Sekitar 74.283 jiwa yang tinggal di sana, terancam terpapar langsung akibat tsunami.

Enam di antara lokasi yang dianalisis berisiko tinggi terhadap bencana, kemudian menjadi binaan PERDU dan Oxfam dalam program ini. Kelurahan Padarmi di Distrik Manokwari Barat merupakan satu-satunya di pusat kabupaten. sementara lima lokasi lain, Kampung Asai, Meinyumfoka, Lebau, Yoom, dan Tanah Rubuh, terletak di kawasan Pantura yang berjarak setidaknya 60 km dari pusat kabupaten Manokwari.

Yang menarik dari TSBK di Manokwari, Papua Barat, adalah komposisi rentang usia anggota-nya yang beragam. Terdapat perempuan dan lelaki dengan porsi yang relatif sama dengan usia dan latar belakang berbeda-beda. Mulai dari mama-mama yang sebagian besar ibu rumah tangga biasa, pendeta, tokoh masyarakat dan masyarakat biasa, hingga anak-anak belasan tahun.

Salah seorang siswi SMP yang hadir pada salah satu kegiatan penguatan kapasitas TSBK adalah Anike Mandacan. Dia terlihat begitu berbeda di antara TSBK lain yang hadir saat itu yang umumnya berusia di atas 30 tahun. Namun bicaranya jelas dan lugas. Ia tampak bersemangat mengikuti kegiatan yang digelar atas permintaan para TSBK itu sendiri. "Saya sudah tiga kali ikut pelatihan TSBK, awalnya diajak Pendeta Martin," ujar Anike yang tinggal di kampung Yoom, Pantura, Manokwari.

Pelatihan pertamanya adalah tentang air dan sanitasi, kedua pemasangan tenda darurat, dan yang terkini adalah penguatan kapasitasnya sebagai anggota TSBK. Bila pelatihan dilakukan di kampungnya, biasanya digelar di halaman sekolahnya sendiri. "Saya senang ikut pelatihan ini, ramai, semua ikut. Macam bangun tenda itu kan sulit kalau sendiri, tapi kalau ramai-ramai jadi mudah," jawab anak bungsu dari dua ber-saudara itu, saat ditanya tentang kesannya mengikuti berbagai pelatihan TSBK.

Anike menganggap kegiatan ini diperlukan oleh dia dan masyarakat yang tinggal di sekitar rumahnya. "Supaya kita tahu arah evakuasi bila ada banjir dan tsunami," ujarnya mengomentari manfaat kegiatan PRB di kampungnya yang sering diguncang gempa. "Waktu gempa terakhir di 2011, saya masih SD, saya takut sekali, rumah macam goyang-goyang, jadi kita lari keluar, menghindari dari tembok dan balok-balok yang jatuh," kisah gadis berusia 14 tahun ini. Ia tahu harga yang harus dibayar bila telat menghindarkan badannya dari runtuhnya tembok atau kayu akibat gempa, yakni nyawa. Selain remaja, ada pula ibu rumah tangga dan pendeta yang menjadi anggota TSBK. Mereka menggunakan posisi mereka di masyarakat untuk mensosialisasi program PRB ke keluarga dan lingkungan sekitar mereka. Anike misalnya, menularkan pengetahuannya tentang penang-gulangan bencana kepada kakak dan teman sekelasnya. Sementara

mama-mama yang sering berkumpul sambil memberdayakan mereka sendiri lewat keterampilan yang juga diajarkan dalam pelatihan kerajinan tangan dari kerang oleh PERDU dan Oxfam, sering berdiskusi tentang pengetahuan mereka mengenai kebencanaan dan apa yang sedang dan perlu mereka lakukan ke depannya.

Kemudian, Pendeta Martin Dowansiba yang juga mengedepankan isu PRB dan penang- gulangan bencana saat peribadatan di gereja. “Program ini menjadi kekuatan iman kami, disamping kami tetap percaya bahwa kekuatan Tuhan yang mengatur alam, termasuk bencana,” kata pendeta berusia 38 tahun ini.

“Banyak dari TSBK di sini yang tidak bisa baca, tapi antusiasme mereka tinggi,” ungkap Johnsen Patipawai, staf PERDU yang membimbing dua kampung, Yoom dan Lebau. Antusiasme masyarakat ini lah yang terus mereka jaga. “Selama ini kami selalu coba terapkan PRB dengan metode sederhana, dengan bahasa yang mudah, agar cepat diserap masyarakat,” kata Johnsen. Dia menganggap semangat dari masyarakatlah yang justru kembali menyemangati mereka untuk meneruskan program ini.

Mama Dolly Pemimpin Tim Siaga Bencana Kampung

Testimoni itu begitu lugas. “Kalau ada penghargaan untuk anggota TSBK Manokwari, saya rasa itu berhak diterima oleh Mama Dolly,” kata Richard Rumberar, 37 tahun, anggota PERDU. Dia menjadi fasilitator Kampung Asai, tempat Mama Dolly tinggal bersama keluarganya.

Dollince Manggaprauw, biasa dipanggil dengan Mama Dolly, perempuan berumur 54 tahun ini senang menghabiskan waktunya bersama anak, keponakan dan anjing-anjing kesayangannya.

Sebuah lonceng peringatan dini dipasang di depan rumahnya. Lonceng yang siap dibunyikan sebagai peringatan bila terjadi gempa dan tsunami, agar warga Kampung Asai bisa segera menyelamatkan diri. “Waktu gempa di Jepang, 2011 lalu, kami lihat di TV, dan ada orang PERDU yang datang kemari mem-

peringatkan kita untuk mengungsi,” Mama Dolly bercerita saat lonceng itu digunakan untuk menyuruh warga agar segera mengungsi ke tempat yang aman. “Kami sudah belajar, kalau lonceng bunyi, berarti ada bahaya dan orang harus pergi ke tempat aman. Kita akhirnya lari ke gunung.”



Foto : Mama Doly, Ketua Tim Siaga Bencana Desa Kampung Asay, Manokwari. (Dokumen Eka Nikmatulhuda)

Meski kemudian tsunami tidak sampai ke Manokwari seperti kekhawatiran sebelumnya, warga tahu bahwa selalu waspada itu lebih baik, daripada jatuh korban. “Kita bisa lihat di TV, tsunami itu bisa sapu rata pemukiman warga di Jepang, kami takut sekali, jadi lebih kami mengungsi ke darat dan gunung,” ia mengacu ke rumah kerabat yang jauh dari pantai, saat ia menyebut akan mengungsi ke darat dan gunung.

Rumah Mama Dolly sendiri, memiliki ruangan yang acapkali digunakan untuk mengumpulkan ibu rumah tangga di lingkungannya untuk keperluan sosialisasi PRB. “Selain rapat di balai kampung, saya kumpulkan ibu-ibu di rumah saya. Kami belajar tentang titik evakuasi, karena itu penting,” kata Mama Dolly.

Ia mengakui, awalnya sulit mengajak ibu rumah tangga untuk peduli tentang bencana di daerah mereka. “Tapi saya selalu bilang ke mereka yang kurang

semangat untuk ikut kegiatan, kalau saat terjadi gempa dan mereka tidak mengerti tentang evakuasi, mereka mau lari kemana?”. Hasilnya, anggota masyarakat bahkan dari kampung sebelah Asai, malah menuntut untuk diikutsertakan dalam program “Mama Dolly diangkat sebagai ketua TSBK atas pilihan masyarakat sendiri, padahal selama ini perempuan sulit sekali ada di posisi pengambil keputusan,” kata Richard Rumarar tentang kader kebanggaannya itu. Fasilitator yang tinggal jauh dari kampung dampingannya ini, mengaku sangat dimudahkan dengan keberadaan Mama Dolly. “Kampung Asai memang tidak terlalu besar, tapi keliling dari satu rumah ke rumah lain itu bisa setengah mati. Tapi setiap saya minta Mama Dolly mengajak warga untuk ikut rapat dan kegiatan, saya cukup kasih satu undangan, dan Mama Dolly yang akan keliling kampung untuk menyebarkan informasi itu,” ujarnya.

Tidak hanya aktif. Dalam setiap kegiatan, Mama Dolly juga bisa meluluhkan hati tokoh masyarakat yang awalnya tidak setuju dengan kegiatan PRB. “Semangatnya menular, musuh Mama Dolly yang kepala kampung saja sekarang sudah mendekat ke program,” kata Richard.

Dalam satu kesempatan, Mama Dolly meminta PERDU untuk memfasilitasinya dan sejumlah ibu rumah tangga lain untuk didatangkan pelatih kerajinan kerang, agar dapat memaksimalkan sumber daya di sekeliling mereka sekaligus menambah penghasilan keluarga. “Kita jual sampai Batam,” kata Mama Dolly tentang kerajinan tangan berupa hiasan dinding atau meja yang terbuat dari kerang-kerang kecil yang dengan mudah mereka dapatkan di pantai dekat rumah mereka. Rupanya keberhasilan tersebut bisa mendatangkan lebih banyak ibu rumah tangga di sekitar wilayah Pantura, yang kemudian pada setiap pelatihan kerajinan kerang, juga diselipkan sosialisasi PRB maupun pengetahuan mengenai kebencanaan. “Kami juga pernah buat simulasi di sini. Kami diajarkan untuk siapkan tas siaga, jadi saat terjadi bencana, yang kami selamatkan adalah anak-anak dan tas siaga” kata Mama Dolly sambil menunjukkan sebuah tas sederhana berwarna hitam.

Sekilas tampak biasa, namun isinya sangat berharga. Ada akte tanah, rumah, akte kelahiran, sertifikat dan ijazah sekolah anak-anaknya, sebuah senter dan

obat. Itulah surat-surat berharga mereka yang menjadi prioritas untuk diselamatkan saat terjadinya bencana. Menyiapkan tas tersebut berarti mereka setidaknya telah siap siaga untuk setiap bencana yang mengintai dan mencoba meminimalisir kerugian di masa mendatang.

10

KETANGGUHAN KOMUNITAS DI TANAH PAPUA

OXFAM DAN KIPRA PAPUA

Merawat Pantai Menolak Bala

Pasir putih membentang, dibatasi dinding karang, berhias pohon nyiur dan hutan bakau. Itulah Pantai Hamadi, tempat tentara sekutu pertama kali mendarat di Papua pada tahun 1944. Keindahan, sejarah dan letaknya yang berdekatan dengan Jayapura adalah nilai tambah yang membuat pantai ini selalu ramai oleh pengunjung. Siang sampai sore selalu dipenuhi penduduk setempat dan wisatawan untuk bersantai dan anak-anak yang berkejaran atau bermain sepeda. Matahari tenggelam di sela pulau kecil di Teluk Youtefa dan kapal-kapal nelayan yang berlabuh menambah semarak suasana.



Foto : Diskusi kajian risiko bencana yang dilakukan oleh komunitas (Dokumen KiPra)

Sayangnya, ada dampak lain dari keramaian dan ketenaran Pantai Hamadi, yaitu muncul banyak sampah berupa limbah rumah tangga dan gundulnya hutan bakau. Penggundulan inilah yang menyebabkan abrasi dari laut Samudera Pasifik semakin menjadi-jadi dan pernah menyapu bersih kuburan penduduk asli suku Tobati, Kayu Pulo dan suku Enggros. Juga pernah menerjang pemondokan yang dibuat Dinas Pariwisata Kota Jayapura.

Tahun 2008, gelombang naik juga sempat membuat rumah-rumah warga miring dan jalan- jalan hancur. Jika abrasi tidak dikendalikan, bukan mustahil jika kelak terjadi lagi gelombang pasang maka kehidupan penduduk sekitar akan kembali terancam.

Selain gelombang laut, banjir pun menjadi ancaman bagi warga di Hamadi Rawa Dua dan Hamadi Pasar. Banyak saluran air, termasuk kawasan konservasi dari Entrop hingga Hamadi, rusak atau tertutup oleh bangunan-bangunan sehingga arus air beralih ke pemukiman penduduk.

Untuk mengatasi abrasi dan banjir, pada tahun 2006 dan 2009, warga mengadakan kerja bakti membersihkan sampah dan menanam pohon di sepanjang Tanjung Hamadi. "Kegiatan bersih- bersih lingkungan masih terus berlangsung sampai sekarang pada setiap hari Jumat dan Sabtu. Seluruh anggota TSBK ikut. Kami ber- harap, dengan aksi nyata ini, masyarakat mau lebih peduli pada kebersihan dan kelestarian lingkungan pantai," kata Welly M.R. Wadjukur, Ketua TSBK Hamadi.

Menurut Welly, dalam waktu dekat ini, mereka juga punya rencana bersama anggota TSBK kelurahan lain untuk menanam 4.000 pohon di sepanjang Tanjung Hamadi. "Nanti sekalian ada acara donor darah dan panggung gembira. Ini adalah bagian dari rencana kerja Arisan Program TSBK. Kami saling bantu dan bertukar pengalaman dengan kelurahan lain untuk mem- per kaya wawasan penanggulangan bencana di kota Jayapura," kata Welly.

Menurutnya lagi, data yang akurat sangat penting untuk kurangi risiko bencana. Data penduduk bukanlah sekadar pajangan. Semakin detail data dibuat, semakin nyata manfaatnya saat bencana tiba. "Dulu, mana kami mengerti tentang data

penduduk harus dibuat berdasarkan umur, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Barulah ketika ada interaksi dengan Oxfam, kami jadi mengerti bahwa data itu penting untuk mengetahui tingkat kerentanan penduduk dan merencanakan aksi untuk mengatasi hal tersebut. Perempuan dan anak-anak jadi pihak yang paling rentan sehingga harus lebih diperhatikan. Data di kelurahan kami sudah lebih lengkap dibanding sebelumnya. Inilah yang akan jadi acuan kalau ada banjir lagi," kata Welly.

Kajian Risiko Bencana adalah salah satu poin penting yang terdapat dalam program Pengurangan Risiko Bencana (PRB). Kajian Risiko Bencana didapat dari berbagai sumber daerah yang bersangkutan, termasuk dari masyarakat itu sendiri. Harapannya, ke depan, masyarakat dapat secara mandiri mengelola risiko, mengurangi, maupun memulihkan diri dari dampak bencana tanpa ketergantungan dari pihak luar.

Berbagi Harapan Tanggulangi Bencana

Sebelas Maret 2011, tsunami dan gempa hebat berkekuatan 8,9 skala Richter terjadi di Jepang tepat pukul 12.46. Jumlah korban tewas mendekati 1.600 orang, 1.900 terluka, dan 1.500 orang hilang. Demikian menurut Badan Kepolisian Nasional setempat. Gempa yang mengguncang Jepang itu, berimbas ke negara-negara lain seperti Filipina dan Indonesia. Khusus di Indonesia, peringatan gempa dan tsunami dikhususkan pada wilayah Papua, Maluku dan Sulawesi Utara Akhirnya pada hari itu, tsunami Jepang sampai di sepanjang pesisir pantai Kota Jayapura, Holtekamp, Enggros, Tobati, Hamadi, Pantai Base-G dan Skow. Kejadian tersebut tepat sehari setelah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dibentuk dan Edward Priyandoko dilantik sebagai Kepala Kesiapsiagaan BPBD Kota Jayapura.

Edward dan tim langsung turun lapangan untuk menganalisis dampak bencana sekaligus membantu menyelamatkan para korban. Tercatat lebih dari 20 rumah mengalami kerusakan parah akibat hantaman tsunami. Bukan rumah saja yang

hancur akibat terjangan tsunami di Jayapura tersebut, beberapa fasilitas umum milik masyarakat pun ikut hancur terkena pecahan gelombang tsunami kecil. Gulungan ombak tsunami di Jayapura berjarak sampai dengan 100 meter dari bibir pantai.

Mengenang pengalamannya bekerjasama dengan Oxfam dalam menangani bencana, Edward berkata, "Saya banyak belajar dari KIPRa dan Oxfam tentang mitigasi bencana. Kami saling belajar, tapi saya rasa saya yang lebih banyak belajar dari mereka." Kemitraan Oxfam dan Pemerintah, dalam hal ini BPBD, sudah terjalin sejak 2010. Awalnya dari BPBD tingkat Provinsi, kemudian berlanjut ke Kotamadya dan Kabupaten termasuk Jayapura.



Foto : Tim Siaga Bencana Kampung mengadakan apel pagi untuk persiapan kegiatan penanaman pohon

Turun lapangan bersama, sering dilakukan. Baik saat maupun sebelum bencana terjadi. Salah satu contohnya adalah melalui diskusi "Finalisasi Perencanaan Dokumen Kontinjensi Untuk Bencana Banjir Kota Jayapura" pada September lalu. Melalui diskusi ini, KIPRa, Oxfam, BPBD, BAPPEDA dan instansi-instansi

lainnya bersama-sama menganalisis daerah mana saja yang rawan banjir dan longsor, serta cara menyikapi masalah tata ruang yang semakin menghimpit daerah resapan air.

Oxfam-KIPRa, Pemerintah Kota dan BPBD bersama elemen masyarakat lain juga pernah mengadakan sosialisasi Perda nomor 9 tahun 2012 atau biasa disebut Perda Penanggulangan Bencana. Perda ini bertujuan agar setiap *stakeholder* atau para pihak yang berkepentingan, agar ketika ada bencana tidak ada lagi tumpang tindih dalam upaya penanggulangannya.

KIPRa dan Oxfam telah menunjukkan perannya mendukung Perda nomor 9 tahun 2012 ini dengan mengadakan sosialisasi di Hotel Sahid pada 9 Oktober lalu. "Urusan bencana ini adalah urusan semua orang," kata Edward menutup pembicaraan.

Mama Juju dan Pesan Alam



Usia boleh senja, tapi soal belajar, Roos Martha Sugiare atau biasa dipanggil Mama Juju tak mau kalah dari yang lebih muda. Mama Juju adalah salah seorang kader TSBK Hamadi. Ia adalah salah satu pelopor terbentuknya TSBK Hamadi. Bukan saja memelopori, Mama Juju juga tak segan turun lapangan demi memberi contoh nyata kepada yang muda untuk aktif terlibat kegiatan pemeliharaan lingkungan.

Dari menanam pohon di sepanjang pantai sampai bersih-bersih lingkungan, Mama Juju tak pernah absen. Masih panjang daftar aksinya; mengimbuu dan mengajar warga sekitar

untuk ikut aktif kegiatan waspada bencana, menyumbang tenaga di dapur umum, dan rajin urun suara dalam setiap pertemuan antar anggota TSBK dan tim KIPRa - Oxfam. Menurut Mama Juju sejak muda ia sudah aktif ikut organisasi perempuan dan kemanusiaan. “Cuma, organisasi zaman dulu tidak secanggih sekarang. Kalau dulu kan tidak ada yang namanya presentasi pakai layar, pakai komputer, lalu ada data-data yang lengkap. Misalnya, ada data daerah ini lebih rendah dari daerah sekitarnya sehingga lebih rawan banjir. Lalu ada *handphone*. Kita jadi bisa berkomunikasi dengan cepat saat bencana. Si A perlu ini, atau si B perlu itu. Saya banyak belajar dari KIPRa, Oxfam dan teman-teman di TSBK. Karena kalau tidak, kita akan ketinggalan zaman dan lamban mengantisipasi dampak bencana. Lagipula, belajar tidak kenal usia, bukan?”

Maka jangan heran, jika tubuh Mama Juju masih terlihat kuat dan sigap. Pancaran mukanya ramah dan wawasannya luas. Bahkan menurut salah seorang tim Oxfam, jika ada konflik antar warga Hamadi dan musyawarah tidak kunjung mencapai kata sepakat, panggil saja Mama Juju. Niscaya suaranya akan didengar oleh kedua pihak yang bertikai sehingga perdamaian pun akan tercapai.

Bicara mengenai pengenalan dini terhadap datangnya bencana, Mama Juju memiliki satu keinginan, yaitu agar masyarakat tidak melupakan kearifan masyarakat lokal. Dengan kata lain, belajar membaca tanda-tanda yang dikirim oleh alam.

Misalnya, ketika burung-burung terbang rendah berbondong-bondong dari lautan menuju daratan, itu artinya akan ada badai di laut yang mungkin menerjang pantai. Atau ketika kucing-kucing dan hewan-hewan lain bertingkah aneh, naik ke atap dan tidak mau turun lagi, itu artinya akan datang gempa atau bencana lain di sekitar kita.

“Saya mau belajar dari kecanggihan teman-teman yang lebih muda. Tidak ada salahnya juga jika yang muda belajar kearifan lokal dari orangtua. Dengan begitu, ilmu kita akan semakin lengkap dan jumlah korban dapat diperkecil,” kata Mama Juju.

Perempuan di Garda Depan

Suara bergemuruh datang dari arah belakang rumah. Terdengar teriakan tetangga mengabarkan bahwa air sudah mulai naik ke pemukiman. Ratusan warga sontak siap-siaga. Sebagian langsung berlari ke luar rumah menuju daerah yang lebih tinggi. Sebagian lagi sibuk menyelamatkan harta benda. Dalam keadaan panik, semua orang nampak ingin menyelamatkan dirinya sendiri lebih dulu.

Semua orang? Tidak! Para mama tidak berpikir mengenai dirinya sendiri. Mengikuti naluri, kaum ibu lebih mendahulukan keselamatan anak-anaknya, meski harus bertaruh nyawa sekalipun. Kepedulian perempuan terhadap keluarganya, itulah yang menjadikan mereka, anak-anak, dan kaum disabilitas dipandang sebagai kelompok paling rentan bencana.

“Jadi bukan masalah gender. Di Jayapura, kedudukan perempuan dan laki-laki sama pentingnya. Hanya naluri saja yang membedakan. Sudah banyak contoh perempuan bisa berperan penting bahkan memimpin kelompok tanggap bencana. Di TSBK sudah banyak contohnya,” kata Oktavina Kambu ketua forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) di Jayapura.

Gerak dinamis dan peran penting perempuan dalam pengurangan risiko bencana sudah diakui oleh para pria anggota TSBK. Menurut Surono (Ketua TSBK Koya Barat), separuh anggota TSBK di daerahnya adalah perempuan.

Bahkan salah satu kader kader atau pelopor terbentuknya TSBK di Koya Barat adalah perempuan, yaitu Agustina Rachel Sadi. Agustinalah yang dengan cepat mendata korban banjir dan mengirim berita ke tim KIPRa dan Oxfam mengenai bencana yang terjadi di wilayahnya akhir tahun lalu.

Hal yang kurang lebih sama juga berlaku di TSBK-TSBK lainnya. Perbandingan jumlah perempuan dan laki-laki yang aktif dalam sosialisasi dan pelatihan terkait kebencanaan, nyaris tidak ada bedanya. Seperti laki-laki, perempuan juga mampu berada di garda depan.

Ini Bencana Kita

Pemukiman padat penduduk nyatanya tak cuma monopoli Jakarta. Di Jayapura, tepatnya di kelurahan Gurabesi, ada juga pemukiman padat dengan jarak rumah rapat-rapat. Seperti pemukiman padat yang lain, Gurabesi juga rawan kebakaran yang diakibatkan korsleting atau arus pendek. Menurut Melly Mofu, Ketua RT 01 Gurabesi, kebakaran paling sering terjadi saat musim liburan. Entah itu Natal, Idul Fitri, atau Tahun Baru saat kebutuhan listrik sedang mencapai puncak.

Repotnya, saat kebakaran terjadi, mobil pemadam sulit mencapai permukiman. "Jadilah kami ini yang harus selalu siaga. Saya selalu ingatkan warga supaya jangan lupa mematikan listrik saat tidur atau meninggalkan rumah. Pun kebakaran tetap terjadi, ya tetap kami-kami ini yang harus bertindak lebih dulu. Kami ambil air sungai lalu diestafetkan sampai ke lokasi kebakaran. Pernah juga kami rubuhkan satu rumah agar api tidak meluas. Pasalnya, kalau menunggu petugas dapat memasuki per- kampungan, apinya keburu meluas ke mana- mana," jelas Melly.



Foto : Kegiatan penyusunan rencana aksi kampung untuk menghadapi bencana banjir di Kota Jayapura

Selain kebakaran, Kelurahan Gurabesi juga rawan banjir dan longsor. Di daerah ini, bencana terbesar terjadi pada 1967 dan 1985. Awal tahun 1967, sekitar bulan Februari, terjadi banjir bandang yang menghanyutkan puluhan rumah. Pada 1985, tanah longsor kembali meluluh-lantakkan kediaman penduduk hingga memakan korban 17 jiwa melayang. Tak terhitung kerugian harta benda. Hingga saat ini, ancaman banjir, longsor dan kebakaran masih menjadi momok warga Gurabesi. "Setahun bisa 2-3 kali banjir," kata Melly.

Karena itulah, pemahaman terhadap manajemen bencana sangat diperlukan. Hal ini disadari betul, selain oleh Melly, juga oleh Lidya Mofu. Lidya yang masih kerabat Melly adalah sekretaris TSBK Gurabesi. Menurut Lidya, ia belajar banyak dari KIPRa dan Oxfam mengenai bagaimana mengurangi risiko bencana. Kalau air di hulu sudah meluap, Lidya akan menelepon warga lain agar selalu waspada. Surat-surat berharga harus lebih dulu dimasukkan ke dalam tas yang siap bawa. Bersama Melly, ia juga mengingatkan para tetangga untuk jangan tidur terlalu lelap di malam hari karena pada saat itulah biasanya banjir datang.

Urusan bencana bukanlah urusan Lidya atau Melly saja. Bencana adalah urusan semua orang. Kerjasama dengan semua pihak, baik itu pemerintah maupun masyarakat adat dan agama mutlak diperlukan. Lidya bercerita, "Kami banyak dibantu juga oleh pemerintah dan kepolisian. Waktu gereja kami dihantam gelombang pasang dari laut, segenap warga dibantu polisi bergotong-royong membangun tanggul. Kebetulan, salah satu anggota TSBK yang sangat aktif dan berdedikasi adalah anggota Binmas Polres Jayapura Kota, yaitu Pak Abdul Hamid."

Dengan pihak gereja, TSBK Gurabesi pun menjalin hubungan baik. Bergotong-royong, berbekal bantuan 100 pohon dari Dinas Kehutanan, mereka mengadakan penghijauan di bukit-bukit yang telah meng-gundul. Plus, kerja bakti membersihkan lingkungan dan mengangkut sampah-sampah, terutama sampah plastik. Lingkungan bersih, indah dipandang, risiko banjir dan longsor pun berkurang.

Bank Sampah

Waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Sebagian besar penduduk sudah terlelap. Namun anggota TSBK justru ke luar rumah untuk mengumpulkan sampah. Mau di kemanakan sampah-sampah itu? Apakah dibakar atau dibuang begitu saja? Ternyata tidak! Oleh Lidya, sampah-sampah tersebut diolah menjadi hiasan rumah yang cantik. Botol minuman kemasan disulapnya menjadi bunga atau lampion. Dicat warna cerah, lalu digantung di teras atau dirangkai menjadi pajangan meja dan tirai jendela. Kerajinan tangan hasil karya Lidya juga laku dijual ke sekolah-sekolah TK dan bazaar yang diadakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat.

Sementara sampah-sampah kertas yang kondisinya masih baik, dijual ke Bank Sampah. Untuk 10 kilogram sampah kertas, mereka mendapat upah sebesar Rp 10 ribu. Uang itu boleh langsung diambil atau disimpan sebagai kas TSBK Gurabesi.

Buang Sampah Pada Tempatnya

Jika satu hari Anda berkunjung ke Koya Barat di Papua, tak perlu heran melihat sapi dan kambing berjejer di sepanjang jalan. Ini bukan karena akan ada pesta besar-besaran. Tetapi perhatikan dulu cuaca dan lihat sekeliling Anda.

Jika cuaca sedang tak bersahabat dan mendung menutupi langit, berarti ternak-ternak itu adalah ternak yang akan dievakuasi warga agar tak hanyut oleh banjir yang kemungkinan besar datang melanda daerah transmigrasi itu. Bagi warga Koya Barat, ternak terutama sapi adalah tabungan, lebih dari simpanan uang di bank. Maklum saja, harga jual hewan ini memang tinggi. "Misalnya Anda membeli bibit seharga 7 juta rupiah, dalam waktu satu atau dua tahun harganya bisa mencapai 10 juta bahkan lebih. Tergantung dari besaran sapi tersebut. Ini belum dihitung anak-anak yang dihasilkan oleh Si Sapi," cerita Sutar, Sekretaris TSBK Koya Barat.

“Maka itu kalau banjir akan datang, selain surat-surat berharga, yang pertama kami selamatkan ya ternak. Kami bariskan berjejer-jejer di jalan raya. Itulah modal terakhir kami jika harta benda yang lain habis tersapu air,” ujarnya lagi.

Koya Barat adalah dataran rendah dengan ketinggian hanya 10 meter di atas permukaan laut. Daerah ini juga dekat dengan muara sungai Keroom yang kerap meluap saat ada hujan deras. Dua faktor inilah yang membuat Koya Barat menjadi langganan banjir.

Tercatat, pada sekitar tahun 1986-1987, pernah terjadi banjir besar yang melebihi tinggi pinggang orang dewasa, memakan banyak korban harta benda. Setelahnya, banjir tetap datang setiap tahun walau kerugian yang tercatat tidak sebesar pada tahun 1986-1987 itu, kecuali pada tahun 2012 lalu saat banjir menggenangi ribuan hektar sawah dan kebun serta pemukiman dan membuat ribuan penduduk terpaksa mengungsi.

“Sekarang sih, kami sudah lebih waspada. Pokoknya, kalau dari atas (Koya Karang) awan sudah gelap, itu tanda-tanda kami sudah harus waspada. Kami sudah belajar cara membaca peringatan dini bencana, sejak bergabung dengan TSBK dampingan KIPRa. Saya pribadi juga bergabung dengan tim siaga bencana bentukan Dinas Sosial. Istilahnya, warga dan perangkat Kelurahan sudah paham, kalau ada bencana, pasti saya dipanggil untuk bantu- bantu,” kata Surono, Ketua TSBK Koya Barat.

Belajar Dari Pengalaman

Sudah lebih dari 20 tahun, warga Koya Barat menjadi pelanggan tetap bencana banjir. Berdasarkan pengalaman itu, mereka mahfum bahwa bencana datang bukan karena faktor alamiah semata. Ada campur tangan manusia yang membuat bencana terus terjadi.

Di antaranya adalah kebiasaan membuang sampah sembarangan dan penebangan

pohon- pohon secara serampangan. Karena itu, secara berkala TSBK dibantu warga lain dan aparat setempat bekerja bakti membersihkan saluran drainase, mengumpulkan sampah- sampah yang banyak tercecer di jalan, serta melakukan penanaman pohon.

Di samping kerja bakti, Surono dan kawan- kawan juga kerap mengimbau sesama warga untuk tidak buang sampah sembarangan “Kami sempat membuat surat edaran mengenai pentingnya menjaga kebersihan. Juga pernah menyampaikan ke masing-masing ketua RT/RW di Koya Barat ini,” jelas Surono.

Lebih jauh Surono berkisah, bahwa sampah di daerahnya bukan cuma disebabkan ada warga setempat yang kurang kesadaran. “Orang luar juga sering buang sampah seenaknya. Mobil-mobil lewat, tahu-tahu jendela terbuka dan sampah melayang ke jalan. Sering seperti itu. Di jalan raya dekat sini, setiap hari ada pasar buah dan sayur segar seperti di Puncak. Di sana banyak orang datang berbelanja, sekaligus jadi banyak sampah. Spanduk pernah dibuat, tapi tak dihiraukan,” kata ketua TSBK ini seraya menunjuk arah pasar yang dimaksud.

“Bersih-bersih tentu jalan terus. Itu salah satu antisipasi. Antisipasi lain adalah pemerintah membuatkan tanggul supaya air dari sungai bisa tertampung dengan baik dan tidak lari ke pemukiman kami,” harap Surono.

Kami Mau Belajar

Ketika tim Oxfam berkunjung ke Koya Barat, salah satu anggota tim TSBK bercerita mengenai Bank Sampah dan upaya kreatif TSBK Gurabesi yang berhasil menyulap sampah menjadi kerajinan tangan.

Cerita itu disambut dengan antusias oleh anggota TSBK Koya Barat yang ternyata belum pernah mendengar tentang Bank Sampah. Menurut mereka, selama ini sampah- sampah yang ada hanya dibakar begitu saja.

Harapannya TSBK Koya Barat dipertemukan dengan tim dari kelurahan lainnya,

seperti Gurabesi, Hamadi dan Entrop. Agar masing- masing anggota TSBK bisa saling belajar dan bertukar pengalaman tentang bagaimana caranya menyulap sampah menjadi bernilai ekonomis.



Foto : Berbagi pengalaman dan belajar bersama tentang PRB bersama kelompok perempuan di Kampung

11

KAMI MENGUNGI BUKAN DIUNGSIKAN

CERITA DARI GUNUNG MERAPI (SUKIMAN DITULIS ULANG OLEH SIGIT “IPUNG” PURWANTO)

Saat erupsi G. Merapi tahun 2010 lalu saya bersama warga dusunku memilih mengelola pengungsian secara mandiri bersama warga dan pemerintah desa Manjung. Ternyata lebih enak mengungsi secara mandiri. Selain lebih manusiawi, selama masa pengungsian itu kami bisa merawat ternak milik kami. Di pengungsian pemerintah ternak tidak masuk daftar pengungsi untuk dilayani. Inilah catatanku tentang pengungsian mandiri kami.

Deles nama dusunku, masuk wilayah administratif Desa Sidorejo, Kecamatan Kemalang, Klaten, Jawa Tengah. Dusunku berada di Kawasan Rawan Bencana (KRB) III, karena berjarak empat kilometer dari kawah G. Merapi dan berada di tepi Sungai Woro. Artinya, jika G. Merapi meletus dusunku dapat menjadi daerah terkena langsung awan panas dan lava pijar.

Truk Pinjaman

Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kegunungpian (BPPTK) menyatakan status G. Merapi menjadi “Awat” pada tanggal 25 Oktober 2010 pagi. Seandainya salah satu warga dusunku punya mobil untuk mengangkut lansia, anak-anak dan orang sakit kami pasti sudah mengungsi saat itu juga. Entah kenapa tidak ada mobil pengangkut dari pemerintah sampai ke dusun kami. Rupanya kami harus bertahan semalaman di dusun sampai mendapatkan mobil pengangkut kelompok rentan. Sepanjang malam itu suara gemuruh letusan dari kawah G. Merapi

terdengar jelas di dusunku. Sepanjang malam itu pula semua warga dusunku terjaga dengan perasaan takut dan bingung.

Pagi hingga siang 26 Oktober 2010 belum ada letusan dari kawah G. Merapi tetapi gemuruh dari dalam gunung disertai goncangan gempa beberapa kali kami dengar dan rasakan. Sorenya kami bisa mengungsikan kelompok rentan setelah salah satu warga dusun mendapat pinjaman satu buah truk pengangkut pasir. Truk pinjaman itu digunakan hanya untuk mengangkut kelompok rentan, warga lainnya mengendarai sepeda motor. Tujuan langsung ke tempat penampungan pengungsi di kantor kecamatan Kemalang.

Letusan disertai awan panas ke arah selatan atau Kaliadem dan Kinahrejo terdengar beberapa menit setelah pengungsi terakhir terangkut sekitar pukul 17.00. Meski takut, kami merasa aman karena berada di arah tenggara G. Merapi. Letusan saat terjadi berkali-kali selama lebih dari satu jam. Setiap letusan disertai awan panas dan asap membubung tinggi di atas puncak G. Merapi. Rangkaian letusan diakhiri bunyi dentuman keras. Begitu keras sampai memaksa kami menutup telinga.

Setelah letusan mereda aku dan belasan pemuda lainnya kembali dusun untuk menjaga ternak serta harta benda. Kami harus menjaga keamanan kampung kami sendiri karena tidak ada aparat keamanan mau berjaga disana. Dari pos-pos ronda di sudut-sudut dusun kami berjaga sambil terus memantau perkembangan situasi. Radio komunitas Lintas Merapi tanpa henti menyiarkan informasi-informasi dari BPPTK. Agar bisa melarikan diri setiap saat dari ancaman letusan kami bersepakat agar satu orang berjaga dengan menggunakan satu sepeda motor. Lucunya, ada beberapa sepeda motor isi bensinnya tidak sampai seliter. Beruntung sepanjang malam itu G. Merapi seperti tertidur.

Evakuasi Sapi

Pagi 27 Oktober 2010 kami dikagetkan oleh arak-arakan warga dari pengungsian. Rupanya mereka kembali ke dusun untuk mencari rumput dan memberi pakan ternak masing-masing. Demi ternak mereka melupakan rasa takut pada malam-malam sebelumnya.

Mereka datang menumpang truk pasir, sebagian lainnya berjalan kaki. Tanpa rencana atau persiapan penyelamatan diri jika sewaktu-waktu terjadi letusan. Lalu bagaimana cara mereka menyelamatkan diri jika terjadi letusan? Ini sangat berbahaya. Pada status "Awat" G. Merapi bisa kembali meletus kapan saja. Bisa saja letusan lebih besar dari kemarin dan tidak seorang pun mampu memperkirakan arah letusannya. Letusan dan awan panas kemarin ke arah selatan, bisa saja hari ini ke arah tenggara persis di posisi kami.

Rupanya satu hal kecil tetapi sangat penting telah kami lupakan saat memutuskan mengungsi. Bagi orang dusun seperti kami ternak sapi dan kambing tidak bisa dimaknai semata-mata hanya sebagai hewan peliharaan atau tabungan. Ada hubungan istimewa -teramat rumit untuk dijelaskan- antara orang dusun dengan ternaknya.

Setelah bersepakat dengan pemilik ternak kami kembali meminjam truk untuk mengangkut ternak-ternak ke lokasi lebih aman. Hari itu juga sekitar tigaratus ekor sapi dan seratus kambing berhasil kami ungsikan ke Desa Keputran dekat dengan lokasi pengungsian. Ini pertama kalinya kami memindahkan sapi dan kambing dalam jumlah besar dengan satu truk dan dalam waktu sekitar tiga jam saja.

Sapi dan kambing dibuatkan kandang darurat dengan terpal di halaman dan kebun-kebun kosong warga desa Keputran sekitar lokasi pengungsian kantor kecamatan Kemalang. Jaraknya lebih kurang 16 kilometer dari puncak G. Merapi. Selain aman juga dekat pengungsian sehingga mempermudah perawatan oleh pemiliknya. Soal pakan ternak kami mendapat bantuan dari banyak pihak berupa jerami kering dan konsentrat.

Pak Camat Kemalang

Letusan G. Merapi terjadi terus-menerus sejak hari itu. Tetapi kami tetap bertahan di dusun menjaga keamanan. Sampai akhirnya pada tanggal 5 November 2010, letusan sangat besar dan membuat kami ketakutan. Awan panas mengarah ke Sungai Gendol dan Woro di sebelah barat dusun. Hempasan awan panas, abu panas disertai kerikil dan pasir menerjang hutan sekitar seratus meter di atas dusun kami. Suara gemeretak hutan pinus membuat kami berlarian menyusul ke pengungsian.

Sampai di pengungsian, kami mendapati cerita mengesankan. Kantor pengelola pengungsian kecamatan Kemalang sudah ditutup dan dipindahkan ke Pusdiklatpur di kecamatan Wedi, Klaten atau sekitar limabelas kilometer arah selatan. Pada hari itu BPPTK menyatakan daerah bahaya erupsi G. Merapi diperluas menjadi 20 kilometer dari puncak G. Merapi. Semua lokasi pengungsian dan permukiman di kawasan kurang dari 20 kilometer harus dikosongkan.

Warga dusun Deles dan Petung sejumlah 556 jiwa ditinggalkan oleh pengelola pengungsian karena tidak mau ikut pindah ke Pusdiklatpur jika ternak sapi dan kambing mereka tidak dibawa serta. Bagi pengelola pengungsian mungkin keinginan itu hal aneh dan tidak wajar. Ketua-ketua RT Deles dan Petung juga sudah memohon kepada agar diijinkan membawa ternak mereka ke Pusdiklatpur. Jawabannya tetap saja, tidak. Lalu warga menyatakan dengan tegas jika sapi tidak bisa ikut, mereka akan tetap tinggal. Atas pernyataan itu camat Kemalang sempat mengancam, " Jika tetap di sini Pemerintah tidak bertanggungjawab!" Kalau rakyat jelata seperti kami saja bisa memahami keinginan mereka, kenapa pemerintah tidak bisa?

Pindah Ke Desa Manjung

Letusan-letusan Merapi sejak hari itu semakin menakutkan disertai getaran dan dentuman keras sekali. Saya juga mendapat peringatan langsung dari beberapa kawan agar menjauh dan keluar dari jark 20 kilometer.

Dengan bantuan lima buah truk bantuan Polsek Kemalang kami memindahkan warga kami bersama ternaknya ke desa Manjung, Kecamatan Ngawen. Di desa ini kami diterima dengan tangan terbuka. Setiap pengungsi dipersilakan memilih rumah induk semang. Makanan disiapkan dengan menu sama seperti induk semang. Pengungsi anak-anak dijamin pendidikannya dan digabung ke kelas-kelas di sekolah dasar dan sekolah menengah setempat. Lapangan bola disulap menjadi kandang-kandang darurat untuk ternak. Soal pakan ternak tidak pusing karena kebun luas dengan rumput hijau dan persediaan jerami melimpah. Layanan kesehatan disediakan di puskesmas pembantu dengan tenaga medis dan obat-obatan. Amanto, Lurah Desa Manjung bertanggungjawab langsung pada pengelolaan seluruh kegiatan di pengungsian bersama kami para pengungsi. Nyaris semua kebutuhan pengelolaan pengungsian dipenuhi bersama oleh kami para pengungsi bersama warga desa Manjung. Karena kenyataan itu pengungsian ini boleh disebut pengungsian swadaya.

Nyaman dan tak kekurangan, itu kami rasakan betul selama duabelas hari menjadi pengungsi di desa manjung bisa hidup seperti menjadi warga desa Manjung sendiri. Terlebih ternak-ternak kami juga selamat dan tidak sampai dijual karena bingung cara penyelamatkannya.

Booking Tempat

Status G. Merapi berangsur-angsur diturunkan dari awas menjadi siaga lalu waspada. Saatnya kami kembali ke dusun menata dan melanjutkan keseharian hidup kami.

Acara pelepasan begitu emosional. Dalam sambutannya camat Ngawen menyatakan akan menerima kami jika di desa manjung sewaktu-waktu aktifitas G. Merapi meningkat dan membahayakan keselamatan warga dusun Deles dan Petung. Saling bersalaman, berpelukan, dengan tangis, seakan tak rela terpisahkan.

Saya masih ingat kata-kata pak Amanto, Lurah Manjung kepada saya ketika bertemu beberapa hari setelah berpisah. *“Mas ayo di pikir piye carane wargamu lan wargaku nyawiji mbangun bebrayan,mbangun kesiapsiagaan koyo pengungsian mandiri, mergo merapi mesti ngene maneh mbuh kapan.”* (Mas ayo kita pikirkan cara agar wargamu dan wargaku bisa hidup rukun bersama dan membangun kesiapsiagaan dan pengungsian mandiri karena Merapi pasti akan meletus kembali entah kapan).

Bukan bermaksud mengecilkan peran pemerintah, tetapi rasanya pengungsian mandiri menjadi pilihan paling masuk akal bagi kami. Rencana-rencana kemudian berkembang untuk menata rencana pengungsian mandiri kelak jika saatnya tiba. Memelihara hubungan baik dengan pemerintah desa dan warga Manjung adalah sebagian dari cara mewujudkannya

12

DUSUN TEMBI MANDIRI: PANDEMI SEBAGAI BATU LONCATAN MENUJU EKONOMI KOLEKTIF

TATANG ELMY WIBOWO & GANDAR MAHOJWALA

Sejak 11 Maret 2020 COVID-19 ditetapkan oleh World Health Organization (WHO) sebagai pandemi global. Beragam kebijakan pemerintah mendorong penanganan bagi pasien terkonfirmasi Covid-19 tanpa gejala dan ringan cukup di rumah saja. Isu kerawanan pangan global juga mencuat. Kondisi ini yang menjadi pemantik kami selaku masyarakat Dusun Tembi untuk berinisiasi dengan menyediakan rumah karantina dan isolasi mandiri dan kegiatan penunjang lain untuk memenuhi kebutuhan komunitas, termasuk mendorong penguatan ekonomi warga.

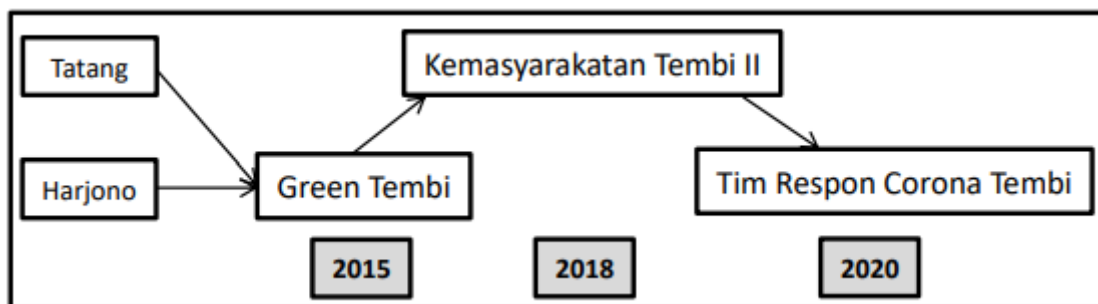
Investasi Ketangguhan Harus Dimulai Sejak Awal

Mau tak mau, upaya membangun gerakan sejak 2015 merupakan bibit berharga dalam merespon COVID-19. Pada tahun tersebut, Green Tembi didirikan sebagai wadah fokus pada isu lingkungan dengan cita-cita yang lebih luas untuk membangun sosial ekonomi masyarakat Dusun Tembi. Beberapa kegiatan diantaranya adalah tour sepeda, pengelolaan sampah, penanaman pohon buah, workshop pemberdayaan perempuan dan anak-anak, pemanfaatan kain perca, dan workshop lingkungan sehat. Belasan warga terlibat secara aktif. Siapa yang sangka inisiasi pada tahun 2015 dapat bermanfaat hingga menghadapi pandemi.

Pada tahun 2017, Pengurus Green Tembi merasa perlu untuk memperbesar gerakan. Maka jalan formal kami tempuh dengan mengaktifkan organisasi Kemasyarakatan Tembi II, sebagai lembaga sub-dusun, atau dapat lebih mudah dipahami sebagai lembaga seperti Rukun Warga (RW).

“Dengan terlibat di organisasi Kemasyarakatan Tembi II yang secara formal diakui di struktur dusun, gerakan yang awalnya sudah dimulai dari Green Tembi maka dilanjutkan di organisasi ini. Cita-citanya sama, tapi sekarang bisa melibatkan orang lebih banyak. Meminta tiap RT mengirimkan orang untuk gotongroyong, misalnya.” (Harjono, Sekretaris Kemasyarakatan Tembi II)

Setelah kami mengelola organisasi Kemasyarakatan Tembi II, Visi dan Misi dari Green Tembi direfleksikan di organisasi Kemasyarakatan Tembi II. Banyak aktifis Green Tembi juga menduduki posisi di struktur. Kegiatan-kegiatan Kemasyarakatan Tembi II juga merupakan kegiatan yang telah jauh direncanakan sejak Green Tembi. Kemasyarakatan Tembi II memiliki akses tenaga dan dana yang lebih kuat, dengan kemampuan mengkonsolidasikan masyarakat untuk kontribusi kas dan tenaga.



Gambar x. Perubahan Bentuk Pada Gerakan di Dusun Tembi

Gerakan ini kami bangun menjadi tidak monoton dan memiliki pandangan kedepan dan dapat membawa kondisi sosial ekonomi masyarakat ke arah yang lebih baik. Rencana awal yang diinisiasi oleh Tatang dibahas secara bertahap, dimuali dari dibahas bersama Harjono. Setelah mendapat masukan dari Harjono, rencana ini dibahas di tingkat pengurus inti Kemasyarakatan Tembi II yang berisikan Ketua II, Sekretaris II, Bendahara I, dan Bendahara II. Setelahnya, barulah dibahas bersama ketua-ketua RT. Seluruh proses perencanaan ini dilakukan melalui Whatsapp, baik grup maupun percakapan pribadi.

Menghitung Kontribusi Relawan atas Respon COVID-19

Kontribusi tenaga relawan dalam bentuk ekonomi tidak kalah berharga jika dibandingkan dengan jumlah donasi atau bantuan yang diberikan oleh badan usaha, perseorangan, maupun dari desa. Berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP.102/MEN/VI/2004, Pasal 8 (2) mengatur tentang cara menghitung upah sejam adalah dengan $\frac{1}{173}$ kali upah sebulan. Upah sebulan dalam perhitungan ini menggunakan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bantul pada tahun 2021 sesuai dengan SK Gubernur No. 340/KEP/2020 tentang Penetapan Besaran UMK Kabupaten/Kota Tahun 2021 yaitu sejumlah Rp.1.842.460.

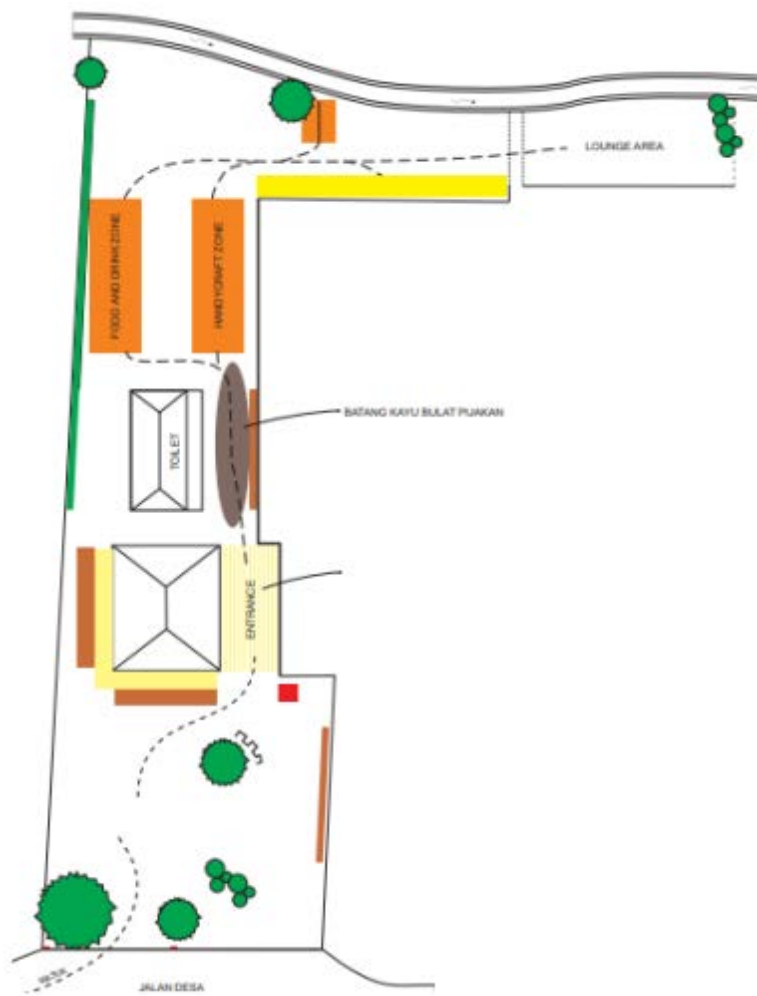
$$\frac{1}{173} \times \text{Rp. 1.842.460} = \text{Rp. 10.650}$$

Perhitungan upah sejam

Upah sejam dari tenaga kerja di Bantul sesuai dengan UMK Kabupaten Bantul tahun 2021 adalah Rp.10.650. Jumlah ini adalah patokan yang akan digunakan untuk menghitung kontribusi relawan dalam membangun ketangguhan atas Covid-19 di Dusun Tembi. Sehingga satu orang yang mengikuti seluruh kegiatan pengurangan risiko Covid-19 di Dusun Tembi setidaknya-tidaknnya telah berkontribusi Rp. 681.600.

Siklus	Kegiatan	Jumlah Jam	Upah per Jam (Rp)	Nilai (Rp)
Pencegahan	Penyemprotan disinfektan	6	x 10.650	63.900
	Pembuatan tempat cuci tangan, hand sanitizer, dan sabun cair	6		63.900
Kesiapsiagaan	Pembuatan Rumah Karantina dan Isolasi Mandiri	18		191.700
Respon	Pendataan, Pengumpulan, dan Distribusi Logistik	28		298.200
Pemulihan	Pembuatan Lumbung Pangan Kolektif	6		63.900
Total				681.600

Dikarenakan kesibukan anggota, agenda ini tidak segera terealisasi. Situasi pandemi justru memberikan waktu bagi warga untuk merealisasikan rencana ini. Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh keinginan Kemasyarakatan Tembi II untuk mengembangkan usaha sehingga dapat memperkuat ekonomi masyarakat, sekaligus ada peluang dari keluhan-keluhan wisatawan dan pengusaha tur tentang tidak ada destinasi pariwisata di Dusun Tembi yang secara spesifik untuk kuliner. Pasar Kuliner merupakan usaha dibawah organisasi Kemasyarakatan Tembi II, seksi Usaha. Warga Kemasyarakatan Tembi II membangun pasar kuliner secara bertahap di tanah kas desa yang sudah berdiri bangunan rumah gamelan, tempat pelatihan gamelan bagi anak dan remaja sumbangan Bank HSBC pasca gempa. Dalam menetapkan desain dan rencana, seorang arsitek yang juga warga Dusun Tembi secara sukarela memberikan dukungan. Rumah kayu berbentuk limasan sumbangan dari jejaring direncanakan sebagai dapur masakan-masakan yang akan dihidangkan. Bangunan ini hanya rangka saja, sehingga masyarakat dengan kas Kemasyarakatan Tembi II membeli usuk dan reng untuk melengkapi bangunan. Genteng yang digunakan adalah genteng bekas rumah sumbangan gempa yang sudah tidak dipakai lagi, dari masyarakat di wilayah Kemasyarakatan Tembi II. Dalam membangun semua ini masyarakat gotong royong secara rutin setiap hari minggu, dengan tiap RT mengirimkan lima orang personil yang dijadwal secara bergilir untuk membangun Pasar Kuliner. Selain setiap minggu, pada hari-hari biasa relawan kunci secara rutin tiap sore melanjutkan pembangunan sehingga tetap ada perkembangan walau secara perlahan. Konsumsi yang digunakan sebagian menggunakan kas Kemasyarakatan Tembi II dan sumbangan konsumsi dari warga sekitar. Pasar kuliner ini direncanakan akan menjadi wadah bagi seluruh RT di Dusun Tembi untuk menjajakan dagangan kuliner produksi rumahan. Kelak setelah Covid19 berakhir dan usaha ini berjalan secara efektif akan berdampak pada tiap RT dan mendukung perekonomian warga.



Gambar x. Desain Pasar Kuliner yang dibuat oleh Afit, seorang arsitek yang juga warga Dusun Tembi. Desain dibuat berdasarkan kesepakatan warga.

13

NGARUAT DESA SIRNAJAYA

NARASI BUMI SAVE THE CHILDREN INDONESIA

Kopi, pisang goreng, dan penganan kecil lain disuguhkan silih berganti oleh istri Pak Muslim ke meja tamu. Kami merasa sedang menghadiri sebuah perhelatan pribadi. Pesta minum kopi, hangat dan akrab, dengan Pak Muslim berada di tengah orbitnya berceloteh panjang lebar mengenai Desa Sirnajaya. Dari sekian banyak orang yang kami temui di desa, Pak Muslim termasuk yang paling banyak bicara. Sekali pantik dengan pertanyaan sederhana akan langsung disambut dengan banjir informasi dari beliau. Tawanya yang lepas dan nada bicaranya yang lantang menularkan semangat kepada para pendengarnya. Pak Muslim menikmati pembicaraan seperti kami menikmati kopi siang itu.

Gununghalu memang salah satu penghasil kopi terbaik. Varietas kopinya bukan hanya terhitung sebagai jawara nasional tapi juga internasional. Konon di tahun 2018 lalu, kopi Gununghalu termasuk salah satu yang memperoleh penghargaan AVPA Gourmet Product di pameran SIAL di Paris, Perancis. Meski begitu, warga Desa Sirnajaya bukan hanya bertani kopi. 28 RW dan 86 RT yang terbagi ke dalam empat dusun di desa ini memiliki variasi tanam yang beragam, mulai dari: nangka, sereh wangi, talas, ubi, cecenet, cabai, cincau hitam, kapulaga, selada, wortel, dan lain-lain. Pak Suhardi selaku kepala desa, punya saran yang bijak agar masyarakat tidak menanam hal yang sama, karena jumlah yang terlalu banyak akan berpengaruh pada turunnya harga.

“Dari total jumlah penduduk yang mencapai 13.500 jiwa lebih, 80% nya memang hidup dari pertanian”, kata Pak Muslim. “Ada 300 ribu hektar lebih area persawahan yang terbentang di sini. 70% area persawahan, sedangkan 25% nya pertanian tanah kering”.

Menariknya, desa Sirnajaya memiliki kelompok tani yang dikelola dengan cukup baik. Salah satu terobosan program dari kepala desa Sirnajaya periode ini adalah untuk membuat *green house* yang di dalamnya berisi puluhan varian tanaman sayur, herbal, dan pangan. Setiap Kepala Keluarga (KK) diijinkan untuk mengadopsi 60 *polybag* bibit yang mereka sukai secara gratis. Bibit-bibit ini selanjutnya akan ditanam di rumah masing-masing dan hasilnya dapat dikonsumsi untuk keluarga atau dijual. Tidak seperti perdagangan atau pertukangan, pertanian adalah salah satu sektor yang tidak terdampak banyak oleh pandemi. Itu kenapa penduduk Sirnajaya memilih bertani. Dan itu juga yang menjadi alasan jika bencana menimpa lahan pertanian di desa, penduduk akan mengalami kerugian yang sangat besar. Kemiskinan yang ditimbulkan oleh bencana bukan hal yang sederhana. Penduduk yang kehilangan penghasilan akibat sawah yang menjadi mata pencahariannya rusak merupakan potensi masalah yang perlu dipikirkan jalan keluarnya.

Di tahun 2019 lalu, Save the Children dengan saran berbagai pihak terkait, seperti BNPB, BPBD, serta pemerintah setempat melakukan asesmen ke beberapa kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang ditengarai rawan bencana. Desa Sirnajaya yang berlokasi di Kecamatan Gununghalu, Kabupaten Bandung Barat menjadi salah satu desa yang akhirnya terpilih untuk didampingi Save the Children melalui program Kesiapsiagaan Bencana untuk Kota dan Masyarakat Tangguh Bencana yang didanai oleh Google.

Menurut data yang diperoleh dari BNPB tahun 2019, jumlah kematian dan orang hilang akibat bencana di Indonesia pada tahun 2009-2018 mencapai 11.579 orang. Sungguh harga yang terlalu mahal ketika satuannya adalah nyawa manusia. Selain itu, data dari Kemendikbud tahun 2019 juga mencatat 48.000 sekolah di Indonesia terdampak oleh bencana selama 2004 hingga 2018.

Save the Children yang telah berdiri sejak tahun 1919 dan telah melakukan respon terhadap bencana di berbagai belahan dunia, tidak pernah berhenti mengedukasi masyarakat terkait pentingnya kesiapsiagaan bencana di berbagai wilayah. Mereka percaya bahwa jumlah korban dan kerusakan akibat bencana seharusnya dapat dikurangi jika kita melakukan hal-hal yang

tepat untuk mengurangi risiko jauh-jauh hari sebelum bencana terjadi.

Melalui program Kesiapsiagaan Bencana untuk Kota dan Masyarakat Tangguh Bencana ini, Save the Children bertekad mengedukasi 560 ribu masyarakat, termasuk anak-anak, terkait upaya Pengurangan Risiko Bencana (PRB) selama 1 tahun melalui berbagai pendekatan. Ini merupakan sebuah langkah penting, karena kerentanan terhadap ancaman yang ada di desa dapat dikurangi dengan meningkatkan pengetahuan masyarakat serta kapasitas mereka dalam menghadapi bencana.

Meskipun bukan perkara mudah, terutama ketika pandemi mulai terjadi di tahun 2020, para pekerja kemanusiaan Save the Children tetap mencari cara, meluangkan waktu, serta tenaga untuk mengunjungi Desa Sirnajaya. Mereka melakukan beragam sosialisasi mengenai kebencanaan, melatih fasilitator desa dan sekolah terkait pengurangan risiko bencana, membantu membentuk tim siaga bencana desa, mendampingi tim siaga bencana untuk melakukan kajian risiko bencana di desa, menyusun SOP kebencanaan, memasang tanda-tanda bahaya di lokasi rawan longsor, banjir dan gempa bumi, serta memasang petunjuk jalur evakuasi.

Secara lebih khusus, Save the Children juga mendampingi SDN Baktimulya, salah satu Sekolah Dasar yang terdapat di Desa Sirnajaya untuk membantu mereka menjadikan sekolah sebagai Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB), agar anak-anak dan seluruh warga sekolah tetap selamat dan terlindungi jika bencana terjadi.

Kerja keras memang harga yang harus dibayar, tapi kesadaran masyarakat adalah buah tak ternilai yang dapat dipetik di kemudian hari. Membuka mata warga dan membentuk perilaku baru bukan hal yang sederhana, terlebih ketika di bulan Maret pemerintah mulai melakukan pembatasan terhadap berbagai aktivitas berkumpul sesuai protokol kesehatan. Tidak sedikit kegiatan yang akhirnya harus dilakukan dengan strategi baru. Tapi jika kita melihat bagaimana tim Save the Children bekerja, kita akan percaya bahwa di tangan mereka setiap target dapat dicapai. Para pekerja kemanusiaan ini

dididik untuk bermental baja jika menyangkut keselamatan anak dan warga masyarakat.

Semua kelelahan terbayar ketika warga dan pemerintah desa Sirnajaya mulai membuka mata terhadap pentingnya kesiapsiagaan terhadap bencana. Hujan deras, angin besar, pergeseran tanah, dan patahan lempeng bumi yang bergerak memang bahasa alam, tapi manusia memiliki kontribusi untuk mengurangi risiko akibat ancaman yang hadir di sekitarnya. Langkah-langkah antisipasi dapat dilakukan oleh warga dan aparat desa untuk mengurangi risiko bencana jauh sejak sebelum bencana terjadi. Itu berarti semua pihak dapat berkontribusi. Menghadapi bencana bukan semata perihal memberi respon tanggap darurat setelah bencana, tetapi juga melakukan langkah antisipasi dengan memperhatikan semua aspek dalam kehidupan sehari-hari: ekonomi, pendidikan, agama, kesehatan, sosial, dan infrastruktur. Secara terintegrasi semua aspek mulai dibahas dalam rapat-rapat desa, lalu secara bertahap dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa. Pak Suhardi dan Pak Muslim tak henti berkeliling mengingatkan warga perihal isu kesiapsiagaan bencana di Desa Sirnajaya. Saat ceramah pengajian desa, saat kunjungan di rumah warga, atau seremonial pembukaan acara, pesan mengenai pengurangan risiko bencana selalu bergulir dari mulut mereka.

“Dulu untuk penanggulangan bencana, desa bergantung pada kebijaksanaan kepala desa”, ujar pak muslim sembari menyisip kopi hitamnya. “Itu artinya meskipun tidak ada dana desa dan tidak ada peraturan desanya, kepala desa bisa memberikan bantuan kepada warga sesuai kebijaksanaan beliau. Tapi sejak kami memperoleh banyak informasi dari Save the Children, mulai tahun ini kami berusaha menyusun kebijakan desa terkait pengurangan risiko bencana dan sengaja memasukkan anggarannya ke dalam RKPDes (Rencana ZKerja Pembangunan Desa) dan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa)”.

Proses penyusunan RKPDes ini melibatkan konsultasi dengan perwakilan seluruh elemen warga. Perempuan, tokoh agama, RT/RW, pemerintah

setempat, perwakilan sekolah dan anak muda, dikumpulkan bersama untuk menyuarakan aspirasi mereka terkait apa yang akan dimasukkan ke dalam rencana kerja untuk pembangunan jangka panjang desa enam tahun ke depan. Setelah itu, di bulan Januari 2021 nanti, aparat desa akan kembali berkumpul untuk mendiskusikan APBDes satu tahun ke depan sebelum kemudian akan diumumkan kembali secara transparan kepada seluruh masyarakat terkait komponen apa saja yang akan didanai oleh desa di tahun tersebut.

Satu benih kesadaran tumbuh, berbuah bulir kesadaran yang lain. Dukungan demi dukungan bermunculan dari berbagai pihak. Saat penyusunan RKPDes, bapak camat Gununghalu hadir dan sangat mendorong desa Sirnajaya agar menyisihkan dana khusus untuk pengurangan risiko bencana.

Perubahan di Desa Sirnajaya bergerak konstan seperti nafas ombak, kabar baik berhembus mengenai terobosan baru yang mulai dikerjakan oleh desa. Agar dapat menampung aspirasi seluruh pihak dengan lebih baik, terutama anak-anak, pihak desa memasukkan rencana pembentukan Forum Anak di tingkat desa ke dalam RKPDes tahun depan. Sebuah hadiah yang luar biasa bagi Save the Children ketika orang-orang dewasa dan lembaga pemerintahan memiliki inisiatif untuk melibatkan dan mendengarkan suara anak dalam proses penyusunan kebijakan. Forum Anak merupakan organisasi resmi yang dibina oleh pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan tujuan untuk dapat menjembatani komunikasi dan interaksi antara pemerintah dengan anak-anak di seluruh Indonesia. Forum ini dikembangkan di setiap jenjang administrasi pemerintahan, mulai dari desa/kelurahan hingga tingkat nasional. Ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memenuhi hak partisipasi anak dan untuk mendengarkan suara mereka dalam setiap kebijakan yang dibuat dan mempengaruhi kehidupan anak.

Dengan semakin kuatnya kesadaran dan keterlibatan berbagai elemen desa, proses pengurangan risiko bencana di Desa Sirnajaya berlangsung semakin

meriah. *Ka cai jadi saleuwi, ka darat jadi salebak*. Bersama-sama mereka mengkaji, menganalisis, mengevaluasi, serta memetakan risiko yang ada di desa sehingga dapat mengambil langkah-langkah untuk mengurangi risiko bencana dengan menggunakan sumber daya lokal yang tersedia. Hal ini sejalan dengan konsep Desa Tangguh Bencana dimana warga masyarakat adalah pelaku utama dalam mengurangi risiko dan meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana. Peraturan Kepala BNPB No.1 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa Tangguh Bencana menjelaskan bahwa desa tangguh bencana adalah desa yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana yang merugikan.

Dalam konsep desa tangguh bencana, masyarakat adalah aktor utama yang melakukan pengelolaan risiko bencana berbasis masyarakat, termasuk di dalamnya adaptasi perubahan iklim. Menyadari hidup mereka bergantung pada alam, Desa Sirnajaya juga mulai menyusun aturan desa untuk merawat lingkungan dengan lebih baik, misalnya aturan untuk tidak menebang pohon yang terdapat di hutan lindung dengan sembarangan, bagaimana membuat tata ruang dan bangunan rumah yang aman dan tidak memicu bencana, memperbanyak tanaman buah agar dapat diambil hasilnya tanpa perlu menebang pohonnya, dan lain-lain. Secara perlahan Pengurangan Risiko Bencana berkelindan dengan rencana pembangunan desa.

Save the Children bukan organisasi tanggung yang bekerja setengah-setengah. Gerak mereka tak berhenti hanya sampai di pendampingan. Setelah kerja keras seluruh elemen desa untuk mengurangi risiko bencana terlihat bentuknya, advokasi adalah lompatan berikutnya. Kabar baik mengenai perkembangan Desa Sirnajaya diteruskan oleh Save the Children ke BNPB. Gayung bersambut, BNPB mengundang Bapak Suhardi selaku kepala desa Sirnajaya untuk mempresentasikan praktik baik yang terjadi di desanya. Dalam waktu singkat perangkat Desa Sirnajaya berbenah, memotret bukti, membuat *power point*, menulis hasil-hasil yang telah mereka peroleh dari kerja bersama untuk disuarakan di depan pemangku kebijakan.

Pengalaman berharga bagi desa Sirnajaya, bukan hanya karena mereka dapat menunjukkan berbagai praktik baik yang berhasil mereka lakukan di desa, tapi juga karena mereka memperoleh perhatian secara langsung dari BNPB dan terhubung dengan pemangku kebijakan yang relevan dengan isu PRB. Untuk sebuah desa di lokasi terpencil seperti Sirnajaya, kesempatan untuk memperoleh perhatian dari pemerintah secara langsung adalah suguhan kesempatan yang mewah.



Gambar 2. Area persawahan di Desa Sirnajaya



Pak Suhardi mengatakan, "informasi-informasi mengenai fasilitas dan bantuan yang tersedia dari pemerintah semacam ini sangat penting bagi kami sehingga di kemudian hari desa dapat mengaksesnya secara mandiri". "Target saya adalah korban jiwa dan kerugian akibat bencana harus terus dikurangi, dan saya ingin desa saya dapat menjadi model desa siaga bencana yang dapat dicontoh oleh desa-desa lainnya", ujarnya berapi-api.

Selaku kepala Desa, Pak Suhardi berkomitmen untuk membenahi dan meningkatkan kesiapsiagaan desa sehingga setiap bencana di desa dapat ditanggulangi. Untuk mewujudkan hal ini, beliau berjanji akan terus berkoordinasi dengan BPBD dan pemerintah terkait lainnya di berbagai jenjang. "Yang penting kami minta tolong untuk diinformasikan mengenai berbagai bantuan untuk mewujudkan desa siaga yang dapat diakses, sebab sumber daya dan pengetahuan kami ini terbatas", permohonan bapak kepala desa disampaikan kepada Save the Children saat mengakhiri bincang-bincang

kami hari itu.

Bagi desa seperti Sirnajaya, bantuan tidak harus melulu berupa pendampingan. Informasi terhadap bantuan yang bisa diakses juga merupakan dukungan yang sangat berharga untuk mereka. Mempertemukan antara pihak desa dengan pemangku kebijakan terkait di berbagai level akan membuka jalan untuk membuat desa menjadi lebih maju meskipun setelah program pendampingan usai.

'Jembatan'.

Demikian istilah yang disematkan Pak Muslim untuk Save the Children. "Kalau kita ingin menyeberang, tidak ada jembatannya kita tidak akan pernah sampai. Save the Children bagi kami seperti jembatan penghubung yang menyeberangkan dan mempertemukan kami dengan sumber-sumber bantuan untuk membuat desa kami semakin berkembang", ujar pak Muslim sembari mengantar kami melewati halaman depan rumahnya yang penuh tanaman. Matahari mulai menggelincir menggeser mendung saat kami berpamitan. Senja mendekati sempurna, mewarnai kebun-kebun di Sirnajaya dengan warna jingga.

14

PAMPA SEBUAH KONSEP KETAHANAN PANGAN LOKAL DALAM SITUASI BENCANA

SADIQ. PERKUMPULAN IMUNITAS SULAWESI TENGAH

Penganekaragaman konsumsi pangan yang dilakukan melalui pengelolaan lahan akan memberikan dorongan dan insentif penyediaan pangan yang lebih beragam dan aman untuk dikonsumsi, termasuk produk berbasis sumber daya lokal. Aktivitas produksi penganekaragaman konsumsi pangan mendorong berbagai ragam sumber pangan sebagai sumber karbohidrat, protein dan zat gizi mikro. Di sisi lain, aktivitas produksi tersebut akan menumbuhkan beragam usaha pengolahan pangan usaha rumah tangga kecil, menengah, dan usaha besar. Selain dari pada itu, aktivitas ekonomi pangan diharapkan dapat meminimalkan resiko usaha pola monokultur, meredam gejolak harga, mengurangi gangguan biota dalam suatu lingkungan, meningkatkan pendapatan pelaku utama dan pelaku usaha, dan menunjang kelestarian sumber daya alam.

Penganekaragaman konsumsi pangan juga dapat mengurangi ketergantungan konsumen terhadap satu jenis pangan. Dengan demikian, maka penganekaragaman konsumsi pangan merupakan fondasi keberlanjutan ketahanan pangan dan memiliki dimensi pembangunan yang sangat luas, baik dari aspek sosial, ekonomi, politik, dan kelestarian lingkungan. Partisipasi perempuan dan laki-laki dalam penghidupan masyarakat berbasis lahan berbeda satu sama lain. Perbedaan ini memberikan corak yang juga berbeda terhadap pola pengelolaan lahan, pemilihan jenis tanaman, serta kegiatan yang mereka lakukan atas lahan. Pangan adalah kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan merupakan hak asasi setiap orang. Mengingat pentingnya memenuhi kebutuhan pangan, maka setiap negara melalui pemerintah wajib mendahulukan pembangunan ketahanan

pahan sebagai landasan bagi pembangunan sektor lain. Masalah ketahanan pangan menjadi sangat penting sekaligus rentan bermasalah pada situasi bencana, termasuk bencana wabah penyakit seperti saat pandemi COVID-19 yang hampir melanda seluruh wilayah.

Masyarakat To Po Moma dan To Po Uma di kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah secara umum memiliki sistem pengelolaan ruang hidup atau wilayah kelola yang dianut secara turun temurun. " Pembagian zonasi pengelolaan ruang hidup ini juga memberikan ruang kepada kaum perempuan masyarakat Kulawi di dalam pengelolaan pangan. Ruang atau wilayah kelola yang otoritas pengelolaannya diberikan pada perempuan."

Sebagai masyarakat adat, masyarakat Kulawi memiliki seperangkat nilai, norma dan aturan yang menjadi landasan **hubungan** antara **masyarakat** dengan **masyarakat** lainnya, **masyarakat** dengan **alam** dan **masyarakat** dengan **Tuhan** , Masyarakat Kulawi dengan sistem budidaya pertanian tradisional: ladang berotasi (gilir balik), memiliki nilai-nilai kearifan lokal yang selama ini telah terbukti menghasilkan suatu sistem pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan. Dalam pemanfaatan ruang tradisional, masyarakat Kulawi membagi hutan dalam beberapa zona yakni *wana ngkiki*, *wana*, *pangale*, *oma*, *pampa* dan *taolo/ dampolo*.

1. *Wana ngkiki* merupakan hutan rimba larangan. Wana merupakan hutan yang tak diolah jadi lahan pertanian.
2. Area ini berfungsi sebagai kawasan tangkapan air dan hanya mengambil hasil hutan non kayu seperti rotan, getah, damar, bahan obat-obatan dan wewangian. Ciri fisik pohon di area ini berdiameter besar dan rapat. Kepemilikan bersifat komunal dan terletak di hulu, atau pegunungan.
3. *Pangale*, adalah hutan yang pernah diolah jadi lahan pertanian dan telah ditinggalkan selama puluhan tahun lalu jadi hutan kembali. Selain tempat pemanfaatan hasil hutan termasuk kayu, kawasan ini jadi cadangan lahan pertanian. Kepemilikan privat dan hukum berlaku bersifat larangan atau pantangan.
4. *Oma*, adalah bekas ladang yang sengaja diistirahatkan untuk waktu paling lama 25 tahun. Setelah itu akan jadi *pangale*.

5. Oma terbagi tiga jenis berdasarkan waktu istirahat, yakni *oma ntua* (16-25 tahun), ciri pohon besar dan tanah subur; *oma ngura* 3-15 tahun, pohon kecil didominasi tumbuhan perdu, dan *oma ngkuku* kurang tiga tahun dengan ciri ditumbuhi alang-alang, perdu dan rumput.
6. Lalu *pampa*, iakebun yang cenderung datar dan tak jauh dari pemukiman. Sebelumnya, wilayah ini *oma* karena letak strategis jadi kebun.
7. *Taolo/ dumpolo* adalah kawasan dengan larangan ketat, dengan alasan apapun tak boleh diolah. Bedanya, *taolo* ini kawasan miring di satu sisi rawan longsor dan banjir. Sementara *dumpolo*, miring di kedua sisi dan bertemu pada satu titik. Kepemilikan kawasan ini komunal dan berlaku hukum pantangan.

Salah satu pola yang sudah turun temurun di komunitas lokal (Kulawi) dalam konteks ketahanan pangan di kenal dengan istilah Pampa. Pampa adalah satu kearifan lokal dalam menjaga ketahanan pangan keluarga, Pampa merupakan wujud dan upaya dalam mendukung ketahanan pangan. "Bagi perempuan Kulawi, Pampa memiliki berbagai nilai yang diantaranya adalah nilai ekonomi. Pampa dianggap sebagai 'supermarket sayuran' karena segala sesuatu yang menjadi kebutuhan sayuran rumah tangga dapat tersedia tanpa mengeluarkan biaya yang besar"

Tak hanya itu, nilai sosial di lokasi Pampa, kaum perempuan dapat berinteraksi satu sama lain tanpa mengenal batasan status sosial, disamping itu pula memiliki nilai kemandirian, Pampa menjadi tempat atau media bagi kaum perempuan untuk dapat membuktikan dan membentuk jati diri sebagai sosok-sosok yang tangguh dan mandiri. Dalam pengelolaan pampa selalu dikerjakan oleh kaum perempuan dengan sistim kerja "mome ala pale". Sistim kerja ini adalah sistim kerja bergilir yang dilakukan secara berkelompok yang sudah menjadi budaya perempuan adat Topo Moma di kulawi sejak turun temurun. Hampir tidak kelihatan peran laki - laki di wilayah pampa, karena hampir semua pekerjaan dari memaras rumput, menanam, membersihkan hingga panen semuanya dikerjakan oleh kaum perempuan.

Pampa sendiri bagi komunitas perempuan adat kulawi selain memiliki nilai sosial juga memiliki nilai - nilai spiritual. Di lokasi pampa perempuan - perempuan adat dapat berinteraksi satu sama lainnya tanpa ada batasan. Dalam kegiatan pengelolaan pampa juga perempuan adat melakukan ritual - ritual adat sehingga ada hal -hal yang menjadi pantangan atau "palia" yang tidak boleh dilanggar. Pengetahuan ini merupakan nilai - nilai kearifan komunitas yang dipercaya jika dilanggar maka tanaman pangan akan terserang hama atau hasil tanaman palawija bisa menjadi rusak atau busuk buah.

Pampa juga dianggap sebagai "supermarket" bagi komunitas perempuan adat, karena segala sesuatu yang menjadi kebutuhan dasar khususnya kebutuhan rumah tangga semua tersedia, hal yang membedakan dengan masyarakat lainnya yang tinggal di kota. Selain itu juga pampa menjadi sekolah bagi anak-anak komunitas, karena pada usia bermain anak-anak To Po Moma dan To Po Uma lebih banyak menghabiskan waktu bermainnya di pampa bersama dengan ibunya. "Pampa" yang bagi masyarakat Kulawi merupakan lahan berbentuk kebun yang cenderung datar dan tak jauh dari pemukiman yang didalamnya beragam jenis tanaman sayur, ubi-ubian, jagung, rica/cabe serta tanaman penghasil bumbu dapur dan sebagainya.

Kecamatan Kulawi adalah salah satu kecamatan yang tingkat ancaman dan risiko bencananya cukup tinggi ancaman itu meliputi gempa bumi, banjir bandang, tanah longsor . pada kejadian gempa bumi 28 September 2018 wilayah kulawi juga terkena dampak akibat gerakan patahan sesar palu koro, ada banyak bangunan yang rusak, korban jiwa, termasuk sarana dan prasarana. Pasca gempa bumi 28 september 2018 , wilayah kulawi terisolir/akses transportasi darat terputus selama 3 minggu akibat longsor sepanjang jalan trans palu kulawi dan dukungan bantuan logistic hanya bisa melalui udara . Pampa menjadi kekuatan disaat akses jalan ke Kulawi tertutup. Bahkan pada saat terjadi bencana, desa tetangga yang tidak terdampak parah menjadi penyuplai bahan pangan bagi pengungsi yang ada di Bolapapu, Boladangko dan sekitarnya. Saat bencana kebutuhan pangan sangat tersedia di komunitas, bahkan ada yang rela membawa ke palu dengan jalan kaki, untuk diberikan kepada keluarga yang juga tinggal di pengungsian. Pada kondisi tersebut kebun (pampa) yang di miliki oleh masyarakat dapat memasok kebutuhan

dapur umum di lokasi pengungsian selama 2 minggu dan juga memenuhi kebutuhan rumah tangga para penyintas. Di pengungsian, para ibu-ibu juga tetap melakukan budidaya sayur sayuran dan rica di area Huntara, untuk kebutuhan sehari-hari. Bahkan ada bisa menjual, kepada sesama warga di sekitar huntara.



Ket Gambar : Perempuan To Po Uma dan To Po Moma sedang berada lahan Pampa

15

ERUPSI 2020 DAN 2021 MEMATIK API KETANGGUHAN KOMUNITAS DI SISI TENGGARA GUNUNG SEMERU

WAHYU SUGENG TRIADI DAN SOFA QUDUS

Kontributor :

1. Agus Wijaya (Komunitas Kobar Bromo-Semeru)
2. Nursamsi (Komunitas Relawan Kaki Gunung Semeru)
3. Yanto (Komunitas Relawan Kaki Gunung Semeru)
4. Cak Yo (Komunitas Kobar Bromo-Semeru)
5. Bayu Deny Alfian (Gustiallah Foundation)
6. Nurkholiq (Paseduluran Merapi-Semeru)

Gunungapi Semeru

merupakan gunungapi bertipe strato dengan kubah lava (cone?), dengan puncak tertinggi Mahameru (3676 mdpl) secara administratif terletak di Kabupaten Malang dan Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Aktivitas Gunungapi Semeru saat ini terpusat di Kawah Jonggring Saloko yang terletak di sebelah tenggara puncak Mahameru yang terbentuk sejak 1913. Letusan Gunungapi Semeru umumnya bertipe vulkanian dan strombolian, berupa penghancuran kubah (cone?) dan/atau lidah lava, serta pembentukan lidah lava baru.⁴³

“Saat saya kecil, tahun 1994 juga ada awan panas yang turun hingga ke Sumberwuluh, cuma pelan dan tidak sampai merobohkan jembatan Gladak Perak. Kalau 2021 itu sampai 3 kali guguran, yang paling besar itu yang ke-tiga, sampai merobohkan Gladak Perak dan Sampai menimbun banyak rumah di Kamar Kajang”, Cerita Nursamsi sambil mengingat kejadian erupsi saat beliau masih kecil

⁴³<https://vsi.esdm.go.id/index.php/gunungapi/aktivitas-gunungapi/3854-press-release-aktivitas-vulkanik-g-semeru-jawa-timur-4-desember-2021>

hingga kejadian 2021. *“Kebiasaan orang sini seperti itu, kalau ada banjir lahar, mereka ga lari, ga takut, karena sudah terbiasa, ga taunya yang belakang jebol”* tambah Nursamsi dengan nada prihatin.

Masyarakat di sisi tenggara Semeru banyak masyarakat yang aktifitasnya terpusat di wilayah sungai rawan banjir lahar hujan dari Semeru, hal tersebut karena banyak masyarakat yang bermatapencarian sebagai penambang pasir. Pasir lumajang memang menjadi komoditas yang menjanjikan, akibatnya aktifitas pertambangan semakin masif hingga ke wilayah bagian hulu di Desa Supiturang dan Desa Sumbermujur.

Kondisi ini menjadi tantangan di Masyarakat ke depan, pasalnya peristiwa erupsi 2021 telah banyak memakan korban, yang sebagian besar adalah penambang ataupun supir pengangkut pasir. Erupsi sebelumnya pada 2020, banyak memicu masyarakat untuk membangun ketangguhan komunitas, dan hikmah atas erupsi 2021, semakin banyak masyarakat yang sadar pentingnya membangun ketangguhan di Masyarakat. Banyak pihak yang terlibat dalam membangun ketangguhan di Semeru, bahkan jauh sebelum erupsi.

Rentetan Kejadian Erupsi Semeru

Dalam pencatatan oleh PVMBG, aktivitas semeru dari hasil pencatatan tersebut mulai pada tahun 1818 dan hingga 2021 sudah tercatat terjadi peningkatan aktivitas gunungapi Semeru sebanyak 99 kali dengan intensitas yang berbeda-beda. Dari penuturan masyarakat, erupsi dengan intensitas tinggi terjadi pada tahun 1941. *“Leleran (guguran?) lava itu sampai berbulan-bulan hingga tahun 1942, mulai September hingga Januari, mengarah ke Besuk Semut di Dusun Bonseket (Desa Sumbermujur) dan sekarang masyarakat menyebut wilayah leleran lava tersebut sebagai Watu Kobong, Bukit Ngglendang, namun tidak sampai ke permukiman”* tutur Agus Wijaya.

Masyarakat mengingat bahwa erupsi Gunungapi Semeru mengalami perubahan arah. Jika pada tahun 1941-1942 arah luncuran guguran lava mengarah ke Besuk Semut,

tahun-tahun erupsi berikutnya mengalami perubahan arah luncuran. *“Sebelum ini (erupsi 2020-2021), erupsi Gunung Semeru mengarah ke Besuk Bang sama Besuk Kembar (arah selatan), namun karena jebonya alur aliran di tahun 60-an (1967?), akhirnya arah aliran material erupsi berubah ke arah Besuk Koboan (Arah Tenggara)”*. Tutar Agus Wijaya, Ketua Tim Siaga Bencana Desa Sumbermujur tahun 2012. *“Karakter dari semeru itu Normal-Aktif, satu jam itu bisa meletup hingga 3 - 4 kali.”* Tambahnya.

Di Generasi Agus Wijaya dan Nursamsi, keduanya hanya mengalami erupsi di Tahun 1994 dan erupsi baru-baru ini (2020 dan 2021). *“Lalu 2020 itu ada guguran, jam 2 malam, saat itu ada informasi dari PGA dan kami bangunkan orang untuk evakuasi, baru 5 orang yang bangun, abu sudah datangm namun ga sampai atap-atap ambrol, karena abu relatif tipis”*. Kesaksian Nursami yang tinggal di wilayah KRB III Gunungapi Semeru.

Dari penuturan masyarakat, karakteristik erupsi Gunungapi Semeru dari 1994 hingga 2021 hampir sama, setiap terjadi erupsi terjadi awan panas dan selalu diikuti dengan banjir lahar panas (lahar hujan dengan suhu tinggi), dan lahar dingin (lahar hujan dengan suhu normal). *“Itu yang saya saksikan tahun 1994, hingga awan panas menghabiskan perkampungan Hindu, paginya itu masih terjadi banjir lahar. Di tahun 2020 dan 2021 hampir sama, ada awan panas, lalu banjir lahar besar”*, jelas Nursamsi. Sambungnya, erupsi di tahun 1994, 2020, dan 2021 selalu terjadi di musim penghujan, tidak jauh dari bulan Desember dan Januari.

Merekam Ingatan Erupsi 2021

Dilansir dari portal kabar VSI ESDM, selama 1 hingga 30 November 2021, gunungapi terlihat jelas dan kadang tertutup kabut. Teramati hembusan gas dari kawah utama berwarna putih dan kelabu dengan intensitas sedang hingga tebal, dan ketinggian sekitar 100-600 meter dari puncak. Erupsi masih terjadi namun tidak menerus, menghasilkan kolom erupsi berwarna kelabu dengan tinggi maksimum

300 - 600 meter dari puncak.⁴⁴

Pada 1 Desember 2021 terjadi awan panas guguran dengan jarak luncur 1.700 meter dari puncak, atau 700 meter dari ujung aliran lava, dengan arah luncuran ke tenggara. 4 Desember 2021 mulai pukul 13.30 WIB terekam getaran banjir, kemudian pada 14.50 WIB teramati awan panas guguran dengan jarak luncur 4 km dari puncak atau 2 km dari ujung aliran lava ke arah tenggara (Besuk Koboan), tetapi hingga saat ini sebaran jarak luncur detail belum dapat dipastikan.⁴⁵

“Erupsi 2021 itu sebenarnya sudah ada gejala, tanggal 1 Desember itu sudah ada guguran 7 km dan kami sudah mengupayakan evakuasi warga secara mandiri. Karena luncuran hanya 7 km maka ga sampai ke Curah Koboan, dan masyarakat malah balik menghujat kami. Saat 4 Desember kami 4 orang sudah turun ke sungai untuk evakuasi penambang, namun ga ada orang percaya karena kejadian tanggal 1 itu.” Tuter Nursamsi dengan raut kecewa.

Nursamsi dan relawan lainnya mendapatkan informasi dari PGA kalau dipuncak hujan deras, dan terekam getaran 25 mm namun tidak dijumpai material yang turun. Setelah 3 relawan turun ke sungai, ada 20 - 30 orang yang beraktifitas di sungai, naasnya setelah berada di tengah-tengah sungai lahar hujan dengan suhu tinggi tiba-tiba datang. Setelahnya tiba-tiba material surut, semua relawan naik dari sungai dan menginstruksikan semua yang ada di sungai untuk segera evakuasi.

Selepas itu, banjir lahar hujan datang dengan cepat dan menggulung, Curah Koboan dikepung awan panas dari 3 arah. *“Ahirnya saya lari ke mushola, anak-anak TPA saya masukan ke mushola, setelah pintu ditutup awan panas datang, merah itu warnanya di luar, menghantam mushola, kami belindung di pengimaman yang konstruksinya paling keras. Setelahnya gelap dan saya suruh semua baca istighfar dan doa-doa sebisanya. Temboknya panas, makannya orang-orang yang lari banyak yang terbakar. Sampai setengah 5, baru ada sinar matahari masuk dan kami bisa keluar dengan selamat”.* Tuter Nursamsi menceritakan

⁴⁴<https://vsi.esdm.go.id/index.php/gunungapi/aktivitas-gunungapi/3854-press-release-aktivitas-vulkanik-g-semeru-jawa-timur-4-desember-2021>

⁴⁵<https://vsi.esdm.go.id/index.php/gunungapi/aktivitas-gunungapi/3854-press-release-aktivitas-vulkanik-g-semeru-jawa-timur-4-desember-2021>

kisahanya.

Pengalaman erupsi 2021 menjadi pengalaman mencekam bagi Nursamsi dan masyarakat Dusun Curah Koboan lainnya, kondisi panik juga dirasakan Agus Wijaya dan rekan-rekannya di Desa Sumbermujur, Desa penyangga bagi masyarakat Curah Koboan. Dengan pengalaman yang didapatkan dari proses fasilitasi Tim Siaga Desa dari Kappala Indonesia di tahun 2012, secara spontan Agus Wijaya mengambil peran untuk ikut mengupayakan lokasi evakuasi bagi masyarakat Curah Koboan.

“Setelah kami dapat kabar jam 3 ada erupsi, teman-teman langsung bergerak ada yang bergerak ke Curah Koboan, ada yang ke pos pantau Gunung Sawur. Akhirnya kami berusaha mencari kendaraan untuk evakuasi, yang pertama berusaha mengevakuasi masyarakat yang ada di Kajar Kuning, langsung diarahkan ke Penanggal, namun karena terlalu lama untuk bolak balik ke Penanggal, maka kami langsir di pertigaan Sumbermujur, dan saya ikut ngurusi di Balai Desa Penanggal.”

Cerita Agus Wijaya.

Dengan bermodal kepingan-kepingan ingatan yang masih tersisa dari proses bersama Kappala Indonesia saat membangun Tim Siaga Desa di Desanya, Agus Wijaya mencoba menerapkan sistem desa penyangga, sebisanya. Agus Wijaya mengumumkan kepada semua warganya yang masih berkerabat dengan warga Curah Koboan untuk menjemputnya di Balai Desa Sumbermujur agar mendapatkan tempat pengungsian yang lebih nyaman di rumah kerabatnya. Banyak masyarakat berbondong-bondong ke Penanggal dan bisa ditangani hingga malam hari. Baiknya, 900 penyintas di Sumbermujur dapat terkondisikan di rumah kerabatnya, hanya tersisa 100 orang yang bertahan di Balai Desa Sumbermujur malam itu.

“Kalau saya sendiri, kalau saja dulu kami tidak melakukan proses itu bersama Kappala Indonesia, mungkin saat itu saya kebingungan mau apa. Setidaknya walaupun sedikit saya pernah dengar, dan pernah simulasi.” Tambahnya haru.

Respon baik ini belum diimplementasikan di semua desa penyangga sekitar KRB Semeru, praktik baik yang dilakukan Agus Wijaya hanya dapat ia maksimalkan di desanya, masih ada banyak penyintas yang tinggal di pengungsian terpadu Lapangan Desa Penanggal, Kantor Kecamatan Candipuro, dan sekitarnya, serta

banyak lagi yang masih harus mengontrak rumah sendiri demi kenyamanan keluarganya. Kondisi ini berlangsung hingga 6 bulan sebelum penyintas diizinkan untuk menghuni hunian sementara atau hunian tetap yang dibangun.

Gerak Ketangguhan dari Masa Lalu ke Masa Sekarang

Pasang Surut Kobar Bromo Semeru dan Tim Siaga Desa

Bak gemulai ombak samudra, membangun ketangguhan di masyarakat selalu mesra dengan pasang surut. Namun layar harus tetap terbentang, menangkap angin untuk mendarat didermaga impian. Nampaknya ini kiasan yang dapat mewakili pengalaman Agus Wijaya dalam membangun ketangguhan di wilayahnya.

Mulai tahun 2012, Agus Wijaya bersama rekan-rekannya dipertemukan dengan Kappala Indonesia, hingga tahun 2013 dikenalkan dengan upaya pengurangan risiko bencana. Membangun proses hingga melahirkan jejaring komunitas masyarakat Gunungapi Semeru yang dinamakan Kobar Bromo Semeru. Dengan proses ini, Agus Wijaya terkoneksi dengan komunitas masyarakat lain di sekitar lingkaran 8 antara Gunungapi Semeru dan Bromo dengan Tim Siaga Desa-nya. Di Desanya, ia banyak merekrut pemuda dan masyarakat yang memiliki semangat bersama untuk membangun ketangguhan di desanya.

“Pertama, kami diberi pemahaman mengenai ancaman, menilai risiko, kemudian menganalisa ancaman, setelah itu kami diberi pembelajaran untuk pemetaan, membuat peta bencana. Kami mengidentifikasi beberapa ancaman disini, awalnya kami gali dari berbagai masyarakat untuk mengidentifikasi beberapa ancaman yang pernah terjadi, saat itu ada banjir, longsor, puting beliung, jadi ada beberapa ancaman yang kami identifikasi, hanya yang paling berbahaya menurut kami adalah ancaman erupsi gunung Semeru, hingga penyusunan renkon, PPGD, dan sampai tuntas, semuanya kami pelajari.” Terang Agus Wijaya sembari mengumpulkan ingatan 10 tahun silam.

Praktik baik membangun proses pengurangan risiko bencana di desanya, tidak bisa dipertahankan dalam tahun-tahun berikutnya. Agus Wijaya menceritakan bagaimana salah satu upaya membangun Radio Komunitas di Desa Sumbermujur untuk membangun kesiapsiagaan masyarakat, sempat ramai untuk beberapa tahun semenjak dibangun, siaran setiap selepas maghrib dan masyarakat antusias menyimak di *channel*-nya. Hingga naasnya tower pemancar tersambar petir, dan hingga saat ini tidak dapat dibangun ulang karena keterbatasan Tim Siaga Desa saat itu.

Tim Siaga Desa pada tahun yang sama juga terbentuk di Desa Oro-Oro Ombo Kecamatan Pronojiwo. Difasilitasi oleh Kappala Indonesia, Mardzuki dkk mulai mengenal upaya pengurangan risiko bencana berbasis komunitas. Selama setahun lebih berproses bersama kawan lintas desa sepanjang ring 8 Bromo-Semeru dalam Kobar Bromo-Semeru.

“Jadi secara ga langsung, pembelajaran saat periode 2012-2013 dulu itu kan ada hiatus hingga 2021 kemarin (8 tahun), tapi masih dapat terekam apa yang kami pelajari saat itu (2012-2013)”, tambah Agus.

Pengetahuan yang didapat dalam praktik PRBBK di Kawasan Rawan Bencana Bromo-Semeru meninggalkan bekas yang baik, walaupun sekian lama gerakan berhenti, namun memori pengetahuan terekam dengan baik. Tanpa dikordinasi, setiap aktor dalam PRBBK di Kobar Bromo Semeru merespon peningkatan aktivitas Gunungapi Semeru semenjak erupsi 2020 pada sektor peran masing-masing.

Gerak Relawan Lokal Pasca Erupsi 2020

Pasca erupsi Gunungapi Semeru tahun 2020, sebagian masyarakat mulai menyadari akan ancaman erupsi Gunungapi Semeru yang lebih besar. Sebagian masyarakat mulai mencari tahu sendiri mengenai kondisi Gunungapi Semeru pasca erupsi tahun 2020. Diantaranya adalah Nursamsi dan kawan-kawannya di Dusun Curah Kobo'an Desa Supiturang dan Murcholis dan kawan-kawannya di Dusun Kampung Renteng Desa Sumberwuluh. Nursamsi dan lainnya mengamati secara mandiri

bagaimana erupsi 2020 hanya menggugurkan sebagian dari material yang menumpuk di puncak Jonggring Saloko.

“Setelah 2020, dan tidak terjadi apa-apa, nyatanya kubah lava (cone?) ini tidak turun semua, kita juga berfikir, ini yang jatuh hanya sebagian, ini kalau sisanya jatuh mungkin akan lebih parah dari sebelumnya. Dan kami bincangkan setiap hari bersama kawan-kawan dengan ronda dan jaga pos disini (Dusun Curah Kobo’an)” Ungkap Nursamsi

Gerakan Nursamsi dkk terpicu dari kepedulian ayahnya yang semenjak masa mudanya menaruh perhatian lebih dalam mengamati perilaku Gunungapi Semeru sebagai relawan, dan penjaga pintu air. Dari situ muncul kesadaran untuk melakukan upaya pengurangan risiko, walaupun hanya bersama 9 orang lainnya.

Semenjak erupsi Gunungapi Semeru 2020, Nursamsi dan koleganya membangun komunikasi dengan komunitas eksternal, RAPIDA Jawa Timur dan SAR Surabaya. Dari relasi itu Nursamsi menerima hibah alat komunikasi radio berupa HT dan Mini RIG untuk membangun komunikasi antar masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana Gunungapi Semeru. Termasuk setelahnya Gusdurian Peduli turut serta dalam mendorong upaya pengurangan risiko bencana dengan memberikan HT.

Dengan sumber daya yang ada Nursamsi dan kawannya berupaya terus memantau perkembangan aktivitas Gunungapi Semeru dan menginformasikannya ke seluruh masyarakat, baik melalui *tutur tinular* ataupun menggunakan alat komunikasi radio yang telah terhubung di beberapa desa di kawasan rawan bencana Gunungapi Semeru.

Cak Yo, salah satu aktor di komunitas Kobar Bromo Semeru yang tinggal di Senduro dan beraktifitas dalam dunia pendakian di Gunungapi Semeru kebersamai kawan-kawan pemuda Desa Oro-Oro Ombo pasca erupsi 2020. Bermodalkan pengetahuan yang didapatkan selama proses pembelajaran bersama Kappala Indonesia di tahun 2012-2013, mengumpulkan pemuda-pemuda di Desa Oro-Oro Ombo Kecamatan Pronojiwo.

“2020 ngobrol dengan kelompok pemuda di Pronojiwo, mereka punya keinginan untuk membangun kesiapsiagaan, lalu mereka punya keinginan untuk membuat gardu pandang Semeru, agar mereka bisa mengamati Gunung Semeru sendiri dan menyampaikan ke masyarakat sendiri, karena info terkait aktivitas Semeru tidak semua masyarakat menerimanya. Alhamdulillah dengan membangun komunikasi dengan Pos Pengamatan Gunungapi Semeru, beberapa relawan lokal masuk di grup WA” Ungkap Cak Yo.

Dari penuturan itu, erupsi Gunungapi Semeru 2020 menjadi momentum kesadaran bagi masyarakat lokal untuk menaruh perhatian lebih dalam upaya pengurangan risiko bencana di wilayahnya masing-masing. Berkolaborasi dengan berbagai pihak baik internal maupun eksternal, bersama-sama mengupayakan keselamatan bagi seluruh masyarakat dari ancaman erupsi Gunungapi Semeru.

Memantau Semeru dari Berbagai Sisi

Dalam perkembangannya, setelah erupsi Gunungapi Semeru 2021 telah memantik api lebih besar dalam mengupayakan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi ancaman erupsi. Banyak lembaga eksternal yang masuk berkolaborasi dengan relawan lokal untuk mengupayakannya. Salah satunya REKGS (Relawan Kaki Gunung Semeru), berkolaborasi dengan SAR Surabaya, HDCI, dan IR-Box bersama-sama membangun sistem pemantauan berbasis kamera pantau atau CCTV. Relawan Lokal Gusti Allah Foundation yang berbasis di Oro-Oro Ombo membangun gardu pantau dengan pohon pinang dan rumah siaga bencana. Serta, UPN ‘Veteran’ Yogyakarta melalui Pusat Studi Manajemen Bencana bertandang ke Semeru untuk mendukung sistem peringatan dini dengan menambah pemantauan curah hujan, getaran banjir, dan kamera bersama REKGS dan Gusti Allah Foundation.

REKGS dengan dukungan fasilitas kini memantau aktivitas visual Gunungapi Semeru dari sisi sungai Besuk Kobo’an dan Dusun Sumpersari yang berbasis internet dan dapat diakses melalui aplikasi Jaga Semeru. Selain itu, dengan fasilitas komunikasi radio dapat menyebarluaskan informasi jika terjadi banjir lahar hujan

ataupun guguran awan panas yang terpantau kamera. Dengan dukungan perangkat pemantauan curah hujan, kelembaban, kecepatan dan arah angin, dan getaran banjir diharapkan dapat meningkatkan upaya diseminasi informasi sebagai untuk mendeteksi ancaman lebih dini.

Sejalan dengan upaya relawan lokal bersama Gusti Allah Foundation. Relawan lokal membangun menara pantau di berbagai dusun yang rawan bencana dilengkapi dengan teleskop untuk mengupayakan kesiapsiagaan masyarakat. Dengan menara pantau, masyarakat dapat secara langsung mengamati visual gunungapi dengan sistem ronda bergilir. Selain itu, GAF juga sedang mengupayakan pembangunan rumah siaga bencana dalam rangka mengorganisir upaya-upaya pengurangan risiko bencana, baik melalui pengamatan yang terintegrasi mengenai aktivitas visual gunungapi, pemantauan curah hujan, peningkatan kapasitas masyarakat, hingga upaya penyebarluasan informasi bahaya.

Pemantauan aktivitas Gunungapi Semeru yang dilakukan oleh masyarakat dengan berbagai metode diharapkan dapat mengupayakan peringatan dini yang maksimal demi mengurangi risiko bencana erupsi Gunungapi Semeru yang dapat terjadi sewaktu-waktu.

Relawan Masuk Sekolah di Desa Oro-Oro Ombo

Pengalaman erupsi Gunungapi Semeru 2021 menjadi ingatan yang melekat bagi masyarakat di Oro-Oro Ombo dan sekitarnya. Mereka masih ingat betul bagaimana situasi yang mencekam pada 4 Desember 2021, hingga keadaan yang belum pulih 100% hingga tulisan ini terbit. Begitupula yang terjadi pada siswa-siswa SMP Negeri 2 Pronojiwo saat itu, proses belajarnya terganggu, hingga rasa khawatir yang melekat pada dirinya karena ancaman erupsi bisa terjadi saat mereka sedang belajar di kelas.

Bayu dan kawannya di GAF, berinisiasi untuk membangun upaya pengurangan risiko di sekolah, SMP Negeri 2 Pronojiwo. Dengan sambutan baik dari pihak sekolah, relawan bisa masuk berinteraksi dengan siswa, demi menciptakan siswa sebagai agen pengurangan risiko di sekolah dan masyarakatnya.

Upaya-upaya peningkatan kapasitas kepada siswa dilakukan setiap kegiatan pramuka rutin di sekolah. Relawan diberi akses yang leluasa untuk memberikan pemahaman siswa mengenai pengurangan risiko bencana. Bayu dengan senyum bangganya, menceritakan bagaimana harunya, menyaksikan siswa aktif dan kritis dalam memahami bahaya di sekitarnya.

“Maksud saya masuk ke sekolah, berinteraksi dengan siswa-siswa SMP, berharap bahwa anak-anak sedini mungkin harus dikenalkan dengan upaya pengurangan risiko. Harapan lebih luasnya, jika siswa mendapatkan pengetahuan baru di sekolahnya, minimal dia pasti akan menceritakannya kepada orang tua dan orang-orang di sekitarnya. Dari situ pengetahuan pengurangan risiko bencana dapat meluas, dari sekolah hingga ke masyarakat”, tutur Bayu.

Harapan Bayu dan GAF sebagai relawan lokal, mengupayakan kesadaran pengurangan risiko semenjak dini akan menjadi modal ketangguhan utama bagi generasi muda. Secara berkelanjutan, anak-anak remaja yang menjelang dewasa ini akan melangkah bersama dengan upaya pengurangan risiko yang didapatkan di sekolah melalui program tersebut.

Radio Komunitas Desa Sumberwuluh Mengudara

Erupsi Gunungapi Semeru tahun 2020 menggugah kesadaran Nurkholiq di Desa Sumberwuluh untuk menaruh perhatian lebih ke upaya pengurangan risiko bencana. Aktivitasnya sebagai penambang pasir manual di Sungai Besuk Kobo'an diikuti dengan memprotes upaya penambangan yang merusak lingkungan dan memperluas risiko bahaya di masyarakat.

Hingga erupsi 2021, banjir lahar hujan menerjang dusunnya di Kamar Kajang. Peristiwa itu semakin menggugah semangatnya untuk terlibat dalam upaya pengurangan risiko bencana di wilayahnya. Setelahnya, Nurkholiq dan kawan-kawannya membangun komunikasi dengan masyarakat Merapi, dan membuat paguyuban PADMESEM (Paseduluran Merapi Semeru). Belajar dari apa yang dilakukan oleh Radio Komunitas di Merapi bersama Sukiman, bersama-sama PADMESEM Nurkholiq menggunakan ruang dibelakang rumahnya sebagai studio Radio Komunitas Semeru.

Didukung dengan peralatan dari solidaritas masyarakat Merapi, kini Radio Komunitas Semeru sudah mengudara. Setiap hari secara bergilir, Nurkholiq dan kawan-kawannya memulai siaran semenjak setelah waktu maghrib hingga 11 malam.

Bagi Nurkholiq, keberadaan radio komunitas dapat secara langsung memberikan informasi alternatif diluar media mainstream yang populer sekarang ini. Mengingat di desanya tidak semua masyarakat memiliki HP android dan dapat mengakses media mainstream. Radio komunitas menjadi media yang dapat diakses oleh masyarakat desa, karena sebagian besar masyarakat pasti memiliki radio.

Setiap harinya, radio komunitas selalu menyiarkan informasi dari Pos Pengamatan Gunungapi Semeru yang dikirim secara langsung setiap 6 jam sekali. Siaran juga diisi dengan pengetahuan dan diskusi tentang pengurangan risiko bencana untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat, dan juga selingan berupa pemutaran musik *by request* dari pendengarnya.

Kini, pendengar radio komunitas tidak hanya pada lingkup Desa Sumberwuluh saja, namun sudah meluas ke kecamatan-kecamatan di sekitarnya, bahkan juga hingga ke luar daerah. Ini menunjukkan antusiasme masyarakat dengan kehadiran radio komunitas. Dengan mudah informasi dapat didistribusikan dengan baik secara luas, hingga sekarang masyarakat tidak lagi harus mendekati lokasi yang berbahaya untuk mendapatkan informasi bahaya.

Grebek Syuro: Membangun Kesadaran Masyarakat dengan Tradisi

Masyarakat Desa Sumbermujur, dimotori oleh Pokdarwis Desa dan Agus Wijaya berusaha menggali dan melestarikan kembali budaya lokal yang sempat hilang dari kehidupan masyarakat Desa Sumbermujur. Bermodal penuturan cerita yang kuat, bahwa sebelum kawasan wisata hutan bambu dibuka untuk kegiatan pariwisata, di tempat tersebut biasanya dilakukan penanaman kepala sapi.

Grebek Suro dilaksanakan setiap tanggal 1 Suro, dengan 'barikan', yaitu Membawa ingkung, tumpengan, dan hasil bumi. Puncak daripada ritual adalah menanam kepala sapi di sumber mataair. Bagi masyarakat, ini adalah perwujudan rasa syukur bahwa mereka dilahirkan di tanah ini dengan rezeki yang melimpah, dan alam yang damai, meskipun mereka tau bahwa tempat tinggalnya berada di lereng gunung yang ancaman bahayanya besar, tapi sampai saat ini sudah banyak generasi dan turun temurun masih diberi keselamatan.

"Ceritanya disitu adalah penolak bala, karena menurut penuturan dari orang-orang tua terdahulu, selain menjaga sumber mataair yang ada, ini juga rezeki yang melimpah yang diberikan oleh Allah SWT, kami juga harus menjaga yang di atas (Gunung Semeru), karena Gunung Semeru itu bukan tiba-tiba ada, tapi ada ceritanya", Ungkap Agus Wijaya.

Cerita yang turun menurun, di Hutan Bambu ada Sumur Windu yang kedalamannya tidak dapat dideteksi. Namun Agus tidak menemukan sumur tersebut diseluruh wilayah Hutan Bambu. Bagi Agus, itu adalah siasat leluhur untuk melindungi wilayah Hutan Bambu, karena pernah terjadi perusakan tahun 1942 waktu pasukan Jepang masuk ke wilayah yang sekarang menjadi Desa Sumbermujur.

Penuturan cerita yang turun temurun tersebut dikemas dalam sebuah tari-tarian pada prosesi Grebek Suro. Grebek Suro juga menjadikan disakralkannya satu mataair di dalam Hutan Bambu yang tidak boleh dijamah oleh masyarakat. Diluar penyakralan tersebut, tujuannya adalah untuk menjaga mataair tetap lestari dan dapat menjadi sumber air yang mengalir wilayah di sekitarnya, termasuk memberi peluang pertanian tumbuh subur di Desa Sumbermujur.

Agus percaya, bahwa kegiatan Grebek Suro dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga tradisi, sekaligus menjaga sumber daya alam yang ada agar tetap lestari dan dimanfaatkan untuk ketangguhan masyarakat, termasuk dalam upaya penanggulangan bencana.

Grebek Suro menjadi monumen kebudayaan untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Kesadaran untuk menjaga keseimbangan lingkungan salah satunya diwujudkan dengan pendekatan tradisional. Dengan prinsip bahwa urusan paling hulu dari penanggulangan bencana adalah pengelolaan lingkungan yang baik.

Pengurangan Risiko Bencana dengan Konservasi Lingkungan

Upaya paling hulu dari pengurangan risiko bencana adalah pengelolaan lingkungan yang baik, salah satunya adalah mendorong upaya konservasi sumber daya hayati. Di lereng sisi tenggara Gunungapi Semeru, komunitas menyadari pentingnya memelihara kelestarian alam demi terhindar dari berbagai macam bahaya yang mungkin terjadi di daerahnya, salah satunya adalah ancaman nyata dari Gunungapi Semeru.

Di Desa Sumbermujur, Agus Wijaya memotori gerakan konservasi bambu. Di wilayah lain, Nursamsi dengan REKGS mengupayakan penanaman pohon diseluruh kawasan rawan bencana Gunungapi Semeru. Ini adalah bentuk membangun ketangguhan berbasis vegetasi yang diharapkan masyarakat mampu menjadi pelindung dari bahaya yang datang.

Desa Sumbermujur, kini dikenal sebagai Desa Wisata. Hutan Bambu, menjadi ikon wisata Desa Sumbermujur yang ramai dikunjungi. Dikelola oleh Pokdarwis Sabuk Semeru, mereka tidak hanya mengurus pariwisatanya saja, namun juga mengurus upaya pengurangan risiko bencana, seperti penanaman kembali.

Upaya pengurangan risiko bencana dengan konservasi juga dilembagakan dalam Gapoktan. Gapoktan Desa Sumbermujur memfokuskan kegiatan pada penanaman

dan pelarangan penebangan liar. Didukung oleh pemerintah desa, kini peraturan larangan penebangan liar tersebut sudah dikemas menjadi Peraturan Desa (Perdes).

Agus bersama lembaga desa juga mengupayakan penanaman bambu di zona penyangga (*buffer zone*) yang membatasi antara kawasan desa dan kawasan Taman Nasional. Menanam bambu dipilih dengan alasan bahwa bambu cukup menanam sekali, namun dapat dipanen secara terus menerus, serta kemampuan bambu yang bagus untuk menguatkan tanah. Hal ini dilakukan karena di wilayahnya juga pernah mengalami kebakaran lahan dan hutan. Sehingga pilihan ini menjadi upaya Agus dan desanya untuk mengurangi risiko kebakaran hutan dan lahan. Selain menjadi alarm alami bagi masyarakat, jika naasnya ada bahaya awan panas Gunungapi Semeru mengarah ke desanya.

Nursamsi, Yanto, dan kawan-kawannya di REKGS juga melakukan hal serupa. Semenjak dulu, Nursamsi dan relawan lainnya melakukan penghijauan di lahan-lahan pinggir sungai alur banjir lahar hujan. Menurutnya, pohon-pohon besar yang ada di bantaran sungai dapat mencegah banjir lahar hujan meluas hingga ke permukiman.

“Erupsi tahun 2020, Curah Kobo’an itu selamat karena ada pinus, material mau masuk itu ga bisa karena ketahan sama pinus, setelah pinus habis terbakar, erupsi 2021 ya sudah, (material erupsi) ga ada penahan atau remnya” Ungkap Nursamsi.

Pasca erupsi 2021, Nursamsi bersama REKGS melakukan penanaman di sekitar sungai dan hutan penyangga. Pohon yang ditanam meliputi pohon Bedog, Bambu, Beringin, Alpukat dan lainnya. Harapannya, gerakan ini dapat dilakukan secara berkelanjutan, dan memastikan bahwa pohon yang ditanam tumbuh dan dapat mengurangi risiko terhadap bahaya erupsi Gunungapi Semeru.

16

PERJALANAN KETANGGUHAN KWT MELATI

YAKKUM EMERGENCY UNIT (YEU)

KWT Melati adalah Kelompok Wanita Tani yang berlokasi di Dusun Watugajah, Kalurahan Girijati, Kapanewon Purwosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi DIY. Pada tahun 1997, kegiatan tani Wanita mulai digalakkan di Gunungkidul, termasuk di Dusun Watugajah. Seperti KWT lainnya yang didorong oleh Dinas Pertanian di berbagai wilayah di Indonesia, KWT dibentuk sebagai upaya pelibatan kaum perempuan dalam rangka peningkatan produktivitas hasil pertanian serta berpotensi untuk meningkatkan pendapatan maupun ketahanan pangan menuju kesejahteraan rumah tangga wanita tani.

Namun sejak tahun 2007, KWT Melati vakum dan tidak banyak melakukan aktivitas. Pada tahun 2017, KWT Melati merupakan salah satu KWT di Gunungkidul yang mendapatkan pendampingan dari YEU dengan dukungan mitra Huairou Commission. Penguatan organisasi perempuan dimulai dengan re-strukturisasi kelompok perempuan dan kajian risiko dan kapasitas yang dilakukan oleh kelompok perempuan. Dari proses pemetaan, kelompok perempuan mengidentifikasi ancaman yang dihadapi masyarakat Girijati adalah kekeringan dan tanah longsor, maka untuk mengurangi dampak dari ancaman bencana tersebut KWT Melati mengelola kegiatan ketangguhan antara lain tunda jual, arisan kambing, dan pertanian adaptif iklim.

Solusi praktis yang dihasilkan dari pemetaan kelompok perempuan didukung oleh dana ketangguhan komunitas (*Community Resilience Fund/CRF*). Dana ketangguhan komunitas adalah sejumlah dana yang dikelola oleh kelompok perempuan untuk memastikan kegiatannya berkelanjutan dan hasilnya dapat

mendukung kegiatan ketangguhannya yaitu kegiatan tunda jual. Dalam konteks mitigasi bencana, KWT Melati Watugajah melakukan advokasi kepada masyarakat untuk menanam sengon sebagai bentuk antisipasi dan langkah pengurangan risiko bencana khususnya tanah longsor.

Pada tahun pendampingan yang sama, KWT Melati membangun kerjasama dan jejaring dengan kelompok tani yang terhimpun dalam Dinas Pertanian Kabupaten Gunungkidul melalui BPP (Balai Penyuluhan Pertanian) di Kecamatan Purwosari. Kerjasama dilakukan dengan formalisasi kelompok tani sehingga KWT Melati memiliki peluang untuk mengakses sumber daya yang disediakan oleh pemerintah.

Setelah dua tahun berproses dan berupaya mengembangkan organisasi, CRF terbukti sangat tepat dan banyak sekali manfaat yang telah didapatkan. Inisiatif lokal yang dilakukan telah berkembang secara pesat dalam 5 tahun terakhir. Walaupun menghadapi tantangan dalam pengelolaan kegiatan ketangguhan, KWT Melati, yang koordinir oleh Ibu Warsilah mengambil langkah berani untuk mengambil kesempatan dan peluang dalam kegiatan ketangguhan yang lain yaitu arisan kambing dan pertanian adaptif iklim. Dari modal awal sebesar Rp7,000,000 kelompok perempuan telah berhasil mengelola ternak kambing dari 5 ekor hingga 23 ekor kambing pada tahun 2021.

Pada awalnya KWT Melati tidak memiliki cukup lahan untuk dikelola secara mandiri, termasuk demplot. Saat ini, KWT Melati beranggotakan 23 perempuan dan mengelola lebih dari 10 hektar lahan. Dalam dua tahun terakhir, KWT Melati telah mengikuti 14 kali pelatihan dan mendapatkan 9 bantuan dari pemerintah dalam berbagai macam bentuk dengan nilai total Rp97,6 jt. Total keuntungan yang didapatkan adalah Rp100jt dan sebesar 10% telah dialokasikan untuk menanggulangi bencana di wilayah.

Menurut anggota KWT Melati, CRF sebagai benih dana merupakan investasi yang sangat tepat dan penting dalam upaya adaptasi di tingkat local. CRF memberikan kesempatan untuk perempuan menentukan cara untuk mengelola pendanaan tersebut dengan pemetaan risiko dan kapasitas untuk mempelajari rencana aksi yang tepat. Tidak hanya itu, anggota juga membekali diri melalui berbagai macam

pelatihan, melakukan pertukaran pembelajaran dan menjalin komunikasi dengan pemerintah setempat.

“Selama dua tahun ini kami belajar bahwa komitmen dan konsistensi yang kami investasikan dalam pengelolaan CRF ini membuat kelompok kami menjadi lebih terorganisir, menumbuhkan kepemimpinan, menciptakan jejaring dengan kelompok lain, dan menghasilkan Kerjasama yang mutual dengan pemerintah dan dinas.”

Dengan kapasitas kepemimpinan yang telah dikembangkan KWT Melati dan praktik ketangguhan yang berdampak tidak hanya bagi kelompok perempuan tetapi juga masyarakat sekitar, anggota KWT Melati diakui dan ditunjuk untuk menjadi perwakilan masyarakat untuk menyuarakan usulan terlebih mengenai ketahanan pangan dan aksi adaptasi yang memungkinkan KWT Melati untuk mengusulkan dan mengakses bantuan-bantuan seperti program pemanfaatan pekarangan, benih bawang dan kedelai, serta pengembangan kelompok sebagai klinik/agen penyedia pestisida hayati.

Fakto-faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan terlibat dalam perencanaan pembangunan dan adaptasi adalah peningkatan kapasitas organisasi dari segi SDM, administratif, fisik, formalisasi kelompok, kemitraan dengan badan penyuluh.

Namun, untuk berkembang ke depan KWT Melati berencana untuk meningkatkan kapasitas dan pengetahuan dalam prosedur dan mekanisme dalam proses perencanaan sehingga bisa menghasilkan rencana aksi yang sesuai dan memprioritaskan aksi-aksi lokal ketangguhan dan adaptasi perubahan iklim.

17

IDE INOVASI AKSI INKLUSI (IDEAKSI) SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN PENGELOLAAN RISIKO BENCANA BERBASIS KOMUNITAS YOGYAKARTA

YAKKUM EMERGENCY UNIT (YEU)

“Terdapat kesenjangan kebijakan yang secara eksplisit mengatur inklusi pada bidang kemanusiaan. Sistem kemanusiaan ini tidak secara jelas dan tegas menetapkan mekanisme khusus inklusi. Peluang untuk memajukan kesiapsiagaan dan respon kemanusiaan yang inklusif bergantung kepada kemampuan pemerintah dan para penyedia layanan untuk membuat kesepakatan dengan kelompok rentan dan secara teratur meninjau ulang komitmen tersebut,” Tim Peneliti Pujiono Centre menuliskan dalam Laporan Akhir Kajian Lingkup untuk YAKKUM Emergency Unit (Pujiono Centre, 2021).

Kajian Lingkup dengan judul “Sistem dan Lanskap Kemanusiaan yang Inklusif di Indonesia” tersebut kemudian menjadi salah satu basis data untuk memperkuat pengembangan inovasi berbasis komunitas untuk pengelolaan risiko bencana yang lebih inklusif dalam rangkaian kegiatan IDEAKSI, sebuah akronim dari Ide Inovasi Aksi Inklusi, di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kemitraan untuk Inovasi Berbasis Komunitas

IDEAKSI digagas oleh YEU dengan memperkuat kemitraan untuk menghadirkan inovasi pengurangan risiko bencana (PRB) berbasis komunitas yang bertujuan meningkatkan aksesibilitas, akuntabilitas dan inklusivitas

bagi kelompok paling berisiko dalam proses tanggap kedaruratan dan kesiapsiagaan melalui inovasi yang didukung oleh komunitas dan masyarakat. Inovator lokal, sebutan untuk komunitas dan masyarakat yang mengembangkan inovasi PRB inklusif dalam IDEAKSI, didukung untuk menghasilkan, menguji, dan mengembangkan solusi terhadap prioritas masalah yang dihadapi dalam proses tanggap kedaruratan dan kesiapsiagaan bencana baik di tingkat lokal maupun nasional.

Melalui inovasi berbasis komunitas, solusi inovatif memungkinkan masyarakat, khususnya perempuan, orang dengan disabilitas, orang lanjut usia, dan kelompok berisiko tinggi lainnya dapat ikut serta dan terlibat secara aktif dalam proses penanggulangan bencana dan pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka.

Kemitraan ini menempatkan komunitas yang terkena dampak krisis sebagai inti dari upaya penanggulangan bencana untuk mendukung ketahanan mereka terhadap krisis melalui peningkatan aksesibilitas, akuntabilitas, dan inklusi dalam kesiapsiagaan bencana dan respons kemanusiaan melalui inovasi berbasis komunitas. IDEAKSI berupaya membuka ruang penemuan dan pengembangan inovasi-inovasi oleh kelompok masyarakat dalam pengelolaan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim yang inklusif.

Yogyakarta, Laboratorium Dinamis Bagi Pengelolaan Risiko Bencana Berbasis Komunitas

Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi lokasi untuk melahirkan IDEAKSI dan pencarian inovator lokal dalam mewujudkan PRB inklusi karena beberapa pertimbangan mendasar yang menjadikan provinsi ini ideal sebagai laboratorium dinamis bagi pengelolaan risiko bencana berbasis komunitas.

Yogyakarta memiliki 12 potensi ancaman yang berisiko dari skala sedang hingga tinggi dan memiliki tingkat kerentanan dan keterpaparan yang tinggi terhadap

risiko bencana, termasuk perubahan iklim dan pandemi yang turut menambah kerentanan.

Dari aspek kependudukan, jumlah orang lanjut usia di Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan yang tertinggi di Indonesia, yaitu terdapat sekitar 45.000 orang lanjut usia atau sekitar 13% dari total penduduk. Di Yogyakarta juga terdapat kurang lebih 40.050 orang dengan disabilitas, yang membuat Yogyakarta menempati peringkat keempat sebagai provinsi dengan jumlah orang dengan disabilitas terbanyak.

Di sisi lain, berdasarkan hasil kajian ketahanan daerah Yogyakarta terutama pada aspek kapasitas menunjukkan bahwa Pemerintah Yogyakarta dan komunitas telah memiliki komitmen terkait pengurangan risiko bencana namun perlu upaya berkelanjutan untuk mengurangi dampak negatif dari bencana (RAD PRB DIY 2020-2022).

Ide Inovasi Aksi Inklusi (IDEAKSI)

“Evolusi lanskap kemanusiaan Indonesia berkaitan dengan bencana di masa lampau. Pada tahun 2004, respon tsunami Aceh didominasi oleh aktor internasional yang tidak mempertimbangkan prioritas nasional dan lokal. Sebaliknya, untuk tanggap bencana Sulawesi Tengah tahun 2018, pemerintah membatasi kedatangan aktor internasional, sehingga aktor nasional dan lokal memiliki peran yang lebih besar” (Community-led Innovation Partnership, 2021).

Berkaca pada respon Sulawesi Tengah 2018 dan pengalaman bencana seperti Letusan Merapi 2006, kekuatan komunitas di tingkat lokal terbukti sebagai pilar penting dalam mendukung penanggulangan bencana di tingkat akar rumput. Masyarakat yang dibekali pemahaman dan praktik terkait PRB yang inklusif dapat memberikan respon lebih efektif ketika terjadi bencana di wilayahnya, termasuk memahami prioritas evakuasi terhadap kelompok berisiko tinggi.

Di dalam Laporan Kajian Lingkup yang berjudul Sistem dan Lanskap Kemanusiaan

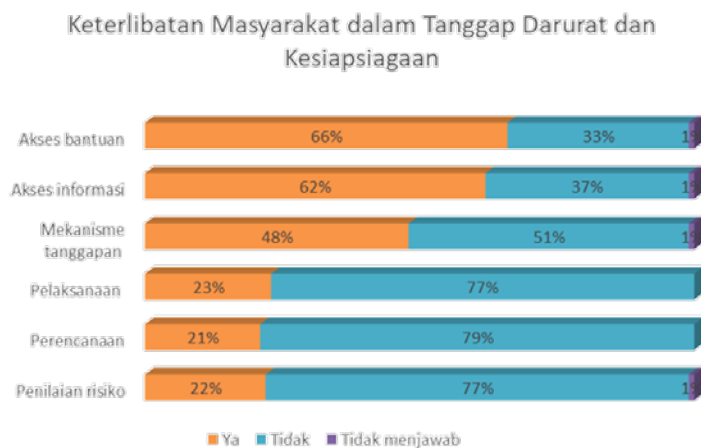
yang Inklusif di Indonesia tersebut, tim peneliti Pujiono Centre menyebutkan pilar-pilar dari Inclusion Charter sebagai tolok ukur untuk tiba pada pemahaman tentang peluang dan hambatan terhadap inklusi, yaitu: partisipasi, data terpilah, sumber daya, kapasitas, dan koordinasi.

Dengan berlandaskan lima pilar tersebut, IDEAKSI YEU percaya bahwa semua lapisan masyarakat, tanpa terkecuali, memiliki hak atas akses, perlindungan, bantuan dan dukungan dalam berbagai bentuk, baik saat terjadi bencana maupun dalam proses-proses pengelolaan risiko bencana.

Untuk mewujudkan tercapainya hak-hak tersebut, bersama inovator lokal, IDEAKSI berupaya untuk mengembangkan inovasi-inovasi yang mampu:

1. mengatasi hambatan bagi orang dengan disabilitas dan kelompok berisiko lainnya dalam berpartisipasi secara aktif, serta memiliki kapasitas dalam tanggap bencana dan kesiapsiagaan.
2. meningkatkan efektivitas tanggap kedaruratan dan inisiatif pengurangan risiko bencana.
3. mendorong pelibatan orang dengan disabilitas dan kelompok berisiko lainnya dalam proses koordinasi dan pembuatan kebijakan terkait penanggulangan bencana.

IDEAKSI dimulai dengan melakukan serangkaian proses konsultasi masyarakat dalam bentuk survey individu dan *focus group discussion* dengan ragam usia dan menggunakan pertanyaan 6 pertanyaan singkat Washington Group of Questions. Proses konsultasi dilakukan untuk memotret perspektif komunitas terkait risiko bencana dan sejauh mana keterlibatan masyarakat dalam proses penilaian, perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi kegiatan maupun kebijakan terkait penanggulangan bencana di wilayah masing-masing. Konsultasi masyarakat ini juga berupaya melihat sejauh mana komunitas dapat mengakses informasi dan sumber daya terkait risiko bencana di wilayahnya.



Beberapa hal yang menjadi perhatian komunitas antara lain : (1) basis data kelompok berisiko di tingkat desa tidak diperbarui, data yang tersedia tidak tersegregasi berdasarkan usia dan jenis disabilitas, kurangnya kesadaran inklusi bagi aktor-aktor di komunitas, (2) jalur

evakuasi tidak mudah diakses oleh penyandang disabilitas, lanjut usia, (3) Pembangunan berisiko di desa yang di satu sisi meningkatkan ekonomi tetapi juga berpotensi menciptakan “ancaman” tambahan, (4) perhatian pada pentingnya penanggulangan bencana multi-hazards seperti evakuasi erupsi saat pandemi, dsb, (5) konten informasi dalam situasi bencana maupun prabencana disesuaikan dengan hambatan yang dialami, kapasitas yang dimiliki oleh masyarakat, serta sesuai juga dengan budaya lokal, (6) mekanisme umpan balik dan penyampaian keluhan yang bisa diakses masyarakat termasuk disabilitas dan lanjut usia.

Pada April 2021, IDEAKSI membuka pendaftaran selama satu bulan untuk proposal ide inovasi yang bertujuan mendukung pengelolaan risiko bencana yang inklusi. Dalam rangka membuka partisipasi sebesar-besarnya bagi seluruh kelompok masyarakat yang memiliki perhatian terhadap penanggulangan bencana, pengumuman pendaftaran ini disebarluaskan melalui media massa lokal baik cetak maupun *online* yaitu Kedaulatan Rakyat, Harian Jogja, Solider ID, SiagaBencana, dan media publikasi digital yang dimiliki oleh YEU dan mitra. Selain publikasi melalui media massa, YEU juga menyelenggarakan sebuah webinar sosialisasi publik menggunakan layanan konferensi video (Zoom), dengan judul “IDEAKSI: Inovasi untuk Semua, Kompetisi Inovasi untuk Kemanusiaan yang Inklusif” dimana hasil dari konsultasi masyarakat dipaparkan sebagai pemantik ide-ide inovasi dari masyarakat. Untuk memastikan keterlibatan yang luas, YEU menjangkau komunitas melalui email, whatsapp group, dan saluran komunikasi lainnya kepada jejaring, forum, dan kelompok-kelompok berbasis masyarakat, organisasi

penyandang disabilitas, dan sebagainya serta menyediakan dukungan teknis bagi inovator lokal yang membutuhkan.

Sebanyak 43 (empat puluh tiga) *concept notes* diterima dari para inovator lokal dengan berbagai latar belakang seperti organisasi berbasis komunitas (misalnya kelompok perempuan, kelompok orang lanjut usia, forum komunikasi, komunitas berbasis keagamaan, komunitas seni, kelompok tani, dll.), LSM lokal, akademisi, dan institusi pendidikan (sekolah). Seluruh *concept notes* yang masuk kemudian diseleksi menjadi 15 *concept note* dari sisi kreatifitas ide inovasi dan relevansi dengan tujuan ideaksi. Pada tahap ini, aspek administrasi kelompok/organisasi juga dilihat namun bukan sebagai dasar untuk seleksi, melainkan untuk mengidentifikasi penguatan yang perlu dilakukan jika inovator lokal lolos ke tahap selanjutnya.

Lima belas tim inovator lokal yang lolos tersebut kemudian mengikuti empat lokakarya utama selama 1 bulan untuk memperkuat pengembangan ide-ide mereka lebih jauh. Pada lokakarya-lokakarya ini, Inovator lokal mendalami akar masalah, melakukan pemetaan pengetahuan, pemetaan aktor, merancang model bisnis yang sesuai dengan inovasi yang ingin dikembangkan, dan strategi untuk memperkuat tim baik melalui paparan, diskusi, dan sesi mentoring. Pasca lokakarya kedua, inovator kembali ke komunitasnya masing-masing, melakukan diskusi kelompok terfokus dan wawancara untuk memastikan inovasi berdasarkan kebutuhan dan pengetahuan masyarakat. Partisipasi kelompok berisiko didorong dengan memastikan ada keterlibatan dan kontribusinya di dalam tim inovator lokal maupun dalam proses penelitian.

Kelima belas inovator lokal kemudian diseleksi lagi menjadi 9 inovator yang mendapatkan hibah untuk mewujudkan inovasinya. Dalam proses seleksi inovator tersebut, YEU berkolaborasi dengan tim *technical reviewer* yang terdiri dari para ahli di bidang penanggulangan bencana dan inklusi, baik dari kalangan LSM, akademisi, aktivis inklusi, perwakilan badan pemerintah, dan badan PBB di Indonesia. Selain tim *technical reviewer*, YEU juga didampingi oleh *innovation advisor team* dari U-Inspire Indonesia dan *inclusion advisor* untuk mempertajam solusi inovasi yang dikembangkan oleh inovator lokal dan di saat yang sama

memastikan kapasitas inovator lokal dalam hal kepemimpinan, manajemen, serta kolaborasi inovasi dapat semakin inklusif.

Berdasarkan kriteria penilaian dan proses perjalanan IDEAKSI di tahap pengembangan yang dimulai pada bulan Oktober 2021, terdapat sembilan inovasi PRB inklusif berbasis komunitas yang dikembangkan dan capaiannya, yaitu:

1. Aplikasi DIFAGANA Disaster Emergency Support (DIFGAN-DES), oleh DIFAGANA DIY.
 Minimnya informasi kebencanaan terkait sistem peringatan dini yang dapat diakses oleh keluarga/pendamping lansia dan difabel maupun pihak yang bertugas mengevakuasi dengan keragaman jenis disabilitas berdasarkan hambatannya masih menjadi tantangan pada situasi darurat. Selain itu, pemahaman *first responder* di Desa Kawasan Rawan Bencana (KRB) 3 Merapi dalam melakukan evakuasi maupun cara berinteraksi dengan kelompok berisiko juga masih rendah.
2. Pengelolaan sampah dengan Larva BSF (Black Soldier Fly) atau Maggot sebagai upaya pengelolaan sampah organik dengan proses biokonversi dalam rangka pencegahan dan mitigasi bencana yang berbasis masyarakat lokal dan inklusif, oleh Forum Komunikasi Winongo Asri (FKWA). Agar pengelolaan terdesentralisasi dan partisipasi masyarakat dapat meningkat, FKWA juga mengembangkan Maggobox, yaitu satu paket alat praktis untuk budidaya maggot, untuk dimanfaatkan oleh warga kelurahan di beberapa titik. Maggobox dapat menyerap sampah organik 3 kg/hari, serta menghasilkan maggot sebanyak 6 kg dan kasgot 1 kg. Pengelolaan berbasis komunitas ini dapat mengurangi ancaman sampah organik yang menumpuk di area urban.
3. Musyawarah digital inklusif pengurangan risiko bencana bagi disabilitas, oleh Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kabupaten Gunungkidul. Web Musyawarah Digital Inklusif Pengurangan Risiko Bencana bagi Disabilitas yang berfungsi sebagai platform survey aksesibilitas, edukasi PRB, dan marketplace produk ekonomi kreatif. Konsep ini berangkat dari isu terbatasnya kanal penyaluran aspirasi kelompok penyandang disabilitas untuk pengambilan kebijakan pembangunan di Kabupaten Gunungkidul. Sebagian besar penyandang disabilitas di Gunungkidul yang disurvei telah menggunakan

smartphone, namun untuk mobilitas dan akses pengembangan perekonomian masih bergantung pada orang lain. Data aspirasi terkait aksesibilitas kemudian akan dikelola oleh FPRB dan disajikan dalam Musrenbang. Inovasi ini dapat diakses di: <https://dev-fprb.gunungkidulkab.go.id/>.

4. Pembuatan sistem pandu evakuasi mandiri bagi warga di wilayah terdampak erupsi Gunung Merapi di lereng Merapi, oleh Merapi Rescue Community (MRC). Berdasarkan pengalaman warga, ketika terjadi erupsi Merapi, kondisi akan menjadi lebih gelap dan ada kemungkinan listrik padam, sehingga menimbulkan kepanikan. Jalur evakuasi yang berupa papan penunjuk yang ada di sekitar Gunung Merapi biasanya hanya dapat diikuti saat kondisi terang. Oleh karenanya, Tim MRC mengembangkan sarana pemandu arah yang dapat beroperasi dalam kondisi gelap dan mengeluarkan sinyal bunyi, yang dilengkapi dengan catu daya mandiri, yaitu tenaga surya dan baterai yang cukup tahan lama. Sistem yang mendukung sinyal secara visual maupun audio ini harapannya dapat memudahkan individu untuk menemukan jalur evakuasi menuju titik kumpul secara mandiri dengan cepat.
5. Irigasi kabut bagi petani lanjut usia dan petani dengan disabilitas di Padukuhan Ngoro-oro, Kalurahan Giriasih, Kapanewon Purwosari, Kabupaten Gunungkidul, D.I. Yogyakarta, oleh Kelompok Tani Ngudi Mulya. Menjawab isu terbatasnya air dan tantangan aksesibilitas bagi petani lanjut usia dalam kegiatan pengairan lahan pada musim kemarau, Kelompok Tani Ngudi Mulya mengadopsi teknologi irigasi kabut dari contoh sukses kasus di Bantul untuk mengaliri lahan pertanian di Padukuhan Ngoro-oro, Kalurahan Giriasih, Kapanewon Purwosari, Kabupaten Gunung Kidul. Anggota Kelompok Tani Ngudi Mulya yang terlibat yaitu sebanyak 23 orang. Biasanya, para petani tersebut membeli dan mengangkut air untuk keperluan pengairan, padahal sebagian besar petani berusia lanjut. Sebagai prototype, irigasi kabut dirancang untuk mengaliri sepuluh petak lahan. Water meter kemudian dipasang di setiap petak lahan pemakaian dan total iuran dapat terukur sesuai pemakaian. Saat ini, irigasi kabut dimanfaatkan untuk penanaman padi, jagung, cabai, umbi jalar, dan bawang merah.
6. Tanggap kedaruratan banjir Sungai Gajah Wong melalui kesiapsiagaan dan penanganan bencana yang efektif dan inklusif, oleh PB Palma GKJ

Ambarrukma. Sungai Gajah Wong adalah salah satu sungai di Daerah Istimewa Yogyakarta, yang bantarnya dipenuhi permukiman, sehingga berisiko banjir. PB Palma (Unit Penanggulangan Bencana dan Pelayanan Masyarakat) GKJ Ambarrukma membangun sistem peringatan dini (Early Warning System/EWS) banjir serta kesiapsiagaan komunitas sungai dan masyarakat sekitar untuk melakukan evakuasi seluruh warga yang berisiko terdampak banjir, termasuk kelompok rentan.

7. Pengembangan aplikasi sistem peringatan dini dan rencana evakuasi yang inklusif terhadap erupsi Gunung Api Merapi di Kalurahan Girikerto, oleh Perkumpulan Lingkar. Tim Lingkar mengembangkan sistem peringatan dini yang ramah untuk Tuli dengan memanfaatkan teknologi berupa aplikasi android di Kalurahan Girikerto, Kabupaten Sleman. Aplikasi ini akan dihubungkan dengan sistem peringatan dini (EWS/Early Warning System) yang sudah ada sehingga informasi yang diberikan akan selaras. Ketika ada perubahan status Merapi, aplikasi tersebut akan memberi notifikasi nada getar. Aplikasi yang dikembangkan juga memuat informasi mengenai rencana jalur evakuasi, lokasi titik kumpul, nomor kontak tim siaga desa, dan Standard Operational Procedure (SOP) evakuasi. Pengembangan sistem ini dilengkapi dengan peningkatan kapasitas terkait kebencanaan dan konsep inklusi, melibatkan penyandang disabilitas, perangkat kalurahan, dan tim siaga kalurahan. Kalurahan setempat pun sangat terbuka dengan adanya penguatan kapasitas mengenai isu disabilitas serta membuka peluang integrasi program dengan isu disabilitas melalui mekanisme perencanaan pembangunan di Kalurahan, yaitu Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan (Musrenbangkal).
8. Orientasi jalinan keluarga angkat darurat (SINARKARAT) sebagai salah satu solusi efektif untuk mitigasi bencana bagi disabilitas di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, oleh Sekoci Sasana Inspira. Tim Sekoci berinovasi dengan membangun sistem keluarga angkat bagi keluarga dengan penyandang disabilitas untuk mengatasi persoalan tempat mengungsi yang inklusif dan ramah disabilitas bila ada bencana. Pengembangan inovasi terdiri dari kegiatan pengembangan kapasitas, simulasi penerimaan peserta disabilitas di keluarga angkat, penguatan paguyuban keluarga angkat, MoU dengan Pemerintah Kabupaten Sleman, BPBD Sleman, Komunitas Ojek Daring (*ojol*), dan

penyusunan buku panduan bagi seluruh peserta. Peserta yang dimaksud adalah penyandang disabilitas yang bersekolah di SLB Bakti Pertiwi Prambanan (TK s.d. SMA) dan keluarganya, serta keluarga angkat yang telah ditentukan kriteria utamanya, yaitu mapan, dapat berkomitmen, dari jejaring yang dipercaya. SLB ini berlokasi di Desa Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman.

9. Pengelolaan sistem informasi desa dan tempat pengungsian yang partisipatif oleh penyandang disabilitas di Kalurahan Kepuharjo, oleh Yayasan CIQAL (*Centre for Improving Qualified Activities in Life of People with Disabilities*) yang mengembangkan inovasi peningkatan Partisipasi Disabilitas pada Program Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana di Desa Kepuharjo, Kabupaten Sleman. Inovasi tersebut telah diwujudkan dalam bentuk: (1) data disabilitas yang ada di Desa Kepuharjo yang divisualisasikan dalam sebuah Sistem Informasi Manajemen (SIM), (2) Standar Operasional Prosedur (SOP) evakuasi dan penyelamatan, tempat pengungsian yang aksesibel, serta kebijakan dan anggaran yang memberikan perlindungan pada penyandang disabilitas, (3) pembentukan Kelompok Disabilitas Desa (KOMDIK), serta (4) penguatan pemerintah desa, Tim Destana, dan penyandang disabilitas untuk memperoleh pengetahuan tentang kebencanaan. Sistem Informasi Manajemen yang dibangun oleh CIQAL dapat diakses di: simdis.desakepuharjo.id. Ke depannya, diharapkan KOMDIK dapat mengadvokasi tersusunnya Peraturan Desa tentang perlindungan dan pemenuhan hak disabilitas di Desa Kepuharjo. Tim CIQAL pun berencana untuk mengembangkan model pendataan disabilitas, SIM, SOP, serta advokasi mengenai hal serupa di Desa Wukirsari, sebagai sister village Desa Kepuharjo.

IDEAKSI menjadi momen dan ruang yang memberikan peluang seluasnya bagi tim inovator untuk mengembangkan gagasan mengenai pengelolaan risiko bencana, tidak hanya terbatas pada bagaimana inovasi dapat dikembangkan dan memberikan manfaat bagi masyarakat (keluar), tetapi juga memperhatikan aspek penguatan kapasitas organisasi tim inovator itu sendiri (ke dalam). Oleh karena itu, dalam proses perjalanan pengembangan inovasi, untuk masing-masing tim

inovator mendapatkan dukungan penguatan kapasitas, antara lain sebagai berikut:

1. Orientasi awal mengenai:
 - a. Mitigasi risiko,
 - b. Standar prosedur operasional keuangan, pembukuan, dan logistik,
 - c. Pelaporan naratif dan tata cara pendokumentasian termasuk *informed consent*,
 - d. Data terpilah,
 - e. Mekanisme penanganan pengaduan dan umpan balik, dan pelaporan pelanggaran (*whistleblowing*),
 - f. Kode etik, standar, dan akuntabilitas.
2. Pendampingan (*mentoring*) oleh U-Inspire Indonesia, selaku *innovation advisor* terkait:
 - a. Identifikasi isu-isu penting,
 - b. Eksplorasi kapasitas, tantangan, dan pemetaan kebutuhan penguatan kapasitas,
 - c. Penguatan aspek aksesibilitas, pendokumentasian proses, deskripsi sistem yang dibangun secara komprehensif, dan rekam pembelajaran.
3. Pelatihan teknis terkait:
 - a. Menulis dan bercerita
 - b. Branding dan media sosial
4. Mentoring oleh para pakar, antara lain yaitu:
 - a. Inovasi digital inklusif bagi tim inovator yang mengembangkan inovasi berbasis aplikasi android dan *website*.
 - b. Pendampingan bagi Sekoci Sasana Inspira terkait kesinambungan antara standar prosedur operasional SINARKARAT dengan rencana kontinjensi pemerintah daerah, dan untuk memastikan prinsip aksesibilitas dan perlindungan bagi kelompok berisiko.

- c. Pendampingan bagi Kelompok Tani Ngudi Mulya dalam proses kajian kadar tanah dan durasi yang diperlukan untuk penyiraman dengan sistem irigasi kabut.
- d. Pendampingan bagi FKWA terkait penyusunan rencana usaha pengelolaan sampah organik, analisa survei data awal, pengembangan pertanian terpadu dengan pendekatan mitigasi bencana, dan budidaya maggot yang berkualitas.
- e. Pengujian efektivitas dan kontrol kualitas sistem peringatan dini dan pedoman inovasi, serta rekomendasi peningkatan kualitas teknis dan pemanfaatan teknologi bagi inovasi pengembangan jalur pandu evakuasi dan sistem peringatan dini terhadap bencana.

5. Workshop Pembelajaran dan Pameran IDEAKSI

- a. Pameran Ide Inovasi Aksi Inklusi dalam Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana dan workshop bersama inovator lokal, moderator, dan penanggap, yang memberi kesempatan bertukar pengalaman dan pembelajaran antar tim maupun sosialisasi hasil inovasi kepada masyarakat umum.

Refleksi Pembelajaran

- Selain penguatan kapasitas dengan topik yang sama untuk semua inovator lokal, *Innovation hub* harus memiliki strategi pendampingan yang unik untuk setiap tim, misalnya mentoring dan penguatan kapasitas yang sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas setiap tim. Proses ini juga melibatkan inovator lokal dalam pengambilan keputusan terkait hal ini.
- Penting untuk memiliki mekanisme umpan balik yang aksesibel, mendengarkan, dan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan oleh para pihak. Proses ini akan menumbuhkan kesadaran bahwa suara mereka berharga, membangun kepercayaan antar pihak, dan meningkatkan kualitas program yang dijalankan.

- Kemitraan semakin efektif dan setara dengan memastikan tersedia ragam komunikasi yang bisa diakses dan aman untuk digunakan, membangun rasa percaya di antara pihak-pihak yang terlibat, serta fleksibel dan terbuka untuk masukan dan kritik.
- Memastikan kelompok berisiko menjadi pusat dan subjek memberikan dua manfaat sekaligus. Di satu sisi, inovasi yang dikembangkan inovator lokal memberikan manfaat kepada kelompok berisiko, di sisi lain kesadaran dan pemahaman inovator lokal tentang inklusi semakin meningkat.
- Akomodasi yang layak tidak selalu berkorelasi pada penambahan anggaran. Hal ini dapat diwujudkan dengan memaksimalkan potensi lokal, membangun solidaritas, dan gotong royong untuk menciptakan ruang dan akses yang setara.

YAKKUM Emergency Unit

YAKKUM Emergency Unit (YEU) merupakan salah satu unit kerja YAKKUM (Yayasan Kristen untuk Kesehatan Umum) yang berdiri pada tahun 2001 dengan mandat melakukan tanggap bencana yang inklusif dan partisipatif serta membangun ketangguhan masyarakat melalui praktik-praktik pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim yang berbasis masyarakat. Dengan menjadi anggota dari Standar Kemanusiaan Inti, YEU memastikan dan mengembangkan kinerja pelayanan kemanusiaan yang bertanggung gugat dan tunduk pada kode etik kemanusiaan.

Pada tahun 2020, dengan dukungan dari Elrha, Asia Disaster Reduction and Response Network (ADRRN), Start Network, dan dengan dukungan pendanaan dari UK Foreign, Commonwealth, and Development Office (FCDO), YAKKUM Emergency Unit (YEU) mendapat kesempatan menjadi salah satu *innovation hub* dalam sebuah kemitraan untuk inovasi berbasis komunitas (*community-led innovation partnership* / CLIP) yang kemudian melahirkan IDEAKSI di tahun 2021.

YEU menyelenggarakan IDEAKSI (ide inovasi aksi inklusi) sebagai program untuk menemukan dan mengembangkan inovasi oleh masyarakat lokal di Daerah

Istimewa Yogyakarta, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari CLIP. Inisiatif yang dikembangkan oleh para inovator lokal tersebut diharapkan dapat mengatasi hambatan bagi kelompok paling berisiko untuk berpartisipasi aktif dalam penanggulangan bencana, meningkatkan efektivitas tanggap darurat dan pengurangan risiko bencana, serta mendorong keterlibatan kelompok paling berisiko dalam proses koordinasi dan pembuatan kebijakan terkait penanggulangan bencana.

DAFTAR PUSTAKA

Arioaji, H., Rahatiningtyas, N. S., Arviandi, R. P., Dwiyani, R., Hibban, S. F., Rizkia, S. S., & Natalia, W. (2022). *Sembilan Inovasi Pengurangan Risiko Bencana yang Inklusif: Belajar dari Yogyakarta* [PDF]. Jakarta: U-Inspire Indonesia.

Community-led Innovation Partnership. (2021, October 14). Is localisation the key to making disaster preparedness more inclusive? Retrieved August 11, 2022, from <https://medium.com/community-led-innovation-partnership/is-localisation-the-key-to-making-disaster-preparedness-more-inclusive-abd40c15697f>

Inclusion Charter. *Five Steps To Inclusion In Humanitarian Response*. Diakses tanggal 9 Agustus 2022 dari <http://www.inclusioncharter.org/#thecharter>.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Daerah Untuk Pengurangan Risiko Bencana Tahun 2020 - 2022. Diakses tanggal 9 Agustus 2022 dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/154843/pergub-no-65-tahun-2020>.

Pujiono, Prasetyo, A. B., Septikasari, Z., Silviana, M., & Syahroeddin, H. (2021, April). *Sistem dan Lanskap Kemanusiaan yang Inklusif di Indonesia* [PDF]. Yogyakarta: Pujiono Centre.

18

MENGGALI MAKNA TRADISI SEBAGAI PEMBELAJARAN PENGURANGAN RISIKO BENCANA

MARJOKO, YAYASAN PUSAKA INDONESIA

Selayang pandang Terjaganya lingkungan hidup merupakan sumber penghidupan masyarakat berupa ketersediaan air, tanah dan udara yang baik dan bersih. Oleh karena itu perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya untuk mewujudkan dan meningkatkan peri kehidupan dan kualitas hidup makhluk hidup secara alami dan berkelanjutan, sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Berbagai dasar dipergunakan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, salah satu dasar adalah *budaya dan kearifan lokal*.



Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan

masyarakat. Salah satu permasalahan yang menjadi perhatian saat ini adalah krisis air yang diakibatkan berkurangnya sumber air dan menurunnya kualitas tanah dan air yang mengancam ketersediaan air bagi kehidupan bahkan dapat menimbulkan bencana alam.

Dampak dari pengabaian terhadap upaya perlindungan lingkungan hidup (*konservasi*) dapat mengundang bencana hidrometeorologi atau bencana

disebabkan oleh curah hujan, kelembapan, temperatur dan angin yang dapat menimbulkan banjir, longsor bahkan kekeringan. Banjir merupakan salah satu dampak kerusakan lingkungan yang kerap terjadi akhir-akhir ini. Saat musim penghujan tiba, beberapa daerah di Indonesia tidak terkecuali Kabupaten Sigi dilanda.

bencana banjir dan longsor. Salah satu faktor yang menimbulkan bencana banjir diakibatkan oleh masyarakat yang mengabaikan fungsi lingkungan.

Kerusakan kawasan hutan, baik perambahan maupun pembakaran merupakan dampak kerusakan lingkungan hidup yang sudah sewajarnya menjadi perhatian. Sebab, jika hutan di rusak atau dibakar maka habitat hewan liar akan terancam dan sekaligus hilang fungsi tata air dari keberadaan hutan.

Dampak lain dari bencana hidrometeorologi adalah Pemanasan global (*Global warming*), selalu dikaitkan dengan pelepasan karbon (*CO₂*) keudara dari mesin-mesin industri ataupun kendaraan yang menggunakan bahan bakar fosil yang sering disebut efek rumah kaca, dengan meningkatnya kadar karbon di udara akan menimbulkan penipisan oksigen (*O₂*) di alam yang meningkatkan suhu bumi dan mengakibatkan pergeseran musim.

Bencana hidrometeorologi juga dapat menimbulkan tanah longsor yang merupakan dampak kerusakan alam, bencana alam tanah longsor sering kali menimbulkan banyak korban jiwa, bencana alam ini disebabkan oleh manusia yang sembarangan menebang pohon dan pengelolaan lingkungan yang kurang baik, tanpa melakukan reboisasi, melakukan alih fungsi hutan tanpa pertimbangan dan selalu mengabaikan keberadaan hutan bagi kehidupan.

Untuk menimalisir dampak bencana, perlu dilakukan penguatan dari seluruh lapisan baik pemerintah, masyarakat dan para pihak yang peduli (*konsern*) terhadap perlindungan alam. Perlindungan alam saat ini menjadi kepedulian semua lapisan pemerintah, baik lokal, regional, nasional maupun internasional bahkan pemerhati lingkungan. Harus disadari, bahwa kehidupan masyarakat di Kabupaten Sigi sangat bertumpu pada kelestarian hutan, ketergantungan sektor pertanian, kebutuhan air bersih, pariwisata, keberlangsungan pasokan air yang bersumber hutan sebagai pengatur tata air. Maka oleh karena itu kearifan lokal

masyarakat Kaili yang mengatur hubungan antara manusia dan alam menjadi pedoman dasar untuk menjaga keberlangsungan kehidupan dan penghidupan. Kearifan yang ditanamkan leluhur masyarakat Kaili telah mewariskan mata air bagi anak cucunya, maka seharusnya generasi saat ini juga bersikap seperti para leluhur, sehingga di masa depan tidak mewariskan air mata bagi anak cucu (*kekeringan, banjir dan longsor*).

Sebagai masyarakat Indonesia yang memiliki kearifan lokal dalam menjaga alam, masyarakat Kaili yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah juga memiliki kearifan yang mengatur hubungan antara manusia dengan alam. Di Kabupaten Sigi sangat melekat kearifan lokal dalam mengatur hubungan sosial maupun hubungan antara manusia dengan alam sebagai kedudukan budaya masyarakat, seperti "*OMBO atau NAOMBO*" yang berarti *runtuh*. Pada masyarakat Kaili Ledo kata "ombo atau naombo" diartikan sebagai suatu aturan sejak masa leluhur telah menetapkan aturan "ombo" yang mendukung dalam upaya pelestarian lingkungan dan dalam konteks kebencanaan, ombo ini merupakan upaya pencegahan terhadap bencana, terutama bencana banjir, longsor dan erosi. Jika dikaitkan dengan upaya perlindungan lingkungan hidup (*konservasi*) aturan adat masyarakat Kaili ini sangat mendukung upaya-upaya pelestarian dan pemanfaatan alam dalam upaya pengurangan risiko bencana yang telah hidup, tumbuh dan berkembang sejak masa leluhur, kearifan dalam menjaga dan melindungi hutan dari para leluhur dapat diartikan bahwa para leluhur sangat menyadari hutan harus dititipkan kepada anak cucu mereka, agar tetap dapat menikmatinya bagi kehidupan "*hutan bukan warisan leluhur akan tetapi titipan untuk anak cucu*". Slogan ini menjadi teladan bagi generasi saat ini agar tetap menjaga kelestarian.

Upaya perlindungan oleh leluhur terhadap lingkungan dan tata sosial

Leluhur masyarakat Kaili telah menerapkan aturan-aturan yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup dan sosial, agar keberlangsungan dan ketentraman dapat terus terjaga hingga anak cucu, upaya perlindungan lingkungan dan tata sosial tersebut dituangkan dalam pembatasan pemanfaatan



sumber daya alam dan pengaturan sosial dengan menerapkan aturan atau Ombo

Jenis - jenis Ombo :

Ombo dapat dibagi dalam beberapa jenis, antara lain :

- a. Ombo Kamate Numaradika (meninggalnya raja),
- b. Ombo Pekanolu Riara Ngata (Menjaga kepunahan Tumbuhan),
- c. Ombo Pekanolu olo-kolo (menjaga kepunahan binatang),
- d. Ombo Pekanolu Nutuda-tuda (menjaga kepunahan tanaman),
- e. Ombo Pekanolu Mpangale (menjaga kelestarian Hutan),
- f. Ombo Pekanolu Dua: (menjaga terjangkitnya wabah Penyakit),
- g. Ombo Pekanolu Isi Nurarantasi (menjaga kelestarian habitat dan biota Laut),
- h. Ombo Pekanolu Karona, Binangga, Keke (menjaga kelestarian lingkungan daerah aliran sungai dan aliran air),
- i. Ombo Pekanolu Mata Nu Uve (menjaga kelestarian sumber mata air),
- j. Ombo Pekanolu Tana Ntodea, Tana Nuada (menjaga kelestarian ruang publik)

Tujuan Pelaksanaan Ombo, antara lain :

- a. Agar masyarakat dapat menaati aturan yang telah disepakati bersama (Tokoh Adat, Pemangku Adat, dan masyarakat umum).
- b. Agar menjaga, melindungi dan melestarikan semua jenis-jenis ombo demi menjaga keseimbangan alam. (*Atura Nuada Ante Givu Nuada To Kailirilivuto Nu Palu (Hukum Dan Sanksi Adat Kaili di Kota Palu, Dr. Timudin Dg. Mangera Bauwo, M.Si. dkk 2012)*)

Kearifan Lokal

Merupakan pengetahuan yang diperoleh akibat berinteraksi dengan alam dan lingkungan dalam jangka waktu yang lama berdasarkan pengalaman dan kesadaran akan alam, atau telah beradaptasi dengan alam. Sehingga pengetahuan tersebut dijadikan landasan untuk bertindak, karena sifatnya yang mampu beradaptasi dengan alam.

Nilai-nilai budaya merupakan nilai-nilai yang telah disepakati dan tertanam dalam suatu masyarakat, yang mengakar pada suatu kebiasaan, kepercayaan, simbol-simbol, dengan karakteristik tertentu yang dapat dibedakan satu dan lainnya sebagai acuan perilaku dan tanggapan atas apa yang terjadi atau sedang terjadi. Nilai-nilai budaya akan tampak pada simbol- simbol, slogan, moto, dan ungkapan.

Suatu nilai apabila sudah membudaya pada diri seseorang, maka nilai itu akan dijadikan sebagai pedoman atau petunjuk didalam bertingkah laku. Hal ini dapat dilihat dalam kehidupan sehari- hari, misalnya budaya gotong-royong (*Nosibalaya, Nosidondo, Nojama, Nosialapale*). Kearifan lokal merupakan kewajiban moral atau etika untuk mengikuti hal yang baik dan menghindari hal yang buruk. (*Drs. Iksan Djorimi, M.Hum*)

Masyarakat Kaili, juga memiliki syair-syair yang bernuansa nasihat tentang

kejadian bencana yang pernah terjadi di Provinsi Sulawesi Tengah, seperti "Kayori", kayori merupakan Syair dari masyarakat Kaili terdahulu (*leluhur*) menerangkan kejadian gempa pada saat itu " Goya-goya- gontiro, Toka Bona Lolio, Palu Tondo Mamboro, Matoyomo, Kayumalue molantomo " artinya : goyang - goyang di Desa Ganti (Banawa) yang melihat ke bawah, orang desa Kabonga, Loli oge, Palu dan Tondo serta Mamboro sudah tenggelam, tinggal kayumalue yang mengapung , bahwa dalam cerita-cerita kuno juga disebutkan bahwa Kota Palu sampai dengan Donggala pernah terjadi gempa besar yang dalam bahasa Kaili Edo (*Limboto*) saat itu guncangan gempa hingga 3 (tiga) bulan, bahkan pada saat memasak, belanga hanya bisa di gantung pada tiang kayu, agar tidak terbalik karena guncangan gempa.

Kearifan lokal merupakan warisan leluhur turun temurun mengandung nilai-nilai positif dan nilai-nilai spritual untuk dijadikan pedoman dalam bersikap dan bertingkah laku. Masyarakat Kaili yang merupakan salah satu suku yang mendiami wilayah di Provinsi Sulawesi Tengah juga memiliki seperangkat pengetahuan lokal yang merupakan pola dari budaya Kaili yang mereka wujudkan dalam kehidupan sehari-hari seperti pada pelestarian hutan, perairan danau Lindu, pantangan atau *nakapali / nakapopali* dalam bertutur atau berucap dan upacara seperti balia dalam proses pengobatan dan adat lainnya. Keselarasan hidup yang terjabarkan dari kearifan lokal masyarakat Kaili apabila dijaga dan terus dipelihara keberlangsungannya, maka akan senantiasa memberikan keseimbangan ikatan antara manusia dan alam. Demikian juga

dengan tabu, pantangan atau nakapali / nakapopali dan sanksi- sanksi terhadap berbagai pelanggaran dari kearifan lokal yang masih terjaga, semuanya berorientasi kepada penjagaan kelestarian, keselarasan hubungan antara manusia dan alam tempatnya bermukim. (foto by. Yayan Kololio)



Kekayaan budaya, adat istiadat masyarakat Kaili seharusnya tetap terjaga, terpelihara, hidup, tumbuh dan berkembang meskipun dalam situasi modern saat ini. Budaya penjaga alam pada masyarakat Kaili secara kontekstual menjadi kebutuhan terlebih pasca bencana alam tanggal 28 September 2018 yang telah memporak-porandakan Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya Kabupaten Sigi. Penjagaan dan pentaatan kearifan lokal sangat berkorelasi dengan perlindungan sumber daya alam, hutan, gunung/bukit dan air sebagai sumber kehidupan serta kawasan hutan untuk mengurangi ancaman bencana hidrometeorologi.

Harus diakui bahwa Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan sumber daya dan keindahan alamnya. Selain itu, juga banyak memiliki keragaman budaya dan sangat menjunjung tinggi nilai-nilai yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi berikutnya. Nilai-nilai budaya luhur yang ada di negeri ini juga merupakan salah satu bentuk kearifan lokal (*local wisdom*) atau pengetahuan lokal yang merupakan kecerdasan leluhur etnik Kaili sejak dahulu.

Masyarakat Kaili memiliki ciri khas kebudayaan dan kebiasaan yang dijaga kelestarian, kebiasaan itulah yang akhirnya membentuk apa yang disebut dengan kearifan lokal yang selalu disenandungkan oleh para tetua. Senandung atau syair yang dimiliki oleh masyarakat Kaili harus mampu dipertahankan, karena syair tersebut mengandung nilai-nilai, kepercayaan, etika, perilaku dan sistem religi yang dianut masyarakat Kaili.

Kesadaran sejarah keberadaan lembah Kaili memiliki nilai penting bagi generasi saat ini untuk memahami proses pembentukan kawasan lembah Kaili ini, selain itu Kabupaten Sigi memiliki kuntut dan struktur tanah yang berbukit dengan memiliki kerentanan dan peka terhadap hidrometeorologi, oleh karena itu nasehat leluhur menjadi pedoman untuk menjaga keberlangsungan (*Sustainable*) alam Kaili ini, khususnya Kabupaten Sigi. Konsep menjaga keseimbangan alam "*tonda talusi*", konsep ini tidak hanya menjaga hubungan antar manusia dengan manusia secara sosial, juga menjaga hubungan antara manusia dengan alam dan sang pencipta "*karampua ri langi dan karampua ri tana*"

Pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya memahami kearifan lokal pada masyarakat Kaili perlu ditingkatkan agar kearifan lokal mampu terjaga kelestariannya, tetap hidup dan terus tumbuh serta berkembang. Oleh karena itu, sangat penting bagi masyarakat untuk mendalami dan memberdayakan kearifan lokal yang ada. Para leluhur juga telah memberikan beberapa pengalaman yang harus di ingat, meletakkan ingatan ini sering diberikan sebagai penamaan wilayah atau desa tentang bentang alam, ekologi maupun peristiwa yang pernah terjadi pada kawasan atau desa (*toponimi*).

Dengan menghargai kearifan lokal bagi generasi saat ini, akan mampu membantu mengabadikan identitas masyarakat Kaili yang kuat dan membangun karakter positif dalam melestarikan alam dan sosial pada masyarakat Indonesia.

Baruga

Model bangunan yang dihasilkan oleh leluhur masyarakat Kaili, yang memiliki struktur unik dan khas, hal ini merupakan perwujudan upaya kesiapsiagaan dari masyarakat pada waktu itu yang meyakini bahwa struktur bangunan yang di buat akan mampu menjawab upaya



penyelamatan pada situasi bencana, terutama bencana gempa bumi. Baruga diperuntukan sebagai sarana untuk berkumpul dalam menyelesaikan masalah (*Pengadilan Adat*), baruga juga berfungsi sebagai tempat hunian sementara untuk menginap bagi orang yang melakukan perjalanan (*musafir*) dan menerima tamu, baruga dilengkapi dengan tungku (*talusi*). (Foto By : Djunaidi Saripurnawan).



Saat ini baruga juga dapat dimodifikasi untuk mendekatkan adat budaya kepada generasi muda, agar peran dari lembaga adat dalam mempertahankan adat istiadat dan budaya Kaili dapat dipertahankan dari

generasi ke generasi berikutnya. Perlu disadari, bahwa degradasi atau penurunan penghargaan terhadap adat istiadat yang dahulu hidup, tumbuh dan berkembang harus tetap dipertahannya karena memiliki nilai-nilai keraifan dalam menjaga tata hubungan sosial dan lingkungan, bahkan sebagian orang masih menganut adat istiadat dalam konteks hubungan dengan Sang Pencipta Alam. Baruga sebagai sarana dan prasarana untuk menyelesaikan permasalahan sosial menjadi penting dijadikan tempat berkumpul seluruh elemen masyarakat dalam menyikapi degradasi/penurunan pemahaman terhadap adat istiadat, sehingga "baruga" tidak hanya dijadikan sebagai tempat peradilan adat bahkan baruga dapat dijadikan sebagai tempat publik masyarakat untuk membicarakan, penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan serta merawat ingatan agar dapat diwariskan kepada anak cucu. *(Foto by : Sanggar Kololio)*

Di era globalisasi dan modernisasi, baruga dapat dijadikan sebagai perpustakaan, pusat informasi desa, tempat hunian dikala kedaruratan dengan tidak menghilangkan fungsi utama keberadaan baruga sebagai tempat menyelesaikan persoalan atau peradilan adat. Hal ini dapat membangun pengetahuan generasi



muda dalam memahami adat istiadat Kaili, mendekatkan baruga kepada generasi muda merupakan bagian dari mendekatkan adat istiadat kepada

generasi muda, dengan tidak menghilangkan fungsi utamanya.

Tantangan

Harus disadari bersama, saat ini dan seiring berjalannya waktu serta berkembang zaman, keberadaan kearifan lokal Kaili semakin tergusur dengan banyaknya budaya barat, pesatnya perkembangan teknologi serta maraknya permasalahan sosial yang kerap terjadi di masyarakat, membuat kearifan lokal yang sudah diturunkan dari generasi ke generasi berikutnya perlahan-lahan mulai memudar dan dikuatirkan akan ditinggalkan bahkan hilang. Upaya untuk mengangkat kembali kearifan lokal bagaikan *“mengangkat batang terendam”*, banyaknya tantangan yang dihadapi terlebih pada era globalisasi ini. Keterbukaan informasi ternyata belum mampu memaksimalkan budaya Kaili untuk dikenal oleh banyak orang, bahkan generasi muda Kaili, dan sangat dikuatirkan kearifan lokal masyarakat Kaili serta sejarahnya semakin tersingkir oleh budaya asing yang tidak selaras dengan nilai, gaya hidup, dan pandangan masyarakat Kaili. *Contoh : keberadaan lokasi dan sejarah lumpang batu di Desa Bangga “ Sidambiro” apakah dikenal oleh generasi saat ini...?(foto by: Yayan Kololio)*

Seiring dengan memudarnya kearifan lokal dan sejarah tersebut, pola pikir masyarakat turut berubah, orang tidak lagi memaknai pentingnya kebudayaan dan sejarah Kaili dan tidak lagi memperhatikan keseimbangan alam dalam menata dan mengelola sumber daya yang ada. Permasalahan sosial yang ada merupakan dampak dari modernisasi, serta gaya hidup zaman sekarang yang cenderung materialitis dan konsumtif yang mampu menggeser berbagai sistem nilai sosial, moral dan sebagainya.

Mengangkat Batang Terendam dan merawat ingatan

Tentu tidak mudah untuk mengembalikan situasi dan kondisi masa lalu dengan mereplikasikan pada zaman sekarang, berbagai pengaruh telah melunturkan nilai-nilai dan kearifan lokal (*local wisdom*). Menjadi pertanyaan yang harus dijawab bersama “ apakah kondisi ini harus terus dibiarkan...?” dan bagaimana mengupayakan kearifan lokal menjadi materi dalam perbincangan sosial dan pendidikan sebagai upaya merawat ingatan leluhur ...?

Penerbitan legislasi / kebijakan yang berorientasi kearifan lokal

Pemerintah Kabupaten Sigi melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor : 15 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, telah memberikan ruang perlindungan (*Proteksi*) bagi keberadaan masyarakat hukum adat di Kabupaten Sigi.

Pemerintah Kabupaten Sigi secara faktual telah memberikan perlindungan bagi masyarakat hukum adat di Kabupaten Sigi, hal tersebut untuk membangkitkan kesadaran bahwa nilai-nilai luhur dan budaya lokal sebagai tumpuan bagi keberadaan masyarakat Kaili dalam situasi arus globalisasi, terutama terhadap nilai-nilai yang telah ditanamkan sejak masa leluhur dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, bijaksana dalam memanfaatkan alam, serta membangun rasa solidaritas dan persatuan secara menyeluruh.

Perlindungan bagi masyarakat hukum adat perlu mendapat dukungan dari masyarakat Kaili untuk terus melestarikannya.

- Pasal 17 ayat (1) Perda Nomor 15 Tahun 2014 menyebutkan “ Pemerintah Daerah wajib melindungi dan menghormati Masyarakat Hukum Adat beserta hak ulayat, tata nilai, norma, sistem Hukum Adat, adat istiadat, dan kearifan budaya lokal”:

- Ayat (2) menyatakan “ Dalam membuat kebijakan program pembangunan, Pemerintah Daerah memperhatikan keberadaan hak Masyarakat Hukum Adat”.
- Dalam Pasal 18 menyebutkan “ Perlindungan Masyarakat Hukum Adat beserta hak ulayat dilakukan dengan cara :
 - melibatkan Masyarakat Hukum Adat dan organisasi adat dalam setiap program pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah pada wilayah Masyarakat Hukum Adat;
 - menjamin pelaksanaan dan pengembangan sistem Hukum Adat, adat istiadat, kelembagaan adat, serta kearifan lokal Masyarakat Hukum Adat;
 - memfasilitasi pengembangan kelembagaan adat pada Masyarakat Hukum Adat; dan
 - menjamin perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat dari gangguan pihak lain.

Terbinya Peraturan Daerah tersebut, merupakan penghormatan Pemerintah Daerah dalam upaya mengangkat kembali kearifan lokal, sehingga dapat memberi warna dalam upaya menjaga hubungan antara manusia dan alam sebagaimana yang telah ditaati oleh leluhur masyarakat Kaili.

Pemerintah Kabupaten Sigi, telah mencoba untuk mendokumentasi kearifan lokal yang ada menjadi bagian dari penghargaan terhadap peran masyarakat hukum adat dalam pembangunan di Kabupaten Sigi yang tetap menghargai budaya leluhur.

Upaya Pemerintah Kabupaten Sigi dalam memberikan Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat tidak harus berhenti pada tataran kebijakan, akan tetapi harus mengalir hingga Pemerintah Desa dan masyarakat, agar senantiasa nilai-nilai budaya dapat teraplikasi dalam kehidupan masyarakat Kaili yang dapat mengatur hubungan tata sosial masyarakat sebagai kontribusi adat dalam mewujudkan cita-cita pembangunan nasional. Jika keberadaan masyarakat hukum adat tidak diberikan ruang dan perlindungan, maka dapat menyebabkan hilangnya suatu kebudayaan nasional dan seiring

hilangkan nilai-nilai keindonesiaan.

Kegiatan yang bisa dilakukan untuk mengangkat kembali kearifan lokal dengan melakukan dokumentasi nilai-nilai yang ada yang dapat diterima oleh semua pihak, cara yang mungkin lakukan antara lain :

- mendorong menerbitkan legislasi / kebijakan hingga tingkat desa;
- mendorong menerbitkan legislasi / kebijakan hingga tingkat desa;
- menyediakan sarana dan prasarana, sumber daya dan pembiayaan untuk pengembangan kelembagaan adat;
- meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penghargaan kearifan lokal, sebagaimana masa lalu adat istiadat sebagai aturan yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam mengatur tatanan sosial.

Kegiatan ini dapat mengembalikan cita-cita luhur dari leluhur masyarakat Kaili dalam menjaga tata hubungan antara manusia dan lingkungan dimasa modern ini, dengan tetap menjunjung tinggi kearifan lokal yang mengandung nilai-nilai, kepercayaan, etika, perilaku, dan sistem religi yang pantas untuk dipertahankan.

Peraturan Desa yang berorientasi pada Kearifan lokal.

Yayasan Pusaka Indonesia bersama dengan Dewan Adat Kabupaten Sigi yang di dukung oleh Caritas Switzerland telah berupaya melakukan kegiatan yang ditujukan kepada Pemerintahan Desa (Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa/BPD) serta tokoh adat dan tokoh-tokoh kunci di Kecamatan Dolo Barat dan Kecamatan Dolo Selatan tentang kebijakan Pemerintah Kabupaten Sigi dalam upaya Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, agar Pemerintah Desa mendapat informasi, timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut, dan mendorong kepada Pemeritahan Desa agar dapat menjadikan kearifan lokal sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam melakukan perencanaan

pembangunan desa.

Dalam upaya pendorong Pemerintah Desa untuk mengakomodir kearifan lokal dalam Rencana Pembangunan Desa (*RKP*), maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (*RPJM Desa*) Yayasan Pusaka Indonesia bersama dengan Dewan Adat Kabupaten Sigi yang di dukung oleh Caritas Switzerland, mendorong penerbitan Peraturan Desa (*Perdes*) tentang Penanggulangan Bencana yang berorientasi pada kearifan lokal.

Identifikasi kearifan lokal Kecamatan Dolo Barat dan Dolo Selatan.

Dalam upaya mempertahankan kearifan lokal masyarakat Kaili, dan seiring dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Sigi dalam melakukan Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, penting untuk di dukung hingga tataran Pemerintah Desa yang keberadaan Lembaga Adat sebagai lembaga masih diakui oleh masyarakat. Peran Lembaga Adat sangat signifikan dalam menjaga dan mempertahankan aturan adat dan penegakan hukum adat yang hidup, tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat.

Lembaga Adat juga dapat berperan sebagai bagian dari upaya penyelesaian kasus (*Restorative Justice*) atau penyelesaian hukum diluar pengadilan, peran ini sangat mungkin dilakukan oleh Lembaga Adat atau Dewan Pemerintahan menjaga hukum adat/Hadat. Karena keadilan restoratif ini merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme, tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan *yang dirubah* menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk :

- menyediakan sarana dan prasarana, sumber daya dan pembiayaan untuk pengembangan kelembagaan adat;
- meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penghargaan kearifan

lokal, sebagaimana masa lalu adat istiadat sebagai aturan yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam mengatur tatanan sosial.

Kegiatan ini dapat mengembalikan cita-cita luhur dari leluhur masyarakat Kaili dalam menjaga tata hubungan antara manusia dan lingkungan dimasa modern ini, dengan tetap menjunjung tinggi kearifan lokal yang mengandung nilai-nilai, kepercayaan, etika, perilaku, dan sistem religi yang pantas untuk dipertahankan.

Peraturan Desa yang berorientasi pada Kearifan lokal.

Yayasan Pusaka Indonesia bersama dengan Dewan Adat Kabupaten Sigi yang di dukung oleh Caritas Switzerland telah berupaya melakukan kegiatan yang ditujukan kepada Pemerintahan Desa (Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa/BPD) serta tokoh adat dan tokoh-tokoh kunci di Kecamatan Dolo Barat dan Kecamatan Dolo Selatan tentang kebijakan Pemerintah Kabupaten Sigi dalam upaya Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, agar Pemerintah Desa mendapat informasi, timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut, dan mendorong kepada Pemeritahan Desa agar dapat menjadikan kearifan lokal sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam melakukan perencanaan pembangunan desa.

Dalam upaya pendorong Pemerintah Desa untuk mengakomodir kearifan lokal dalam Rencana Pembangunan Desa (*RKP*), maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (*RPJM Desa*) Yayasan Pusaka Indonesia bersama dengan Dewan Adat Kabupaten Sigi yang di dukung oleh Caritas Switzerland, mendorong penerbitan Peraturan Desa (*Perdes*) tentang Penanggulangan Bencana yang berorientasi pada kearifan lokal.

Identifikasi kearifan lokal Kecamatan Dolo Barat dan Dolo Selatan.

Dalam upaya mempertahankan kearifan lokal masyarakat Kaili, dan seiring dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Sigi dalam melakukan Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, penting untuk di dukung hingga tataran Pemerintah Desa yang keberadaan Lembaga Adat sebagai lembaga masih diakui oleh masyarakat. Peran Lembaga Adat sangat signifikan dalam menjaga dan mempertahankan aturan adat dan penegakan hukum adat yang hidup, tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat.

Lembaga Adat juga dapat berperan sebagai bagian dari upaya penyelesaian kasus (*Restorative Justice*) atau penyelesaian hukum diluar pengadilan, peran ini sangat mungkin dilakukan oleh Lembaga Adat atau Dewan Pemerintahan menjaga hukum adat/Hadat. Karena keadilan restoratif ini merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme, tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan *yang dirubah* menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku, dengan mengedepankan pemulihan pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat. *Restorative Justice* ini pada prakteknya telah dilakukan oleh masyarakat hukum adat Sulawesi Tengah sejak dahulu dalam menyelesaikan pertikaian dalam masyarakat atas tindak pidana "*Notangara*" dan cara inilah yang ditempuh oleh Lembaga Adat.

19

GEMOTHING SPIRIT MITIGASI DARI LEMBATA

JOURNAL CLUB LITERASI BENCANA : PENTINGNYA MEMBANGUN KETAHANAN MASYARAKAT LOKAL

*Kami akan tetap setia sampai kapan pun menjaga dan memelihara spirit
“gemohing” Lembata.
Memuliakan semangatnya, tradisi kerja sama dan sama-sama bekerja dalam
budaya Lamaholot.
Memitigasi krisis baca dengan literasi hingga menjaga alamnya.
- John Batafor-*

Taman Daun Lembata, Nusa Tenggara Timur (NTT), ada dari taman baca untuk sesama saudaranya. Demi nafas literasi dari generasi ke generasi. Goris menghadirkannya di tahun 1987. Hingga tahun 2021, komunitas ini bertahan dilanjutkan oleh anaknya, John Batafor.

Sebanyak 63 taman baca terbangun di beberapa desa. Dan terus akan menggulirkan pembangunan taman baca. Taman baca ini berupaya membiasakan anak-anak melihat, memegang dan membaca buku. Harapannya, agar tak ada generasi yang mengalami krisis literasi. Jika terjadi krisis, bencana sosial dan budaya yang melanda.

John ingin anak-anak yang singgah di taman baca, tak lagi asing dengan buku. Mereka pun bisa bebas bermain, belajar, berbagi budaya, berbagi cerita, bernyanyi, bermusik, serta beragam kegiatan yang asik dengan siapa saja. Satu

taman baca berupaya memunculkan satu relawan guru yang bersedia mengajar anak-anak sekitarnya.

Konsep taman baca itu terbuka. Bukan berupa ruangan tertutup. Karena anak-anak itu semestinya bebas bermain belajar dengan suasana alam yang menyenangkan. Ruang terbuka ini juga mengedukasi agar mereka mencintai serta menjaga alam sekitarnya.

Pembangunan taman baca-taman baca ini murni gotong royong bernaftaskan gemohing. Komunitas Taman Daun ini sering kali dikira datang membawa uang dan proyek. Padahal mereka datang untuk berbagi wawasan pentingnya literasi untuk anak-anak. Dan, mereka pun diterima dengan penuh suka cita gemohing.

Ada yang suka rela menyumbang bambu, tenaga, peralatan. Buku-buku juga datang dari beragam penjuru sumbangan. Taman Daun pun membagi rata pada setiap taman baca agar taman baca berwarna buku-bukunya. Bahkan, mereka pun menyempatkan menggilirkan buku dari satu taman baca ke taman baca lainnya, agar anak-anak bisa bergiliran membaca buku berbeda beda.

Sayangnya, taman baca yang terbangun tidak semuanya terawat dan hidup. Ruang baca dari hasil gemohing itu sepenuhnya perawatannya diberikan ke pengelola masyarakat setempat. Gemohing itu harus berkesinambungan. Jika tidak bisa, John pun hanya bisa pasrah saja, karena tidak bisa terus menerus diawasi dan dibantu. Gemohing itu juga mengajarkan gotong royong dan mandiri merawatnya.

Gerakan sosial Taman Daun pun tak berhenti di literasi. Komunitas ini merambah ke kerja-kerja sosial lainnya, seperti perbaikan rumah, kebencanaan, hingga perbaikan jalan. Masa pandemi pun dipertengahan tahun 2021, komunitas ini justru terus mengepakkan sayap “gemohing” bersama pihak lain memperbaiki infrastruktur.

John bersama komunitasnya percaya dan sangat percaya, nafas “gemohing” ini yang membuat mereka justru semakin kuat. Mereka kuat dan bertahan dengan konsistensi berdiri di kaki sendiri tanpa menggantungkan donasi dari mana pun. Ada dan tiada donasi, kerja sosial tetap jalan terus. Kekuatan “gemohing” menjadikan mereka percaya kekuatan swadaya dana pasti datang.

Membantu atau bekerjasama secara bergiliran dengan prinsip gotong royong, tolong menolong adalah makna sebenarnya gemohing. Tujuan mulianya agar tradisi kerja bersama secara bergilir dalam mengelola seluruh sumber daya yang dimiliki demi mewujudkan kesejahteraan bersama masyarakat desa di Kabupaten Flores Timur.

“Gemohing” atau “gemohin” atau “moit” berasal dari kata bahasa daerah setempat, bahasa Lamaholot. “Gemohe” berarti membantu atau bekerja bersama secara bergiliran. Berprinsip tolong menolong, atau saling melayani di antara mereka tanpa membedakan kelebihan dan kekurangan masing-masing.

Warga yang terlibat dalam *gemohing* serasa saling menyatu dan secara tidak sadar terbentuk karakter sosial mereka. Sehingga, mereka dalam menghargai hak serta kewajiban satu dengan lainnya sebagai satu komunitas.

Pada mulanya *gemohing* hanya bergerak di bidang pertanian. Karena mereka terbiasa karena inisiatif kerjasama, awal mulanya datang dari para petani. Lahan pertanian dikerjakan bersama-sama secara bergotong royong dan bergiliran.

Lambat laun orientasi kegiatan tidak saja di bidang pertanian, melainkan makin meluas menjangkau bidang sosial lain. Konsep “gemohing” mulai mengalami perluasan makna, tidak hanya sebatas pada kegiatan gotong royong. Dari perspektif modal sosial, maka sesungguhnya dalam *gemohing* pun terkandung beberapa elemen, di antaranya kerjasama, norma, partisipasi, saling membantu atau menolong dalam menghadapi masalah sosial.

Elemen-elemen *gemohing* tersebut tumbuh dan berkembang secara alamiah melalui proses interaksi sosial atau relasi dalam jangka waktu lama. Selanjutnya, proses mendorong lahirnya saling percaya di antara anggota masyarakat. Jaringan dan pranata sosial yang terbangun atas dasar kebutuhan bersama menghadapi berbagai problema sosial.

Berbagai aktivitas yang pernah dan dilakukan oleh Komunitas Taman Daun hingga saat ini, konsisten pada pendirian taman baca di desa-desa, distribusi peralatan pendidikan, pembangunan rumah sementara bagi warga kurang mampu maupun korban bencana. Gotong royong melaksanakan kegiatan belajar mengajar, pelatihan menenun, gerakan memberi makan hewan ternak warga saat terjadi bencana, dan masih banyak aksi lainnya

Begitu di masa pandemi mulai tahun 2020, komunitas ini juga tetap berkegiatan distribusi logistik berupa makanan bagi warga, pembuatan serta distribusi peralatan sanitasi. Hingga berkerjasama dengan beberapa lembaga untuk perbaikan jalan.

Goris, seorang pegiat literasi yang mengawali pendirian komunitas Taman Daun Lembata, di tahun 1970. Gerakan ini dipertahankan dan dilanjutkan oleh anaknya, John Batafor. Ia terpanggil untuk membawa perubahan bagi daerah kelahirannya dengan melakukan aksi aksi sosial bagi masyarakat. Dan, ia terpanggil melestarikan budaya leluhur, menjaga nafas “*gemohing*”.

Keanggotaan komunitas Taman Daun merekrut dan menggerakkan relawan lokal. Relawan pun meluas lintas pulau hingga ke mancanegara. Tetap untuk satu semangat bersama-sama menjalankan aksi sosial, dengan kapasitas masing masing, sepereti tenaga, keahliannya, pendanaan, jejaring komunikasi.

Mengenai pendanaan, gerakan komunitas di Lembata, tidak mengandalkan satu pun donatur tetap. Taman Daun menggerakkan jejaring personalnya di seluruh Nusantara dan mancanegara. Penguatan jejaring ini untuk mendukung aksi sosial

yang selama ini dikerjakan.

Hampir sebagian besar pendanaan diperoleh melalui penjualan cinderamata dan penjualan hasil tangkapan laut yang mereka upayakan sendiri menggunakan kapal sendiri. Mereka salah satu contoh komunitas yang mandiri untuk pendanaan. Kekuatan dan semangat gotong royong konsep “gemohing” ini yang membuat mereka bertahan.

Lagi-lagi, “gemohing” merupakan spirit jiwa yang menjadi denyut nadi mereka. Warisan nenek moyang yang dipertahankan sebagai roh Taman Daun.

Nusantara kita pasti kaya konsep “gemohing”. Dan, “gemohing” Taman Daun Lembata, salah satu kekuatan komunitas lokal yang berkembang hingga membangun budaya kesadaran mitigasi bencana. Karena kebencanaan itu urusan bersama dan ditangani dengan nafas kebersamaan. Indah kiranya pesan semangat komunitas Taman Daun yang menjaga dan melestarikan gemohing Lembata juga tumbuh subur layaknya jamur di musim hujan di seluruh pelosok Nusantara.

20

SEMANGAT DISABILITAS DEMI MENEMBUS BATAS KETERBATASAN

JOURNAL CLUB LITERASI BENCANA : PENTINGNYA MEMBANGUN KETAHANAN MASYARAKAT LOKAL

*Kami berusaha menjangkau yang tak terjangkau.
Meningkatkan edukasi dalam segala kebencanaan, meski bukan penyandang disabilitas sekarang, tapi engkau pun bisa menjadi calonnya di masa mendatang.
- I Made Latra -*

Kekuatan kata-kata mampu menjadi motivasi. I Made Latra, percaya dengan itu. Ia juga percaya ketika komunitas yang sama dan “agak” termarjinal itu bersatu, pasti mimpi terwujudkan. Hal ini yang membuatnya berjuang demi kesetaraan segala peluang untuk komunitas penyandang disabilitas.

Apalagi, dalam bidang penanggulangan kebencanaan semua orang memiliki hak sama, terutama pemenuhan kebutuhan dasar. Begitu pula penyandang disabilitas (semestinya) mendapatkan pemenuhan yang sama. Bagaimana pun, apa pun kondisi kebencanaannya, penyandang disabilitas masih terasa belum mendapatkan kesetaraan yang layak.

Latra belajar banyak hal ketika menghadapi situasi kebencanaan erupsi Gunung Agung, Kabupaten Karangasem, Bali, di tahun 2017. Situasi pada tahun itu

menjadikan laboratorium alami dalam sisi penyandang disabilitas. Peristiwa yang nyata ketika itu menjadikannya yakin untuk terus berjuang.

Data yang minim mengenai catatan penyandang disabilitas, kurangnya kecakapan petugas menangani penyandang disabilitas, hingga lemahnya perhatian akses-akses pemenuhan kebutuhan seperti kamar mandi. Dan, hal ini juga merupakan bagian prioritas kesehatan.

Salah satunya, bayangkan, misalnya kamar mandi, pintu dan ukurannya sangat jauh dari untuk penyandang disabilitas fisik bergerak mulai dari masuk dan didalamnya. Ragam hal yang ditemui di lapangan dan sepatutnya menjadi evaluasi bersama. Ketersediaan alat bantu pun minim, termasuk kecakapan petugas.

Bagaimana pun mitigasi bencana adalah hak segala masyarakat disesuaikan dengan kawasan rawan bencananya. Informasi dan edukasi yang diberikan pun diharapkan tak melupakan para penyandang disabilitas.

Keluarga yang memiliki anggota keluarganya penyandang disabilitas pun berhak mendapatkan pelatihan menghadapi kebencanaan bersama-sama. Karena petugas yang memiliki kecakapan, membutuhkan waktu menjangkau satu per satu warga disabilitas ini. Maka, keluarga, lah, yang terdekat siap untuk selamat.

Lelaki asli Bali, yang bergabung dengan Pusat Pemberdayaan Disabilitas (Puspadi) Bali sejak 2013, bersyukur mendapatkan pengalaman ikut serta dalam penanganan erupsi saat itu. Pengalaman itu menambah daftar catatan makin pentingnya memperluas pemberdayaan hingga edukasi mengenai disabilitas ini ke segala lini masyarakat.

Betapa mitigasi bencana (sepertinya) masih terlena dengan mereka yang “sempurna”. Padahal, mereka yang “sempurna” pun berpotensi menjadi penyandang disabilitas. Beberapa kali ia mengingatkan dan menegaskan, para penyandang disabilitas itu tidak butuh dikasihani, apalagi ketika sama-sama menghadapi bencana. Mereka merupakan bagian masyarakat yang butuh dirangkul

dan sama-sama bekerja sama menghadapi bencana. Bersama-sama menyiapkan bersama mitigasi bencana.

Karena kecelakaan, Latra menjadi bagian penyandang disabilitas bukan dari sejak kelahiran. Sehingga ia berusaha empati dan menyadari betul siapa pun bisa seperti dirinya.

Latra makin menyadari betapa apa yang didedikasikan hidupnya membantu sesama penyandang disabilitas masih belum cukup. Betapa sedihnya, kesempatan mendapatkan akses pertolongan mengungsi, hunian sementara hingga kamar mandi pun masih banyak terlewatkan. Kesetaraan memiliki kecukupan masih belum maksimal.

Ia terlahir bukan penyandang disabilitas. Suatu kecelakaan membuatnya menjadi penyandang disabilitas. Berjalannya waktu, Latra menemui banyak hal yang membuatnya tak lagi memiliki akses yang sama dengan mereka yang “sempurna” fisiknya. Pengalaman benar-benar guru yang baik.

Indonesia salah satu negara yang meratifikasi konvensi tentang hak-hak penyandang disabilitas. Selanjutnya, lahir Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 mengenai Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas).

Komitmen ditunjukkan lagi dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 mengenai Penyandang Disabilitas. Produk hukum ini menggantikan sebelumnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.

Penyandang disabilitas, dalam undang-undang memiliki definisi setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Karenanya mereka berhak mendapatkan kesempatan dalam mengembangkan dirinya melalui kemandirian

sebagai manusia yang bermartabat.

Perlu dipahami definisi masing-masing jenis penyandang disabilitas, sesuai undang-undang. Penyandang disabilitas fisik itu terganggunya fungsi gerak, di antaranya amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegia, *celebral palsy* (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil. Pada penyandang disabilitas mental berupa terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku.

Selanjutnya, penyandang disabilitas intelektual itu terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata. Dan, penyandang disabilitas sensorik merupakan adanya gangguan salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.

Populasi penyandang disabilitas menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) di Indonesia, tahun 2012 adalah berjumlah sebanyak 2,45 persen atau 6.515.500 jiwa dari total penduduk 244.919.000 jiwa.

Kementerian Sosial merilis kemampuan penyandang disabilitas dan kemampuan pemerintah, masyarakat (organisasi sosial penyandang disabilitas), keluarga memiliki perbandingan 101:1. Artinya, sebanyak 101 orang penyandang disabilitas ditangani oleh satu lembaga pemerintah dan elemen lainnya.

Maka menjadi penting keberadaan komunitas-komunitas berbasis masyarakat yang dapat membantu menyebarkan virus mitigasi bencana dalam hal kesehatan. Jika masyarakat menyadari arti mitigasi dan mengenal kerawanan ancaman di daerahnya masing-masing, potensi menjadi penyandang disabilitas kecil. Justru bisa saling membantu antara mereka yang “baik-baik” fisiknya dengan penyandang disabilitas.

Tak hanya itu, Latra pun berharap masyarakat peduli dan saling menginformasikan lingkungannya yang membutuhkan alat bantu. Karena keberadaan komunitas, menurutnya, mampu menjadi jaringan terbaik. Ya, karena alat bantu pun memerlukan biaya yang tidak sedikit. Harapannya, mereka yang tak mampu tetap

bisa mendapatkan alat untuk tetap semangat hidup.

Meski sempat terhenti sejenak di awal pandemi, di tahun 2020, Latra dan Puspadi Bali kembali aktif. Mereka kembali berkeliling jemput bola penyandang disabilitas yang membutuhkan alat bantu untuk bisa berkarya dan beraktivitas. Partisipasi dalam kebencanaan, Latra bersama Puspadi Bali membantu pengadaan beragam alat sepanjang perjalanannya sekitar 5.000 buah. Misalnya, kaki palsu itu benar-benar disesuaikan dengan bentuk, ukuran dan semaksimal mungkin nyaman digunakan.

Paradigma harus berubah dari yang berpasrah menjadi siap untuk selamat! Paradigma dari belas kasihan menjadi saling bekerjasama memitigasi bencana bersama-sama sesuai karakter wilayah masing-masing. Semangat!

21

OMO HADA NIAS, PILAR-PILAR SIAGA BENCANA

JOURNAL CLUB LITERASI BENCANA : PENTINGNYA MEMBANGUN KETAHANAN MASYARAKAT LOKAL

Nias Sokhi Mojago moroi ba Wondrōrōu
Lebih baik mencegah dari pada mengobati.
- Masyarakat Desa Bawomatalou Nias -

Gempa!

Lonceng tanda bencana pun bakal berbunyi. Mari siap untuk selamat! Kami berupaya secara turun temurun dari leluhur guna memitigasi agar tangguh dari segala ancaman kebencanaan. Omo Hada adalah salah satu jawabanya...

Omo Hada merupakan jalinan kontruksi rumah tradisional asli yang lahir dari tangan-tangan turun temurun masyarakat asli Nias. Rumah-rumah itu masih berdiri tegak berderet-deret di komunitas masyarakat asli Nias. Mari belajar bersama menuju Desa Bawomataluo, Kecamatan Fanayama, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara.

Kampung adat asli ini berada di atas bukit ketinggian 324 meter diatas permukaan laut . Kampung ini merupakan kampung adat terbesar di Nias Selatan, rumah Omo Hada itu berderet sebanyak 250 unit.

Pada pukul 23.09 Wib, tanggal 28 Maret 2005, gempa berskala 8,7 SR, berulang mengguncang Nias. BMKG mencatat kedalaman 30 kilometer di bawah permukaan Samudera Hindia. Ketika itu pemerintah merilis jumlah korban meninggal

sebanyak 1.000 orang, 49 orang luka berat, 585 orang luka ringan, dan 45.517 orang mengungsi. Sebelumnya, akhir tahun 2004, gempa mengguncang Nias bersamaan dengan tsunami di Aceh.

Ketika rumah-rumah “modern” dengan konstruksi menggunakan cor besi rusak berat, dan banyak yang ambruk. Omo Hada tetap berdiri kokoh. Bergeser pun tidak. Masyarakat adat setempat pun selamat. Perbedaan dari kedua kerusakan itu berada dikekuatan konstruksi rumah adat jauh lebih mampu menahan gempa kuat. Kuncinya ada pada paku. Omo Hada ini sama sekali tidak menggunakan paku paku besi atau cor besi-besi bersemen. Rumah tradisional ini berbahan kayu yang dirancang bangun untuk segala mitigasi bencana.

Selain itu, struktur bawah rumah diantara tiang-tiang penyangga ada tiang disebutnya driwa, berbentuk seperti huruf V. Driwa berfungsi untuk menyanggah balok dinding kiri kanan sehingga dapat menstabilkan daya oleng rumah saat gempa bumi.

Rumah Omo Hada ini memiliki pintu samping yang saling terhubung antara Omo Hada satu dengan yang lainnya. Pintu tersebut berfungsi mempermudah dalam penyelamatan/evakuasi saat terjadi kebakaran.

Di Nias Selatan, biasanya rumah dibangun dengan sistem kompleks pemukiman. Ada ratusan tempat tinggal yang dibangun di kedua sisi jalan. Pemukimannya dibuat menjulang, sehingga mengharuskan penghuni atau tamunya harus menaiki tangga batu yang cukup panjang.

Sesuai jenis, rumah adat Nias Selatan ada dua peruntukan berdasarkan status kepemilikan, yaitu Omo Sebua dan Omo Hada. Omo Sebua hanya dihuni oleh kepala negeri, kepala desa, dan kaum bangsawan saja. Sementara Omo Hada dibuat untuk masyarakat umum.

Ciri asli juga masih tampak dari pintu masuk Omo Sebua di Bawomatoluo. Setiap orang mesti masuk melalui pintu dari bagian bawah kolong rumah. Interior rumah

pun masih terjaga, dimana dapur terdapat di ruangan tengah dan satu lagi di bagian belakang. Posisi dapur di ruangan tengah menandakan bahwa Omo Sebua adalah milik semua rakyat desa ini.

Menejemen bencana tercermin jelas pada pendirian perkampungan dan pendirian rumah adat Nias yang selalu diikuti dengan perhitungan matang dampak bencana. Serta, perhitungan menimbulkan risiko pada usaha dan tenaga yang mereka lakukan. Karenanya lahir istilah *Nias Sokhi Mojago moroi ba Wondrōrōu*, lebih baik mencegah dari pada mengobati.

Mengenai aspek kesiapsiagaan struktur kehidupan masyarakat Bawomatoluo, dalam upaya pengurangan risiko bencana, atas prakarsa dan peran para penatua adat melalui forum masyarakat telah membentuk kelompok masyarakat Fana'a. Kelompok ini bergantian setiap hari tinggal di pos ronda untuk memantau keamanan kampung dan sekitarnya.

Salah satu contoh apabila ada asap dari rumah warga yang membumbung tinggi baik siang maupun malam rumah tersebut segera dipantau keadaannya dan berfungsi sebagai sistim peringatan dini. Demikian juga kalau gempa bumi atau angin puting beliung segera pos jaga membangunkan warga yang terlelap.

Pembuangan air hujan dari atap rumah harus jatuh persis di parit pemampungan air agar tidak merembes kemana mana yang dapat berakibat longsor.

Halaman luas perkampungan secara kasat mata tampak datar tetapi kalau diwater pass dari ujung ke ujung tampak permukaan halaman seperti permukaan kuku jari (*Ni'ohulu Za'a*) atau cembung tujuan agar air hujan tidak mengendap di halaman sehabis hujan langsung kering seketika.

Karenanya, betapa kaya warisan leluhur. Nias ini adalah salah satunya yang bisa dibanggakan dan dilestarikan. Harapannya, keberadaan Oma Hada mampu menjadi referensi infrastruktur menuju masyarakat siap untuk selamat. Tentunya disesuaikan dengan kondisi dan situasi masing-masing. Semangat!

22

MITIGASI MELINDUNGI BENTANG ALAM KARST KENDENG UTARA “IBU BUMI”

JOURNAL CLUB LITERASI BENCANA : PENTINGNYA MEMBANGUN KETAHANAN MASYARAKAT LOKAL

“Ibu bumi wis maringi, Ibu bumi dilarani, Ibu bumi kang ngadili
(Ibu bumi sudah memberi, ibu bumi disakiti, ibu bumi yang akan mengadilî)”.
Karena leluhur berpesan, jagalah alam yang tak pernah ingkar janji
memberikan penghidupan kepada kita semua.
- Gunarti Sedulur Sikep-

Sedulur Sikep Samin sedang mempertahankan tanah dan air

Ibu Pertiwi, seperti lantunan tembang Pangkur di atas. Jadi, mereka tidak tengah membangun menara tinggi untuk melawan negara. Kami juga tak sedang anti pembangunan. Berpikir untuk ini pun tidak. Kami hanya ingin mengejawantahkan besarnya cinta ibu pertiwi kepada negara. Bagaimana pun, kami yakin dan percaya adanya kekuatan negara tercinta ini adalah pangan: tanah dan air.

Mereka mengajak untuk memperkuat kualitas lingkungan dan alam demi kemaslahatan masyarakat. Ya, khususnya mereka yang hidup di ranah tanah pertanian, bercocok tanam untuk pangan. Kehidupan di sekitar Pegunungan Kendeng, Jawa Tengah.

Beningnya air yang mengalir adalah kekuatan kualitas pangan. Maka, tanggung jawab kita bersama (semestinya) untuk mempertahankan keberlangsungan lingkungan selamanya demi cucu-cucu-cicit-cicit...dan seterusnya, dari generasi

ke generasi.

Mereka para petani. Bertani merupakan profesi ribuan orang di sekitar Pegunungan Kendeng. Semuanya alami demi menjaga keseimbangan alam dan hati ibu pertiwi.

Ketenangan alam terusik di tahun 2006. Lalu, tahun itu menjadi awal perjuangan ketika adanya rencana ekspansi pabrik semen di Pegunungan Kendeng.

Komunitas Sikep Samin merupakan kelompok masyarakat adat yang sehari-harinya menjalankan ajaran Samin Suryo Sentiko, yang tanggal 15 Maret 2021 genap seabad. Ajaran tentang menjalani hidup dengan bertani dan berternak. Mereka berkembang di Kabupaten Bojonegoro, Lamongan, Blitar, dan Madiun Provinsi di Jawa Timur dan Kabupaten Blora, Pati, dan Kudus Provinsi Jawa Tengah.

Samin Surosentiko, di masa penjajahan Belanda tahun 1890. Jaman itu Samin menolak peraturan kolonial yang mengganggu hak-hak tradisional atau rakyat.

Gunarti, ibu rumah tangga dari komunitas Sikep Samin ini, kesehariannya merawat sawah-sawahnya terusik dan khawatir pangannya tercemar. Ia pun mengajak bersama ibu-ibu lainnya untuk merenungi wasiat leluhur mengenai arti menjaga alam dan lingkungan.

Jika terjadi pencemaran dampak dari penambangan untuk pabrik semen ini, mereka lah yang bisa jadi menanggung “dosa” tak mampu menjaga amanah leluhur. Dan, alam rusak. Pangan untuk anak cucu terracuni pencemaran.

Mereka mulai berjuang. Perjuangan mempertahankan benteng Ibu Pertiwi dimulai tahun 2006. Sebagai ibu rumah tangga yang juga petani dan merawat keluarga, hal ini bukan perjalanan dan pilihan mudah.

Bagi Gunarti bersama Sedulur Sikep, kita semua ini mengemban amanah Ibu pertiwi. Jika bukan kita, lalu siapa. Bukan, kah, segala bencana bisa dicegah jika kita bersama-sama menyadari betapa pentingnya memperkuat keberlangsungan hidup.

Mereka, komunitas Sikep Samin, mengolah tanah pertanian padi yang tercatat dari tahun 2005 sampai tahun 2009, seluas 101,4 hektar. Tak ada gagal panen sepanjang tahun itu, meski ada perubahan iklim kemarau panjang. Hanya saja produksi padi sempat menurun di tahun 2007, dari 764,96 ton di tahun 2005, menjadi 715,07 ton. Dua tahun setelahnya, produksi padi tetap stabil di 740,02 ton.

Penurunan ini dampak dari perubahan iklim. Sedulur Sikep berupaya tetap pada sistem pertanian organik, tanpa pestisida dan bahan kimia lainnya.

Karenanya, mereka sangat tidak setuju jika kawasan karst Pegunungan Kendeng tercemar dengan adanya pembangunan pabrik semen. Apalagi, propaganda pabrik itu menjajikan kehidupan ekonomi lebih baik. Bagaimana bisa lebih baik jika apa yang ditanam dan kemudian dimakan semua berasal dari lingkungan yang tercemar? Belum lagi menghadapi perubahan iklim.

Bayangkan, mata air terganggu. Pencemaran yang terjadi. Padahal air-air itu yang mengalir setiap hari ke sawah, kebun, ternah serta memasak untuk keberlangsungan kehidupan semua makhluk-Nya. Belum lagi pencemaran tanah dan udara. Sederhana tetapi berdampak luas pencemarannya.

Mereka, Sedulur Sikep di Sukolilo, pernah memenangi gugatan di pengadilan tata usaha negara (PTUN) dan mahkamah agung (MA) mengenai penolakan ekspansi PT Semen Indonesia di Kabupaten Pati, antara tahun 2006 sampai tahun 2009. Selanjutnya dibarengi pemerintah menetapkan kawasan karst (batu gamping) Pegunungan Kendeng, di Sukolilo, sebagai kawasan lindung. Kalah di Pati, ekspansi semen mendapatkan ijin di Tegaldowo, Kabupaten Rembang, tahun 2012.

Pegunungan Kendeng membentang di utara Pulau Jawa. Wilayahnya melingkupi dua provinsi, yaitu Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Bentangan pegunungan karst Kendeng, terdapat cekungan air tanah (CAT) Watuputih dan terdapat 109 mata air. Cekungan ini yang menghidupi para petani lintas kabupaten, yakni Rembang, Blora, Pati, hingga Grobogan.

Nah, pendirian pabrik semen di atas cekungan air tanah itulah yang membuat resah para petani. Pegunungan Kendeng itu batuan kapur atau gamping yang berpori. Padahal kawasan bentang alam karst disebut berfungsi sebagai pengatur alami tata air dan menyimpan nilai ilmiah, sehingga perlu dilestarikan dan dilindungi keberadaannya dalam rangka mencegah kerusakan.

Bagaimana jadinya jika bentang kawasan lindung itu ditambang? Bagaimana keberlangsungan keseimbangan alam semesta ini?

Hingga akhirnya, pada tahun 2016, di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, kedua kaki Gunarti dan 48 orang ibu ini mereka cor kotak-kotak semen. Itu “gaya” protes mereka. Semua demi cinta mereka untuk Ibu Pertiwi: tanah, air, dan udara serta negara.

Hasil penelitian Yanuar Sumarlan dan James Reinaldo Rumpia, yang dibukukan berjudul “Sejarah Panjang Gerakan Wong Sikep atau Sedulur Sikep di Jawa Tengah dalam Sifat Paradoksnya: Sebuah Bentuk Perjuangan Hak Asasi Manusia tanpa Kekerasan melalui Nama Berbeda”. Penelitiannya diterbitkan Heinrich Boll Stiftung Kantor Regional Asia Tenggara, Bangkok, Agustus 2021. Mereka menuliskan gerakan Gunarti bersama ibu-ibu Kendeng ini masuk sebagai karakter millenarian karena tak bisa lagi disebut sebagai perlawanan sederhana. Apalagi aksi mereka masuk daftar gerakan berbasis petani yang terpanjang di Asia Tenggara.

Perjalanan perjuangan komunitas Sedulur Sikep, merupakan “gaya” tanpa kekerasan demi menjaga ibu pertiwi tetap terbentang hijau. Karena tanah dan air adalah amanah leluhur yang harus dijaga turun temurun untuk kekuatan pangan anak cucu selamanya. Jika tanah, udara, dan air tercemar, mereka merasa bersalah tak bisa menjaga amanah.

Sekiranya, kekuatan komunitas mampu menjadi inspirasi bagi kita semua. Tentunya, menjaga dengan “gaya” masing-masing demi satu tujuan mitigasi bencana, meluaskan budaya sadar bencana. Kita jaga alam, alam jaga kita, bukan jargon semata.

23

BERSATU PADU MERANGKUL GUNUNG MERAPI

JOURNAL CLUB LITERASI BENCANA : PENTINGNYA MEMBANGUN KETAHANAN MASYARAKAT LOKAL

Komunitas Merapi menjadi awal gerakan-gerakan PRB di Yogyakarta dan Jawa Tengah tahun 1994. Gerakan yang hadir tumbuh seiring dengan penenganan dampak erupsi G. Merapi tanggal 22 November 1994 ini disepakati bernama Paguyuban Sabuk Gunung (Pasag) Merapi. Karena gerakan ini diperuntukkan bagi dusun-dusun tertinggi di seputar Merapi. Tapi ternyata, bagi sebagian warga di sektor Boyolali, nama Sabuk Gunung berkonotasi pada gerakan masa lalu yang cenderung merugikan, maka selanjutnya berubah menjadi Paguyuban Siaga Merapi.

Gerakan ini dilakukan sebelum pengorganisasian masyarakat di daerah rawan bencana atau lembaga Pengelolaan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK) belum populer. Strategi komunitas di lereng G. Merapi adalah dengan semboyan “Nyawiji Mrih Lestari Rinengkuh Merapi” yang artinya bersatu bersama G. Merapi (Bersatu-padu Merangkul Merapi). Merapi tidak dilihat sebagai ancaman bencana tapi sebagai sumber-sumber penghidupan dan sumber daya yang dikelola secara baik. Pasag Merapi ini menghimpun warga lereng Merapi di 4 (empat) kabupaten lingkaran Merapi, yaitu Magelang, Sleman, Boyolali dan Klaten.

Gerakan-gerakannya tidak hanya tentang kesiapsiagaan bencana dan ketangguhan menangani ancaman bencana tapi juga pelestarian lingkungan dan perlawanan terhadap kerusakan lingkungan terus dilakukan oleh komunitas dengan semboyan:

"sak dumuk bathuk, sak nyari bumi" yang artinya komunitas membela betul tanahnya dengan cara melindungi. Selain itu ada semboyan "sak bejo-bejone wong lali, luwih bejo wong eling lan waspodo" yang artinya seberuntungnya orang yang lupa lebih beruntung orang yang sadar dan waspada (*mindfulness - awarance*). Ada semangat yang dibangun.

Komunitas lereng Merapi juga membentuk radio komunitas sebagai media komunikasi dan koordinasi mendukung cita-cita Pasag Merapi, yaitu "Hidup Nyaman Bersama Ancaman Gunung Merapi". Menurut Sukiman, aktivis Pasag Merapi di Klaten, dinamika radio komunitas dimulai tahun 2002. Radio Komunitas Lintas Merapi di Deles - Klaten (2004), yang dikelolanya, yang berdiri bersama-sama 4 radio komunitas lainnya yang kehadirannya juga difasilitasi KAPPALA Indonesia, yaitu: Radio Gemi Nastiti di Tegalrejo - Boyolali (2010), Radio Kawastu di Turgo - Sleman, Radio Pesona Merapi di Kaliurang Utara - Magelang (2002), dan Radio Kawasan Merapi di Babadan - Magelang (2004). Tujuan didirikan serangkaian radio adalah sebagai simpul informasi, komunikasi, dan pemberdayaan warga Merapi melalui radio komunitas.

Radio komunitas yang merupakan bersama warga dengan peralatan sederhana ini sering disebut sebagai RCTI dengan arti "radio cilik tanpa ijin" karena radio komunitas ini berdiri dan menjalankan siarannya tanpa ijin dari lembaga yang berwenang di pemerintah daerah. Hal ini sebagai plesetan dari akronim RCTI yang televisi swasta terkenal pada tahun 2000-an. Bagi radio komunitas untuk mendapat ijin frekuensi dari Dinas Komunikasi setempat adalah sesuatu yang sangat sulit dan butuh biaya besar.

Tahun 2006 diinisiasi adanya jejaring radio komunitas Jalin Merapi, yang bertujuan untuk mendorong kelancaran informasi komunikasi yang akurat kepada perorangan dan komunitas yang terancam bahaya untuk bertindak secara cepat pada waktu yang tepat untuk mengurangi risiko bencana. Jejaring radio komunitas ini dilakukan bersama K-Fm dan MMC. Jalin Merapi dengan melakukan kegiatan-kegiatan informasi, komunikasi menggunakan banyak media agar bisa di

manfaatkan oleh banyak pihak. Pengguna media Jalin Merapi antara lain Pasag Merapi (relawan di empat kabupaten), pengguna HT (radio komunikasi), pengguna internet serta pemerintah dan swasta (sebagai corong untuk komunikasi risiko).

Pasag Merapi dan Jalin Merapi menggunakan berbagai alat (aplikasi) seperti website (tidak berlanjut karena biaya), twitter, whatsapp (WA), facebook, email, dan HT. Komunikasi dan koordinasi Pasag Merapi saat ini lebih sering dilakukan melalui grup WA yang mencapai 181 anggota relawan. Informasi situasi, kondisi dan status gunungapi, serta dinami warga dikomunikasikan melalui grup ini. Demikian pula ketika status berubah, maka pola komunikasi dan koordinasi juga berubah. Dengan twitter warga menulis apa yang dialami (kebutuhan di pengungsian, misalkan kebutuhan bahan pangan, selimut, dll). Setiap orang yang mendapatkan bantuan wajib menuliskan bantuan yang diterima di twitter. Minimal ucapan terima kasih. Apabila terjadi informasi yang salah atau hoaks maka masyarakat cepat memberikan informasi yang benar. Hal ini merupakan literasi media oleh warga itu sendiri. Terjadi keputusan-keputusan secara mandiri oleh komunitas.

Tahun 2010 ada dibagi relawan yang khusus untuk "menulis dan melaporkan" melalui twitter. Saat ini (Oktober 2021) follower Twitter Jalin Merapi telah mencapai 135,6 ribu pengikut dan 30,7 ribu tweet. Dinamika warga/komunitas seputar Merapi saat ini antara lain: masyarakat cepat merespon informasi; sudah terjadi literasi informasi di komunitas /masyarakat; terjadi komunikasi dan mengerucut koordinasi para pihak, masyarakat, pemerintah dan swasta; menghasilkan keputusan-keputusan secara mandiri oleh kesepakatan komunitas, contohnya: muncul Tabungan Siaga bencana, ada pendataan asset oleh warga, keputusan evakuasi mandiri di komunitas, kesepakatan perubahan rencana pengungsian saat Pandemi Covid-19, penyiapan tempat dan waktu oleh kesepakatan masyarakat, adanya keputusan tindakan yang berbeda-beda di masing-masing tepat sesuai besar kecilnya ancaman Merapi; berdirinya Tim Siaga Desa, organisasi PRB, SOP tingkat masyarakat dalam menghadapi ancaman merapi;

cara berpikir bahwa Merapi merupakan berkah bukan serta merta ancaman bencana, tetapi berkah yang harus dikelola secara baik; pembangunan di Merapi sudah memperhitungkan mitigasi bencana.

Pembelajaran dari Pasag Merapi dan Jalin Merapi antara lain: pengurangan risiko bencana menjadi yang lebih penting dari pada penanganan bencana; keterlibatan komunitas sebagai subyek; integrasi teknologi/media yang efektif; cepat, akurat bisa dipercaya (berguna untuk verifikasi publik); kolaborasi/berjejaring; interaksi langsung dari berbagai pihak yang berkepentingan; pembelajaran terus-menerus menyesuaikan perkembangan jaman. Masyarakat bisa dan mampu mengelola risiko bencana dan hal ini menjadi dasar dalam PRB, memanfaatkan teknologi dan platform - aplikasi berkembang menyesuaikan jaman dan minat masyarakat itu sendiri (misalkan dari HT menjadi radio komunitas - website - Twitter - Facebook - WA); pemanfaatan teknologi dalam pengorganisasi masyarakat untuk PRB menjadi penting dalam keberhasilan upaya PRB.